

## GROUP GRUP

### Standard Chartered

Standard Chartered is a leading international banking group (hereinafter referred to as "Group"). It has operated for over 150 years in some of the world's most dynamic markets. We bank the people and companies driving investment, trade, and the creation of wealth across Asia, Africa and the Middle East.

With our headquarters in London, we have a dual primary listing on the London and Hong Kong Stock Exchanges, and rank among the companies listed in the FTSE 100 by market capitalisation.

Our roots in trade finance and commercial banking have been at the core of our success throughout our history, but our business is now more broadly based on includes Retail Banking more than 30 of our markets. Our brand promise, *Here for good*, is embedded in every decision we make, and is the cornerstone of our commitment to our clients, our shareholders and the countries where we operate.

In June 2015, Bill Winters was appointed as the new Group Chief Executive. Shortly afterwards, in July 2015, we announced a new Management Team, together with a new organisational structure. The reorganisation of our business was implemented from 1 October 2015, and will be reflected in our 2016 Annual Report and Accounts.

With the new structure, we have simplified and streamlined the business, reducing layers, providing clear accountability and driving efficiencies, while maintaining a sharp focus on the highest standard of risk management, compliance and conduct.

In addition, the reorganisation of our business ensures that local clients are served through a country management and that we deliver our products and capabilities consistently to all our clients.

As a result, we consolidated eight regions into four regional businesses, each lead by a Regional Chief Executive Officer. The Regional CEO have

### Standard Chartered

Standard Chartered adalah grup perbankan internasional yang sangat maju (selanjutnya disebut "Grup"). Grup beroperasi lebih dari 150 tahun di pasar yang dinamis. Kami melakukan bisnis perbankan dengan pribadi dan perusahaan yang menggerakkan roda investasi, perdagangan dan membentuk kekayaan di seluruh Asia, Afrika, dan Timur Tengah.

Dengan kantor pusat kami di London, kami memiliki dua listing primer di Bursa Efek London dan Hong Kong, dan peringkat di antara perusahaan yang terdaftar di FTSE 100 dengan kapitalisasi besar.

Akar kami dalam pembiayaan perdagangan dan perbankan komersial telah menjadi inti dari kesuksesan kami sepanjang sejarah kami, tapi bisnis kami sekarang lebih luas berdasarkan mencakup Retail Banking lebih dari 30 pasar kami. Janji "*Here for good*" tertanam dalam setiap keputusan yang kita buat, dan merupakan landasan dari komitmen kami untuk klien kami, pemegang saham dan negara-negara dimana kami beroperasi.

Pada bulan Juni 2015, Bill Winters diangkat sebagai Group Chief Executive. Tak lama setelah itu, pada bulan Juli 2015, kami mengumumkan Tim Manajemen baru, bersama-sama dengan struktur organisasi yang baru. Reorganisasi bisnis kami dilaksanakan dari 1 Oktober 2015, dan akan tercermin dalam laporan tahunan kami di tahun 2016.

Dengan struktur yang baru, kami telah disederhanakan dan efisiensi bisnis, mengurangi lapisan, memberikan pertanggungjawaban yang jelas dan mengemudi efisiensi, sambil mempertahankan fokus yang tajam pada standar tertinggi manajemen risiko, kepatuhan dan perilaku.

Selain itu, reorganisasi bisnis kami memastikan bahwa klien lokal disajikan melalui manajemen negara dan bahwa kita memberikan produk dan kemampuan kami secara konsisten untuk semua klien kami.

Sebagai hasilnya, kami konsolidasi delapan daerah menjadi empat bisnis regional, masing-masing dipimpin oleh seorang Regional Chief Executive

responsibilities to our local clients and businesses, bottom-line profitability and capital, and relationships and with local regulators. They also help drive conduct and a comprehensive programme to pursuit of three core objectives

- Secure the foundations
- Get lean and focused
- Invest and innovate

As we drive further efficiencies and improve the way we work, the overall headcount of the Group reduced from 90,940 at the end of 2014 to 84,076 partly through natural attrition.

Officer. Regional CEO memiliki tanggung jawab untuk klien kami lokal dan bisnis, profitabilitas *bottom-line* dan modal, dan hubungan dan dengan regulator lokal. Mereka juga membantu mendorong perilaku dan program yang komprehensi untuk mengejar 3 tujuan inti.

- *Secure the foundations*
- *Get lean and focused*
- *Invest and innovate*

Seperti kita mendorong efisiensi lebih lanjut dan memperbaiki cara kita bekerja, berkurangnya jumlah keseluruhan kepegawaian keseluruhan Grup dari 90.940 pada akhir 2014 untuk 84.075 dimana sebagian pengurangan akibat pengurangan secara natural.

## Establishment

Group is listed on London and Hong Kong stock exchanges and rank among the companies listed in the FTSE 100 by market capitalisation. Our Indian Depository Receipts are listed on the Bombay and National Stock Exchanges of India.

## Pendirian

Group tercatat di bursa saham London dan Hong Kong dan peringkat di antara perusahaan yang terdaftar di FTSE 100 dengan kapitalisasi pasar. Depository Receipt India kami tercatat di Bombay dan National Stock Exchange dari India.

## Organization Structure

The new management team, consisting of 15 members, has responsibility for executing the strategy agreed by the Board. It is currently comprises three Group Chief Executive directors, including the Group Chief Executive Officer and Group Chief Financial Officer, four Regional CEOs, client businesses CEOs; and global function heads.

## Struktur Organisasi

Tim manajemen baru, yang terdiri dari 15 anggota, memiliki tanggung jawab melaksanakan strategi disetujui oleh Dewan. Saat ini terdiri dari tiga direksi Group Chief Executive, termasuk kepala Group Executive Officer dan Group Chief Financial Officer, empat CEO Regional, Bisnis klien CEO, dan kepala fungsi global.

## Share Capital

The issued ordinary share capital of the Company was increased by 805,467,656 during the year. 728,432,451 ordinary shares were issued under the Company's right issued announced on 3 November 2015. 5,694,811 ordinary shares were issued under the Company's employee share plans at prices between nil and 1,140 pence. 71,340,394 ordinary shares were issued under the Company's share dividend scheme.

## Modal Saham

Penerbitan saham perusahaan meningkat sebesar 805.467.656 selama tahun 2015. 728,432,451 saham diterbitkan dibawah hak perusahaan untuk mengeluarkan pengumuman pada tanggal 3 November 2015. 5,694,811 saham diterbitkan dibawah program kepemilikan saham untuk pegawai pada harga antara nihil hingga 1.140 pence. 71,340,394 saham diterbitkan oleh perusahaan dibawah skema dividen per saham.

## Major Interest in Shares and Voting Rights

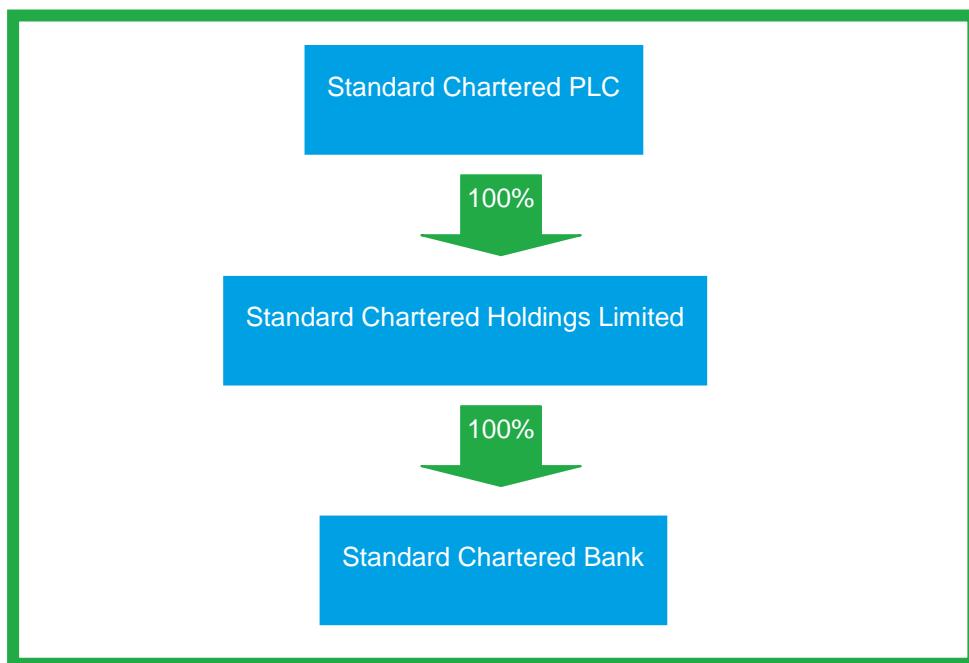
As at 31 December 2015, Temasek Holdings (Private) Limited (Temasek) is the only shareholder that had an interest of more than 10 per cent in the Company's issued ordinary share capital carrying a right to vote at any general meeting in Group.

Based on notification, Temasek's interest holds 15.77% of voting rights indirect and 517,051,383 ordinary shares.

## Pemegang Saham Terbesar dan Hak untuk Memberikan Suara

Pada tanggal 31 Desember 2015, Temasek Holding (Private) Limited ('Temasek') tercatat sebagai satu-satunya pemegang saham yang memiliki modal saham di atas 10 persen sehingga memiliki hak untuk memberikan suara pada setiap rapat umum yang diadakan oleh Group.

Berdasarkan notifikasi, kepemilikan Temasek memegang 17.73% hak suara tidak langsung dan 517.051.383 saham biasa.



## Committees

The Board delegates certain responsibilities to its committees to assist carrying out its function of ensuring independent oversight.

- a. **Audit Committee:** Oversight and review of financial, audit and internal control issues
- b. **Board Risk Committee:** Oversight and review of fundamental risk including credit, market, capital, liquidity, operational, country cross-border and pension risks
- c. **Brand and Values Committee:** Oversight and review of brand positioning, treating customers fairly, reputational risk, ethics and sustainability issues
- d. **Remuneration Committee:** Oversight and review of remuneration, share plans and other incentives.

## Komite-Komite

Bank menerapkan beberapa perubahan di dalam struktur dewan komite sebagai bagian usaha untuk meningkatkan kualitas tata kelola dan memberikan pengawasan yang lebih efektif.

- a. **Komite Audit:** Mengawasi dan memeriksa kondisi keuangan, aktifitas pengendalian kontrol (audit) dan penanganan masalah kontrol internal.
- b. **Komite Dewan Risk:** Mengawasi dan mengamati risiko-risiko terkait kegiatan bank antara lain risiko kredit, risiko pasar, risiko modal, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko cross border, dan risiko pension
- c. **Komite Brand and Values:** Mengawasi dan mengamati kedudukan bank di mata konsumen, melayani nasabah dengan adil, risiko reputasional, risiko etik dan masalah-masalah yang berkesinambungan
- d. **Komite Remunerasi:** Mengawasi dan mengamati remunerasi, rencana pembagian saham dan insentif lainnya.

- e. Governance and Nomination Committee: Oversight and review of Board and executive succession, Overall Board effectiveness and governance issues
- f. Board Financial Crime Risk Committee: Oversight and review of all financial crime compliance matters
- e. Komite Tata Kelola dan Nominasi: Mengawasi dan mengamati penerus dewan dan jajaran eksekutif. Sekaligus pelaksanaan tata kelola.
- f. Komite Financial Crime Risk: Mengawasi dan kepatuhan hal-hal terkait *financial crime*.

# STANDARD CHARTERED BANK INDONESIA

## STANDARD CHARTERED BANK INDONESIA

### 1. General Information / Informasi Umum

#### Background

In Indonesia, historically Standard Chartered Bank had started its business in Batavia (now known as Jakarta) through the establishment of Borneo Company in 1859. In May 1863 The Chartered Bank commenced its branch operations independently. Standard Chartered Bank is the first British foreign exchange bank that opened business entity in Netherlands Indies.

The branch office in Jakarta was closed during the coup d'état attempt in 1965, but re-opened in 1968. Standard Chartered Bank Indonesia was established by virtue of Decree of Finance Minister No.D.15.6.1.6.15 dated 1 October 1968 and Decree of the Board of Directors of BNI (Central Bank - Bank Nasional Indonesia) No. 4/22/KEP.DIR dated 2 October 1968, to conduct foreign exchange and commercial banking activities. Presently, Standard Chartered Bank operates in Indonesia as a commercial bank.

Standard Chartered Bank believes that strong Corporate Governance is essential for delivering sustainable shareholder value and become one of the key pillars to support global Standard Chartered Bank business all over the world, including Indonesia.

#### Latar Belakang

Di Indonesia, secara historis Standard Chartered Bank memulai usahanya melalui *Borneo Company* sejak tahun 1859 di Batavia (sekarang disebut Jakarta). Pada bulan Mei 1863 *The Chartered Bank* membuka cabangnya secara independen. Standard Chartered Bank adalah bank devisa Inggris pertama yang membuka badan usahanya di Hindia Belanda.

Kantor di Jakarta ini kemudian ditutup pada masa percobaan kudeta di tahun 1965, namun dibuka kembali pada tahun 1968. Standard Chartered Bank Indonesia mendapat izin usaha berdasarkan surat dari Menteri Keuangan No. D.15.6.1.6.15 tanggal 1 Oktober 1968 dan SK Direksi BNI (Bank Sentral – Bank Negara Indonesia) No. 4/22/KEP.DIR tanggal 2 Oktober 1968, untuk melakukan kegiatan devisa dan aktivitas perbankan. Saat ini, Standard Chartered Bank beroperasi di Indonesia sebagai bank umum.

Standard Chartered Bank meyakini bahwa tata kelola perusahaan yang kuat sangat penting untuk menyokong *shareholder value* dan menjadi salah satu pilar utama untuk bisnis Standard Chartered Bank di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

## Ownership

Standard Chartered Bank Indonesia (herein after as "the Bank"), is a branch of Standard Chartered Bank domiciled in London and fully owned (100%) by Standard Chartered Holdings Limited, U.K.

## Kepemilikan

Standard Chartered Bank Indonsia (selanjutnya disebut dengan "Bank"), adalah cabang Standard Chartered Bank yang berkedudukan di London dan dimiliki sepenuhnya (100%) oleh Standard Chartered Holdings Limited, Inggris.

## Mission

Standard Chartered Bank (called as "SCB") has commitment to exist and to deliver sustained superior performance in Indonesia. At this moment, Standard Chartered Bank Indonesia (called as "SCB Indonesia" or "Bank") performance is in line with SCB mission to become *The World's Best International Bank, with main mission Leading the way in Asia, Africa and the Middle East.*

In Indonesia, SCB has also specific mission to become the leading international bank with many achievements, as reflected by the stakeholders, and to be considered as:

- Chosen bank for the customers and employees
- Bank that offers value-added products, qualified banking service, and distribute national-wide benefit
- Bank that has social responsibility and delivers real action for the society
- Bank with corporate governance international standard
- Bank that operates with 'values'

SCB has brand promise known as *Here for Good*, describing Standard Chartered in the past, present, and future. The brand promise is our commitment:

- **Here for the long run**  
Leading the way in Asia, Africa, and the Middle East
- **Here for progress**  
Do the right thing and set the highest standards for our partners and ourselves
- **Here for people**  
Sincerely commit for long standing relationship with the business and society

## Misi

Standard Chartered Bank (selanjutnya disebut "SCB") selalu berkomitmen untuk meningkatkan eksistensi dan mengembangkan usaha di Indonesia. Saat ini kinerja Standard Chartered Bank Indonesia (selanjutnya disebut "SCB Indonesia" atau "Bank") sejalan dengan misi SCB untuk menjadi *The world's best international bank, with main mission leading the way in Asia, Afrika and the Middle East.*

Di Indonesia, SCB juga memiliki misi spesifik, yaitu menjadi Bank Internasional Terdepan yang berprestasi pada berbagai bidang, sebagaimana direfleksikan oleh para stakeholders, dan dipandang sebagai:

- Bank pilihan bagi segenap nasabah dan segenap karyawan
- Bank yang menawarkan produk dengan nilai tambah, jasa perbankan berkualitas dan keberadaannya secara nasional telah membawa manfaat
- Bank yang dihormati dalam tanggung jawab sosial dan mampu berkontribusi dengan menghasilkan perbedaan nyata
- Bank dengan standar corporate governance internasional
- Bank yang memiliki dan menjalankan operasinya sesuai dengan nilai-nilai utama

SCB memiliki *brand promise* yang dikenal dengan *Here for Good* yang menggambarkan bagaimana Standard Chartered di masa lampau, masa kini, dan di masa yang akan datang. *Brand promise* tersebut merupakan komitmen kami:

- **Here for the long run**  
Menjadi yang terdepan di Asia, Afrika dan Timur Tengah
- **Here for progress**  
Melakukan hal yang benar dan menjaga standar tata kelakuan yang tinggi
- **Here for people**  
Secara tulus berkomitmen untuk membina hubungan jangka panjang dengan masyarakat dan bisnis

Vision and mission of the Bank could be achieved with thru core values believed by all SCB employee, which are :

#### **Courageous**

We stand up for what we believe to be right. We accept accountability and take calculated risks.

#### **Responsive**

We listen to our customers and colleagues and build strong relationships based on mutual respect. We work quickly, thoughtfully and effectively to deliver the best solution.

#### **International**

We value our diversity. We share standards and best practice. We work together, as one team across the Bank, for the benefit of our customers.

#### **Creative**

We are innovative and imaginative in working with opportunities and challenges. We continuously improve the way we work, making it simpler, better and faster.

#### **Trustworthy**

We do what is best for the Bank and our customers. We deliver on our promises and work to high standards. We are reliable, open and honest.

To implement these values, SCB has the following approaches:

#### **Participation**

Focusing on attractive, growing markets where we can leverage our customer relationships and expertise.

#### **Competitive Positioning**

Combining global capability, deep local knowledge and creativity to outperform our competitors.

#### **Management Discipline**

Continuously improving the way we work, balancing the pursuit of growth with firm control of costs and risks.

The mission and vision owned by SCB are in line with our commitment as a bank to the stakeholders, which

Visi dan misi ini diharapkan dapat dicapai dengan nilai-nilai yang wajib diyakini oleh seluruh karyawan SCB, yaitu:

#### **Berani**

Kita membela apa yang kita percaya sebagai kebenaran. Kita siap bertanggung jawab dan menerima risiko yang telah diperhitungkan.

#### **Responsif**

Kita mendengarkan nasabah dan rekan kerja serta membangun hubungan yang erat berdasarkan prinsip saling menghormati. Kita bekerja dengan cepat, cermat dan efektif untuk menghasilkan solusi terbaik.

#### **Internasional**

Kita menghormati perbedaan. Kita saling berbagi dalam patokan standar dan kebiasaan yang terbaik. Kita bekerja secara bersama-sama, sebagai satu tim di dalam Bank, untuk kepentingan nasabah.

#### **Kreatif**

Kita harus inovatif dan imajinatif dalam bekerja dengan segala kesempatan dan tantangan. Kita senantiasa meningkatkan cara kita bekerja, menyederhanakan, memperbaiki dan mempercepatnya.

#### **Dipercaya**

Kita melakukan apa yang terbaik untuk Bank dan nasabah. Kita melaksanakan setiap janji kita dan bekerja dengan standar yang tinggi. Kita dapat dipercaya, terbuka dan jujur.

Dalam menerapkan nilai-nilai tersebut, SCB memiliki pendekatan sebagai berikut:

#### **Partisipasi**

Fokus pada pasar yang atraktif dan berkembang untuk meningkatkan jaringan dan keahlian.

#### **Pemosisian Kompetitif**

Memadukan kemampuan global dengan pengetahuan lokal yang mendalam serta kreatifitas untuk mengungguli pesaing.

#### **Disiplin Pengelolaan**

Senantiasa meningkatkan cara kerja secara berkesinambungan, tetap bertumbuh dengan pengendalian risiko dan pengeluaran yang baik

Misi dan visi yang dimiliki SCB adalah sejalan dengan komitmen SCB sebagai bank kepada para

are:

#### **Customers**

Passionate about our customers' success, delighting them with the quality of our service.

#### **Our People**

Helping our people to grow, enabling individuals to make a difference and teams to win.

#### **Communities**

Trusted and caring, dedicated to making a extraordinary thing for the community where SCB operates.

#### **Investors**

A distinctive investment delivering outstanding performance and superior returns.

#### **Regulators**

Exemplary governance and ethics wherever we are.

stakeholders-nya, yaitu:

#### **Nasabah**

Menaruh perhatian pada keberhasilan nasabah, memuaskan mereka dengan pelayanan yang berkualitas.

#### **Karyawan**

Membantu karyawan untuk berkembang, mengembangkan kemampuan individu serta tim untuk mencapai keberhasilan bersama.

#### **Komunitas**

Dapat dipercaya dan peduli untuk melakukan hal yang luar biasa bagi komunitas sekitar dimana SCB beroperasi.

#### **Investor**

Melakukan investasi yang sungguh-sungguh berbeda untuk memberikan pengembalian yang tinggi dan kinerja yang luar biasa.

#### **Regulator**

Memberikan panutan dalam menjalankan tata kelola dan senantiasa bertindak dengan etika dimanapun berada.

## Member of Country Management Group (CMT)

### Shee Tse Koon, Chief Executive Officer (CEO)



Shee Tse Koon is Chief Executive Officer of Standard Chartered Bank Indonesia. He was appointed to his current position based on OJK approval No. SR-62/D.03/2014 dated 12 May 2014. In this role, he manages a business with 3,000 people in 26 branches across 7 cities. Prior to this, he spent four years in Dubai, where he was Head of Governance, West, supporting 49 countries across Europe, Middle East, Africa and Americas.

During his stint in Dubai, Tse Koon was also the Senior Executive Officer (SEO) of SCB's branch in the Dubai International Financial Centre (DIFC). As SEO, he was directly responsible for the operations and governance of SCB's DIFC Branch.

Tse Koon has also served as Non Executive Director on the Boards of Standard Chartered Bank Zimbabwe Limited and Standard Chartered Capital Saudi Arabia

## Anggota-anggota Management Committee (CMT)

Shee Tse Koon adalah Chief Executive Officer dari Standard Chartered Bank, Indonesia. Beliau diangkat untuk posisinya saat ini berdasarkan Surat Persetujuan dari OJK No. SR-62/D.03/2014 tanggal 12 Mei 2014. Dalam perannya sebagai CEO, beliau mengatur bisnis dengan 3000 karyawan di 26 cabang di 7 kota. Sebelumnya, beliau menghabiskan 4 tahun di Dubai sebagai Head of Governance, West, yang mendukung 49 negara diseluruh Eropa, Timur Tengah, Afrika dan Amerika.

Selama bertugas di Dubai, Tse Koon juga merupakan Senior Executive Officer (SEO) dari kantor cabang SCB di Dubai International Financial Centre (DIFC). Sebagai SEO, beliau bertanggung jawab langsung terhadap operasi dan tata kelola kantor cabang SCB DIFC.

Tse Koon juga bertindak sebagai Non Executive Director dari Dewan Direksi untuk Standard Chartered Bank Zimbabwe Limited dan Standard Chartered

Capital Saudi Arabia.

Graduated from National University of Singapore in Economics and Philosophy, Tse Koon has spent most of his career with SCB and has assumed a wide range of roles across Corporate Banking Sales and Operations. From 2005 to 2010 he was Chief Information Officer in Singapore, overseeing more than 500 staff across technology and operations and he was instrumental in the establishment of the Bank's Global Shared Service Centres in India and Malaysia.

Lulus dari National University of Singapore di bidang Ekonomi dan Filosofi, Bp. Tse Koon telah menghabiskan sebagian besar karirnya dengan SCB dan telah memegang berbagai tugas dan tanggung jawab yang besar di bidang Corporate Banking Sales dan Operation. Dari tahun 2005 hingga 2010, beliau adalah Chief Information Officer di Singapore, yang mengawasi lebih dari 500 staff diseluruh bagian teknologi dan operasi serta berperan penting dalam pembentukan Global Shared Service Centre di India dan Malaysia.

### **Chesna F. Anwar – Director of Compliance**



Chesna F. Anwar joined Standard Chartered Bank Indonesia as Director of Compliance in 2010. Prior to joining Standard Chartered Bank Indonesia, Chesna was the Director of Internal Affairs of Corruption Eradication Commission (KPK) and Compliance Director of Citibank N.A Indonesia. Her career in banking industry now spans over 20 years in banking industry engaged in Banking Operations, Securities Services and Compliance and Assurance.

Graduated from Maryland University, USA majoring in Economy, Chesna is also an active member at Compliance Director Forum (FKDKP) and Foreign Banks Association (FBAI).

Chesna F. Anwar was appointed as Director of Compliance pursuant to BI approval No. 12/93/GBI/DPIP/Rahasia dated 19 July 2010.

### **Suryantoro Waluyo, Country Head of Human Resources**



Suryantoro Waluyo joined Standard Chartered Bank Indonesia in October 2006, and officially appointed as the Country Head of Human Resources in April 2013.

Suryantoro started his career in PT Semen Cibinong in 1996 and worked for 5 years. He then moved to various companies and held roles as human resources consultant and practitioner in Arthur Andersen, PT Siemens Indonesia, and PT Nestle Indonesia.

He graduated with a Bachelor degree in Law (commercial law) from University of Gajah Mada, Yogyakarta, Indonesia in 1992 and Master of Public Management from Carnegie Mellon University, Pennsylvania, USA in 1995.

He succeeded Adriani Sukmoro, Country Head of Human Resources as stated in Bank Indonesia approval letter No. 15/69/GBI/DPIP/Rahasia dated 4 April 2013.

Chesna F. Anwar bergabung dengan Standard Chartered Bank Indonesia sebagai Direktur Kepatuhan di tahun 2010. Sebelum bergabung dengan Standard Chartered Bank Indonesia, beliau menjabat sebagai Direktur Pengawas Internal di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan sebagai Direktur Kepatuhan Citibank N.A. Indonesia. Karir Chesna di bidang industri perbankan lebih dari 20 tahun terutama dibidang *Operations, Securities Services* dan *Compliance and Assurance* di Citibank N.A. Indonesia.

Lulus dari Maryland University, USA dibidang Ekonomi, Chesna juga berperan aktif sebagai anggota Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan (FKDKP) dan Perhimpunan Bank Internasional (PERBINA).

Chesna F. Anwar diangkat sebagai Direktur Kepatuhan berdasarkan Surat Persetujuan BI No. 12/93/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 19 Juli 2010.

Suryantoro bergabung dengan Standard Chartered Bank Indonesia pada bulan Oktober 2006 dan diangkat secara resmi sebagai Country Head of Human Resources di bulan April 2013.

Suryantoro memulai karirnya di PT Semen Cibinong pada tahun 1996 dan bekerja selama 5 tahun. Beliau kemudian pindah ke beberapa perusahaan dan menjabat posisi-posisi sebagai Praktisi dan Konsultan Sumber Daya Manusia di Arthur Andersen, PT. Siemens Indonesia dan PT. Nestle Indonesia.

Beliau mendapatkan gelar kesarjanaan di bidang Hukum Komersial dari Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, Indonesia pada tahun 1992 dan Sarjana Strata 2 Master of Public Management dari Carnegie Mellon University, Pennsylvania, Amerika Serikat di tahun 1995.

Beliau menggantikan Adriani Sukmoro, Country Head of Human Resources sebagaimana tercantum dalam surat persetujuan Bank Indonesia No.

15/69/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 4 April 2013.

### **Darina Yusof, Country Chief Risk Officer**



Darina Yusof was appointed as Country Chief Risk Officer responsible for the implementation of risk management in the Bank in Indonesia.

Darina Yusof joined Standard Chartered Bank in 2015 and immediately appointed to be Country Risk Officer for Indonesia. Prior to joining Standard Chartered Bank, Darina was a Director of Large Corporates of HSBC Malaysia and has been working in banking industry for more than 10 years.

Darina, who bring herself an expertise in risk management and corporate banking, obtained her Bachelor degree in University of Oxford for Philosophy, Politics and Economic.

She was appointed as Country Chief Risk Officer for Indonesia following approval stated in Otoritas Jasa Keuangan letter no. SR-80/D.03/2015 dated 12 May 2015.

### **Lanny Hendra, Country Head of Retail Clients**



Lanny Hendra was appointed as Head of Retail Clients responsible for the strategic development and management of the Bank's Retail Clients business in Indonesia.

Lanny Hendra joined Standard Chartered Bank as General Manager Wealth Management since January 2007. Prior to joining Standard Chartered Bank, Lanny was the Segment Marketing Head of Consumer Bank in Citibank for 13 years and prior to that she was working for Commonwealth Bank in Sydney, Australia, for two years.

Lanny, who bring herself an expertise in wealth management from her 16 years of experience in banking industry, obtained her Bachelor degree in

Darina Yusof ditunjuk sebagai *Country Chief Risk Officer* dan bertanggung jawab atas pelaksanaan manajemen risiko di Indonesia.

Darina Yusof bergabung dengan Standard Chartered Bank sejak 2015 dan kemudian ditunjuk sebagai *Country Chief Risk Officer*. Sebelum bergabung dengan Standard Chartered Bank, Darina menjabat sebagai Direktur segmen perusahaan besar dari HSBC Malaysia dimana sebelumnya telah bekerja di industry perbankan lebih dari 10 tahun.

Darina yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko, memperoleh gelar Sarjana Filosofi, Politik dan Ekonomi dari Universitas Oxford.

Beliau diangkat sebagai *Country Chief Risk Officer* untuk Indonesia berdasarkan persetujuan yang tertuang dalam surat Otoritas Jasa Keuangan No. SR-80/D.03/2015 tanggal 12 Mei 2015.

Lanny Hendra ditunjuk sebagai *Head of Retail Clients* dan bertanggung jawab atas pengembangan strategi dan manajemen bisnis *Retail Clients* di Indonesia.

Lanny Hendra bergabung dengan Standard Chartered Bank sebagai *General Manager Wealth Management* sejak 2007. Sebelum bergabung dengan Standard Chartered Bank, Lanny menjabat sebagai *Segment Marketing Head of Consumer Bank* di Citibank selama 13 tahun dan sebelumnya bekerja di Commonwealth Bank di Sydney, Australia selama dua tahun

Lanny yang memiliki keahlian di bidang *Wealth Management* selama 16 tahun pengalamannya di dalam industry perbankan, memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dari Macquarie University di Sydney,

Accounting from Macquarie University in Sydney, Australia.

She was appointed as Head of Retail Clients for Indonesia following approval stated in Bank Indonesia letter no. 15/132/GBI/DPIP/Rahasia dated 19 December 2013.



**Kumarapuram Venkateswaran  
Subramanian, Head of Global  
Markets (GM)**

K.V. Subramanian joined Standard Chartered Bank in 1996 as Senior Manager Fixed Income Sales in India. He has over 11 years of experience in various positions in Sales and Trading for various products in Financial Markets in India, and South Asia Region prior to joining Standard Chartered Bank Indonesia.

K.V. Subramanian graduated from Bharathiar University in India for his Bachelor Degree in Mechanical Engineering and University of Bombay for his Master degree in Management Studies

He succeeded Rahil Taneja – Head of Financial Market as Head of Global Markets pursuant to Bank Indonesia approval as stated on Bank Indonesia letter No. 13/131/GBI/DPIP/Rahasia dated 6 December 2011.



**Sarabjit Singh Bhutani, Head  
of Origination Client Coverage**

Sarabjit Singh Bhutani made his first career at Ernst and Young, New York where he served as the Corporate Tax Manager.

Then he joined Bank of Montreal, in Chicago and New York as an Associate and later joined The Lehman Brothers in New York and Hongkong which has brought him to the high profile position as the Managing Director, Private Equity Group. He joined Standard Chartered Bank in 2008 in Hongkong as Managing Director, Head of Financial Sponsors, Asia prior to his placement in Standard Chartered Bank Indonesia in 2012.

Australia.

Beliau diangkat sebagai *Head of Retail Clients* untuk Indonesia berdasarkan persetujuan yang tertuang dalam surat Bank Indonesia No. 15/132/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 19 Desember 2013.

K.V. Subramanian bergabung dengan Standard Chartered Bank pada tahun 1996 sebagai *Senior Manager Fixed Income Sales* di India. Beliau berpengalaman selama 11 tahun di berbagai posisi di bidang *Sales and Trading* untuk berbagai produk *Financial Markets* di India dan wilayah Asia Selatan sebelum bergabung dengan Standard Chartered Bank Indonesia.

K.V. Subramanian lulus dari *Bharathiar University* di India untuk gelar sarjana Strata 1 di bidang *Mechanical Engineering* dan *University of Bombay* untuk gelar sarjana Strata 2 di bidang *Business Management and Administration*.

Beliau menggantikan Rahil Taneja – *Head of Financial Market* sebagai *Head of Global Market* berdasarkan persetujuan Bank Indonesia sebagaimana tercantum pada surat Bank Indonesia No. 13/131/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 6 Desember 2011.

Sarabjit Singh Bhutani mengawali karir pertamanya di Ernst and Young, New York dimana beliau menjabat sebagai *Corporate Tax Manager*. Kemudian beliau bergabung dengan Bank of Montreal di Chicago dan New York sebagai *Associate* dan selanjutnya di Lehman Brother New York dan Hong Kong dimana hal tersebut telah membawanya pada posisi penting sebagai *Managing Director, Private Equity Group*. Beliau bergabung dengan Standard Chartered Bank di tahun 2008 sebagai *Managing Director, Head of Financial Sponsors, Asia* sebelum penempatannya di Standard Chartered Bank Indonesia di tahun 2012.

Sarabjit Singh Bhutani held his master degree in Business Administration from California University on 1995 and obtained the Certified Public Accountant from the University of the State of New York.

He is effective as Head of Origination and Client Coverage in Indonesia pursuant to Bank Indonesia approval as stated on Bank Indonesia letter No. 15/53GBI/DPIP/Rahasia dated 15 March 2013.

Sarabjit Singh Bhutani meraih gelar Masternya di bidang Bisnis Administrasi dari California University pada tahun 1995 dan memperoleh Sertifikasi Akuntan Publik dari University of the State of New York.

Beliau efektif menjadi *Head of Origination and Client Coverage* di Indonesia berdasarkan persetujuan Bank Indonesia sebagaimana tercantum pada surat Bank Indonesia No. 15/53/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 15 Maret 2013.

#### **Lea Setianti Kusumawijaya, Chief Financial Officer**



Lea Setianti Kusumawijaya started her career with Standard Chartered Bank Indonesia in 2008 as Head of Originations & Client Coverage Business Finance and later as Chief Financial Officer of SCB Philippines prior to rejoining Standard Chartered Bank Indonesia in 2014. She has over 20 years of experience in various positions in financial and management position. Her previous employers include PT. Bank Lippo Tbk, PricewaterhouseCoopers Indonesia and KPMG Indonesia.

She obtained her Master Degree in International Banking and Finance in 2001 from University Birmingham, United Kingdom.

Lea Setianti Kusumawijaya was appointed as Chief Financial Officer Standard Chartered Bank Indonesia in July 2014 pursuant to Indonesia FSA ("OJK") approval as stated on OJK letter No. SR-121/D.03/2014 dated 24 Juli 2014.

Lea Setianti Kusumawijaya mulai karirnya di Standard Chartered Bank Indonesia pada tahun 2008 sebagai *Head of Originations & Client Coverage Business Finance* dan selanjutnya sebagai *Chief Financial Officer SCB Filipina* sebelum bergabung kembali dengan Standard Chartered Bank Indonesia di tahun 2014. Beliau memiliki pengalaman selama lebih dari 20 tahun diberbagai posisi dibidang Keuangan dan Manajemen. Perusahaan sebelumnya dimana beliau pernah bekerja termasuk PT.Bank Lippo Tbk, PricewaterhouseCoopers Indonesia dan KPMG Indonesia.

Beliau lulus dengan gelar *Master di bidang Perbankan dan Keuangan Internasional* di tahun 2001 dari *University of Birmingham, United Kingdom*.

Lea Setianti Kusumawijaya ditunjuk sebagai *Chief Financial Officer* Standard Chartered Bank Indonesia pada bulan Juli 2014 berdasarkan Keputusan Otoritas Jasa Keuangan No. SR-121/D.03/2014 tertanggal 24 Juli 2014.

## Business Strategy

Standard Chartered Bank is constantly committed to increase the existence and the development of business in Indonesia. With better economy situation, it is expected to achieve better improvement in the future.

Presently the Standard Chartered Bank Indonesia's business performance is in line with Standard Chartered Bank mission to become the World's Leading International Bank focusing in Asia, Africa and the Middle East. In Indonesia, Standard Chartered Bank also have a specific mission being the Leading International Bank, with performance in various sectors as reflected by the stakeholders.

The Bank's business strategy is as follow:

- Maintain a strong capital position to support business growth and compliance to regulatory requirement.
- Maintain a sustainable performance in the long run.
- To be the core bank to the clients, deepening and broadening relationship in the key market.
- Continue to attract, engage and retain superior talent in the context of intensified competition.
- Further build diverse leadership capability through accelerated development and promotion of employee's talent.
- Continue to ensure the compensation structures reward sustainable performance.

## Retail Banking

Retail Banking ("RB") is our client-segment focused approach, so we can address clients' needs from a life-cycle approach. We are a universal bank, serving the Personal, Priority and Business Clients segments. With a comprehensive suite of products, services, distribution channels and systems, we provide clients with simple, convenient banking services.

.

## Strategi Bisnis

Standard Chartered Bank selalu berkomitmen untuk meningkatkan eksistensi dan mengembangkan usaha di Indonesia. Dengan semakin membaiknya kondisi perekonomian di Indonesia, hal ini diharapkan dapat lebih berkembang di masa yang akan datang.

Saat ini kinerja Standard Chartered Bank Indonesia sejalan dengan misi Standard Chartered Bank untuk menjadi bank internasional terdepan (*the Leading International Bank*) di dunia, dan unggul di kawasan Asia, Afrika, dan Timur Tengah. Di Indonesia, Standard Chartered Bank juga memiliki misi spesifik yaitu menjadi Bank Internasional Terdepan yang berprestasi pada berbagai bidang, sebagaimana direfleksikan oleh para stakeholders.

Strategi pengembangan bisnis Bank adalah sebagai berikut:

1. Senantiasa memiliki permodalan yang kuat untuk mendukung pertumbuhan bisnis dan kepatuhan pada peraturan yang berlaku.
2. Menjaga kinerja yang stabil pada jangka panjang.
3. Menjadi bank utama bagi nasabah-nasabah dengan memperdalam dan memperluas hubungan dengan nasabah pada pasar yang utama.
4. Senantiasa menarik perhatian, melibatkan dan mempertahankan talenta-talenta yang baik dalam konteks persaingan yang sangat intensif saat ini.
5. Terus membangun kapasitas kepemimpinan yang beragam melalui pengembangan talenta karyawan yang cepat dan promosi karyawan.
6. Memastikan agar struktur kompensasi yang ada memberikan penghargaan bagi mereka yang memiliki kinerja baik yang stabil.

## Retail Bakning

Retail Banking ("RB") adalah pendekatan kami yang berfokus kepada segmen nasabah, supaya kami dapat melayani kebutuhan nasabah melalui pendekatan siklus hidup (*life-cycle*). Kami adalah bank universal, yang melayani segment nasabah Personal, Priority dan Business Clients. Dengan penawaran produk, layanan dan kanal distribusi yang komprehensif, kami menyediakan layanan yang mudah dan nyaman bagi nasabah.

### **Personal and Preferred Banking**

We provide a wide range of banking products and services including deposits and savings accounts, personal loans, mortgages, credit cards, Automated Teller Machine (ATM) and online banking transactional capabilities to serve the diverse and varied needs of our customers.

### **Commercial Banking**

Commercial Banking serves company clients from Medium Enterprises to Local Corporates. We provide banking solutions to clients with minimum annual sales turnover of USD 10 million, especially those who aspire to have international operations or trading. We are committed to be the best international banking partner for our clients and their subsidiaries and counterparties across our network.

We support our clients' businesses by providing high-quality range of banking solutions in Transaction Banking, Financial Markets and Corporate Finance. Through the maximizing of the bank's ecosystem and network, our strategy is to serve our clients' business supply chain, facilitate international market aspirations and ultimately assist in improving Indonesian export figures.

### **Corporate Institutional Banking**

CIB is committed to building on its strengths enabling it to be the 'World's Best Networked Bank' for Asia, Africa and the Middle East supporting clients' cross border transactional and investment needs as well as serving as a Trusted Advisor for our clients across their commercial banking and strategic needs.

To deliver on our strategy, we have two client segments, Financial Institutions and International Corporates and three products, which are run globally to drive consistent standards across all segments, including Retail Banking and Commercial & Private Banking, these products are Corporate Finance, Financial Markets and Transaction Banking. As a global business, CIB operates in each of the Bank's regions to use the power of our network to deliver a superb client experience.

### **Personal dan Preferred Banking**

Kami menyediakan berbagai macam produk dan jasa termasuk deposito dan tabungan, kredit tanpa agunan, kredit kepemilikan rumah, kartu kredit, Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan berbagai kemampuan transaksi *online banking* untuk melayani kebutuhan yang beragam dan bervariasi dari nasabah kami.

### **Commercial Banking**

Commercial Banking melayani nasabah perusahaan Medium Enterprises dan Korporasi Lokal. Kami menyediakan solusi perbankan kepada nasabah dengan penjualan minimum USD 10 juta, khususnya mereka yang memiliki aspirasi untuk memiliki operasi atau trading internasional. Kami berketetapan untuk menjadi rekan perbankan internasional yang terbaik untuk nasabah kami berserta anak-anak perusahaan dan rekanannya di seluruh jejaring kerja kami.

Kami mendukung kegiatan usaha nasabah kami dengan menyediakan sejumlah solusi perbankan yang berkualitas di *Transaction Banking*, *Financial Markets* dan *Corporate Finance*. Melalui pemaksimalan ekosistem dan jejaring kerja bank, strategi kami adalah untuk melayani mata-rantai bisnis konsumen yang dimiliki oleh nasabah kami, memfasilitasi aspirasi pasar internasional dan membantu meningkatkan angka ekspor Indonesia.

### **Corporate Institutional Banking**

CIB berketetapan untuk membangun kekuatannya untuk menjadi 'Bank Berjejaring Terbaik Di Dunia' di Asia, Afrika, dan Timur Tengah mendukung nasabah melakukan transaksi lintas batas and kebutuhan Investasi dan juga sebagai Penasehat Terpercaya bagi nasabah kami dalam perbankan komersial dan kebutuhan strategis.

Untuk melaksanakan strategi kami, kami memiliki dua segmen nasabah, *Financial Institutions* dan *International Corporates* dan tiga produk yang dilakukan di seluruh dunia agar terdapat standar yang konsisten di seluruh segmen, termasuk *Retail Banking* dan *Commercial & Private Banking*, dimana produk-produk ini adalah *Corporate Finance*, *Financial Markets* dan *Transaction Banking*. Sebagai bisnis global, CIB beroperasi di setiap wilayah dimana Bank berada untuk menggunakan kekuatan jejaring kami untuk menyediakan pengalaman nasabah yang luar hebat.

## Human Resource

Human Resources Division carries on efforts to continuously improve employee productivity through enhancement skill and competence program for all employees.

In addition to training to improve employees' competence, the following are key areas for development throughout the year:

- ▶ Training and job rotation, as well as opportunities for potential employees to increase their knowledge.
- ▶ To use the instrument known as "strength finders" in order to understand the strength of staff and consequently provide development training programmes related to staff's capability and type of work.
- ▶ Preserve the Bank's specific culture as great place to work by supporting all employees to develop and improve their capabilities by implementing the Individual Learning Development Plan (ILDP).
- ▶ Create balance between hard work and self actualization in the society, religious activity or other matters of personal in nature, known as the Diversity & Inclusion programme.
- ▶ Improve effectiveness and efficiency process.
- ▶ Trust the Management to directly manage their human resources through peoplesoft system. The employees are obliged to up date their own personal details themselves through the system.
- ▶ Mandatory e-learning for new joiners including Money Laundering Prevention, Reputation Risk, Operational Risk, Code of Conduct, Health & Safety, SAFE-R, Living with HIV, Basel II and risk management certification held by LSPP.

In addition, Standard Chartered Bank Indonesia through its human resources division had also improved quality relationship with Labour Union and already strived for improvement in facilities for employees who are members of the Labour Union.

## Sumber Daya Manusia

Divisi Sumber Daya Manusia melanjutkan upaya untuk terus-menerus meningkatkan produktivitas karyawan melalui program-program peningkatkan keahlian dan kecakapan bagi seluruh karyawan.

Di samping pelatihan untuk meningkatkan kecakapan karyawan, area yang menjadi perhatian utama Standard Chartered Bank Indonesia sepanjang tahun adalah:

- ▶ Pelatihan dan rotasi kerja, serta membuka kesempatan bagi karyawan yang potensial untuk meningkatkan kemampuan mereka.
- ▶ Mempergunakan instrument "strength finders" untuk mengetahui keunggulan karakter karyawan dan pada saat yang bersamaan memberikan program pelatihan yang berkaitan dengan kapasitas dan jenis pekerjaan mereka.
- ▶ Mempertahankan kultur budaya khas bank sebagai tempat yang baik untuk bekerja dengan mendukung pengembangan karyawan dan memperbaiki kapabilitas kemampuan mereka dengan melaksanakan program *Individual Learning Development Plan (ILDP)*.
- ▶ Menciptakan keseimbangan antara 'pekerjaan' dengan aktualisasi diri dalam bidang sosial, kegiatan keagamaan ataupun hal-hal lain yang bersifat keragaman dan keterlibatan (*Diversity and Inclusion programme*)
- ▶ Meningkatkan efektifitas dan efisiensi proses.
- ▶ Memberi kepercayaan kepada Manajemen untuk mengelola SDM secara langsung melalui *Peoplesoft system*. Karyawan wajib melakukan pengkinian data secara langsung melalui sistem.
- ▶ Kewajiban training melalui media elektronik untuk karyawan baru, meliputi *Money Laundering Prevention, Reputation Risk, Operational Risk, Code of Conduct, Health & Safety, SAFE-R, Living with HIV & Basel II* serta sertifikasi manajemen risiko yang diadakan oleh LSPP.

Selain hal-hal di atas, Standard Chartered Bank Indonesia melalui Divisi SDM juga telah meningkatkan kualitas hubungan dengan Serikat Pekerja dan bersama-sama telah mengupayakan perbaikan fasilitas terhadap karyawan yang merupakan anggota Serikat Pekerja.

By end of 2015 there are 2,194 employees at Standard Chartered Bank Indonesia Branch, which comprises of 1,728 permanent and 466 non permanent.

Level of Education	Permanent	Non Permanen	Total
S2	216	2	218
S1	1,286	221	1,507
D3	129	223	352
SLTA	93	15	108

Out of 1,728 permanent staffs, 27 hold influential positions and have been appointed as executive officers.

The list of executive officers and respective position available in the appendix.

### Employee Remuneration

Human Resources Division with respective Business Heads is responsible to establish standard policy on remuneration and benefit in accordance to local market.

Standard Chartered Bank uses in-depth philosophy to determine the remuneration value by using the *median rate* of total compensation or total payment applicable within the market for certain positions. Standard Chartered Bank also uses data from professional sources to provide a competitive annual salary payment compared to the average main industries. Standard Chartered Bank believes the importance of performance based compensation, therefore the bonus provision constitutes as the basis in encouraging banking culture performance.

### People Forum

Standard Chartered Bank Indonesia conducts "People Forum" meeting in each department and top management. This forum is held to discuss the succession plan including expatriate succession plan, also to analyze good performance Staffs and setting up development plan. This forum is important to ensure retaining staffs with good performance and determining succession planning for every critical position in Standard Chartered Bank.

Pada akhir tahun 2015 terdapat 2.194 pegawai di Standard Chartered Kantor Cabang Indonesia dimana terdiri dari 1.728 pegawai permanen dan 466 non permanen.

Level of Education	Permanent	Non Permanen	Total
S2	216	2	218
S1	1,286	221	1,507
D3	129	223	352
SLTA	93	15	108

Out of 1.728 pegawai permanen, 27 diantaranya memiliki jabatan yang dapat membuat kebijakan berpengaruh dan telah ditunjuk sebagai pejabat eksekutif.

Daftar nama dan jabatan dari pejabat eksekutif tersedia di apendiks.

### Remunerasi Karyawan

Kebijakan penetapan standar penggajian maupun benefit merupakan tanggung jawab Human Resources Division dan para Business Head terkait sesuai dengan kondisi pasar.

Standard Chartered Bank memiliki pemikiran yang mendalam untuk menentukan nilai penggajian dengan menggunakan *median rate* dari seluruh kompensasi atau total pembayaran yang berlaku di pasar untuk posisi tertentu. Data pasar dari sumber yang profesional juga digunakan untuk menentukan jumlah pembayaran gaji tahunan yang kompetitif dibandingkan dengan rata-rata dari industri utama. Standard Chartered Bank percaya akan pentingnya kompensasi berdasarkan kinerja, oleh karena itu pemberian bonus menjadi dasar dalam memacu kinerja budaya bank.

### People Forum

Standard Chartered Bank Indonesia mengadakan pertemuan *People Forum*, baik di setiap departemen maupun jajaran *top management*. Forum ini diadakan untuk membahas rencana suksesi jabatan termasuk rencana suksesi tenaga kerja asing, serta membahas karyawan-karyawan yang memiliki kinerja baik berikut rencana pengembangan masing-masing karyawan dimaksud. Forum ini sangat penting untuk memastikan agar karyawan yang berkinerja baik dapat dipertahankan dan *succession planning* untuk setiap

Through this forum, employees who are identified as HIPO (High Potential) and have a good performance will be monitored accordingly, including individual development program based on their talent profile. Standard Chartered Bank Indonesia also assigned Indonesian employee working overseas in a short term or long term period.

### **Learning & Talent Development**

Employee's personal development is one of the priorities in Human Resources Department. Standard Chartered Bank Indonesia encouraged staff to do the 70:20:10 development approach, which consists of 70% on-the-job training including providing critical experience to our HIPO, 20% learning from other, and 10% classroom training and e-learning.

Standard Chartered Bank recruits the best resources from market and believes in getting the right person to fill the suitable job offered.

Standard Chartered Bank Indonesia has developed internal training unit called Learning and Talent Development which is responsible to provide training program required by all staff to improve their career.

In 2015 we held 2,434 trainings of 521 courses. The methodology of training deliver comprise of

Classroom	1,039
Conference Call	28
E-learning	181
External training	103
Web class	1,083

posisi yang penting di Standard Chartered Bank dilakukan pada tempatnya.

Melalui forum ini, karyawan berkriteria HIPO (*High Potential*) dan berkinerja baik dipantau dengan seksama berikut rencana pengembangan individualnya berdasarkan *Talent Profile masing-masing*. Standard Chartered Bank Indonesia juga menugaskan karyawan lokal untuk bekerja di luar negeri dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

### **Learning & Talent Development**

Pengembangan karyawan adalah salah satu prioritas divisi Sumber Daya Manusia. Standard Chartered Bank mendorong karyawan untuk pengembangan dengan pendekatan 70:20:10 yang terdiri dari 70% *on-the-job training* - termasuk di antaranya memberikan pengalaman yang sangat penting kepada *HIPO* kami , 20% belajar dari karyawan lain, dan 10% training belajar di dalam kelas maupun melalui media elektronik (*e-learning*).

Standard Chartered Bank senantiasa merekrut karyawan terbaik yang ada di pasar dan yakin akan mendapatkan kandidat yang tepat untuk jenis pekerjaan yang sesuai.

Standard Chartered Bank Indonesia memiliki unit pelatihan yaitu *Learning & Talent Development* yang bertanggung jawab untuk memberikan program pelatihan yang diperlukan oleh karyawan dalam mengembangkan karir.

In 2015 kami mengadakan 2.434 kelas pelatihan dari 521 macam pelatihan. Metodologi penyampaian pelatihan terdiri dari

Dalam kelas	1.039
Sarana konferensi telepon	28
Pelatihan elektronik	181
Pelatihan eksternal	103
Web class	1.083

## EXISTENCE IN INDONESIA / EKSISTENSI DI INDONESIA

SCB Indonesia has branch office in Jakarta, 6 Auxiliary branches in Surabaya, Medan, Bandung, Semarang, Denpasar and Makassar. There are 19 cash offices, 2 trade counter and ATMs spread out in these cities.

SCB Indonesia memiliki Kantor Cabang di Jakarta, 6 Kantor Cabang Pembantu di Surabaya, Medan, Bandung, Semarang, Denpasar dan Makassar. Selain itu, SCB Indonesia juga memiliki 19 Kantor Kas, 2 Konter perdagangan dan ATM yang tersebar di kota-kota tersebut.

### BRANCH / KANTOR CABANG

Jakarta	Menara Standard Chartered, Jl. Prof. Dr. Satrio no. 164
---------	---

### AUXILIARY BRANCH / KANTOR CABANG PEMBANTU

Surabaya	Jl. Basuki Rahmat no. 63
Bandung	Jl. Ir. H. Juanda No.16
Medan	Jl. Imam Bonjol 17
Semarang	Jl. A. Yani No. 155A
Denpasar	Jl. Teuku Umar No. 2,4,8 Blok 9-12
Makassar	Jl. Jend. Sudirman no. 70

### CASH OFFICE / KANTOR KAS

Jakarta	Graha Multi, Jl. Panjang No.55, Kebon Jeruk Jakarta Barat
Jakarta	Wisma Pondok Indah III, Ground Floor, Jl. Sultan Iskandar Muda Kav V TA. Jakarta 12310
Jakarta	Jl. Raya Brt Boulevard, Blok LC6 No. 24 Kelapa Gading
Jakarta	Ruko Mal Mangga Dua Blok RM No.7, Jl. Mangga Dua Raya
Jakarta	Pluit Village MG 33, Jl. Pluit Indah Raya
Jakarta	Rukan Puri Mutiara, Blok A Kav No 97, Sunter Agung
Jakarta	APW Building, Jl Bangka No.1, Tanjung Priok
Jakarta	Jl. Gajah Mada No. 157-157A
Jakarta	Belezza Shopping Arcade, Unit G.11AB dan unit 1.11A Jl. Arteri Permata Hijau No. 34
Jakarta	Atrium Mulia GF, Jl. H.R Rasuna Said Kav. B 10-11 Suite 103
Jakarta	Rukan Grand Puri Niaga Jl. Puri Kencana Blok K6-2A, Kembangan Selatan
Jakarta	Griya Shinta, 1 <sup>st</sup> Floor, Jl. Raya Tomang No.39
Jakarta	Ruko Cordoba Blok E No. 1 Jl. Marina Raya, Bukit Golf, Pantai Indah Kapuk
Jakarta	The Boulevard, Jl. Fachrudin Raya No. 5, Tanah Abang
Tangerang	Ruko Golden Boulevard blok F1 no 7, Jl. Pahlawan Seribu BSD City
Bandung	Jl. Pasir Kaliki no. 81
Surabaya	Bukit Darmo Blvd 2 dan 2A, Pradah Kali Kendal - Dukuh Pakis
Surabaya	Jl. Manyar Kertoarjo No. 67
Cengkareng	Wisma Soewarna Park, Lt.3 Suite 3A, Lot 1&2

### TRADE COUNTER / KONTER PERDAGANGAN

Jakarta	Pulo Gadung Trade Centre Blok I No. 5 Jl. Raya Bekasi, Pulo Gadung – Jakarta Timur
Bekasi	Commercial Industrial Estate-Jababeka Ruko Metro Blvd Blok A-18 Jl.Niaga Raya Kav1-4 Cikarang Baru

## 2. Annual Financial Report / Laporan Keuangan Tahunan

in Million IDR			dalam jutaan Rupiah
Income statement	2015	2014	Laporan Laba Rugi
Net Interest income	2,475,650	2,418,706	Pendapatan Bunga Bersih
Net Operating (Loss)/income	(385,034)	946,714	(Rugi)/Laba Operasional
(Loss)/Income Before Tax	(385,494)	947,150	(Rugi)/Laba Sebelum Pajak
Net (Loss)/Income	(285,637)	620,844	(Rugi)/Laba Bersih
Statement of Financial Position	2015	2014	Laporan Posisi Keuangan
Total Assets	63,805,420	64,574,847	Total Aset
Total Loans*	27,255,166	30,386,877	Jumlah Kredit*
Total customer deposits	25,391,058	28,137,592	Jumlah Simpanan Nasabah
Head office accounts	2,742,312	3,521,316	Rekening Kantor Pusat
Total Bank Regulatory Capital	7,173,681	7,417,272	Jumlah Modal Bank

\* before allowance of impairment losses \* Sebelum Cadangan Kerugian Penurunan Modal

Financial Ratios	2015	2014	Rasio-rasio Keuangan
<b>Capital</b>			<b>Permodalan</b>
Capital Adequacy Ratio	16.06%	16.87%	Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)
<b>Productive assets</b>			<b>Aset Produktif</b>
Non Performing Productive Assets to Total Productive Assets	1.80%	1.89%	Aset produktif bermasalah terhadap terhadap total aset produktif
Impairment Provision of Financial Assets to Productive Assets	1.77%	1.93%	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan terhadap aset produktif
Non Performing Loans - Gross	4.78%	1.62%	Kredit bermasalah terhadap jumlah kredit - bruto
Non Performing Loans - Net	1.91%	1.11%	Kredit bermasalah terhadap jumlah kredit - Neto
<b>Profitability</b>			<b>Rentabilitas</b>
Return on Asset (ROA)	-0.55%	1.55%	Imbal Hasil Aset
Return on Equity (ROE)	-5.27%	8.80%	Imbal Hasil Ekuitas
Net Interest Margin (NIM)	4.47%	4.87%	Marjin Pendapatan Bunga Bersih
Operational Expense to Operational Income	101.14%	92.92%	Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)
<b>Liquidity</b>			<b>Likuiditas</b>
Loan to Deposit Ratio (LDR)	85.25%	82.99%	Rasio Kredit yang diberikan terhadap Dana Pihak Ketiga
<b>Compliance</b>			<b>Kepatuhan</b>
Breach/Excess on Legal Lending Limit	Nil	Nil	Pelanggaran / Pelampauan BMPK
Reserve Requirement - Rupiah	7.59%	8.05%	Giro Wajib Minimum - Rupiah
Reserve Requirement - Foreign Currency	8.93%	8.26%	Giro Wajib Minimum - Valuta Asing
Net Open Position	2.34%	13.43%	Posisi Devisa Neto

\* The above financial ratio is based on financial report of Standard Chartered Bank Indonesia published in Bisnis Indonesia newspaper dated 26 March 2016. / Rasio keuangan di atas berdasarkan laporan keuangan publikasi Standard Chartered Bank Indonesia di harian Bisnis Indonesia tanggal 26 Maret 2016.

## Financial Highlights

### ■ Net Interest Income

Net Interest Income in 2015 was at IDR 2,475,650 million, slightly higher compared to the previous year of IDR 2,418,706 million. The increase was contributed by lower interest expenses, in line with the Bank's strategy to reduce cost of funds by focusing customer deposits growth on CASA. Higher net interest income was also contributed by higher interest income in line with the strategy to focus the assets growth on higher yield assets.

### ■ Net (Loss)/income

The Bank recorded lower financial performance in 2015 with net loss of IDR 285,637 million compared to net income of IDR 620,844 million in 2014. Lower financial performance was contributed by continuous economy slowdown which resulted in delayed investment decisions, depressed commodity prices and volatility in the market resulted in IDR depreciation against USD. These macro economy factors have resulted in higher loan impairment in both corporate and retail segments. In addition, the Bank booked higher operational expenses driven by one-off restructuring costs and settlement of historical litigation case arisen in 2008.

The Bank already announced its new strategy to make it a strong, lean, focused and profitable bank. We are making big changes to reveal and restore the great strengths of our Bank, providing clarity on what we will and will not do. Our strategy will reposition the Bank to weather near-term uncertainties, tighten our risk tolerance, fixed legacy issues and to capture the significant value we have.

## Kinerja Keuangan

### ■ Pendapatan bunga bersih

Pendapatan bunga bersih pada tahun 2015 sebesar IDR 2.475.650 juta, sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan posisi tahun sebelumnya yaitu IDR 2.418.706 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh beban bunga yang lebih rendah sejalan dengan strategi Bank untuk mengurangi biaya pendanaan dengan memusatkan pertumbuhan dana pihak ketiga pada giro dan tabungan. Peningkatan pendapatan bunga bersih juga disebabkan oleh peningkatan pendapatan bunga sejalan dengan strategi untuk memusatkan pertumbuhan aset pada aset yang lebih menghasilkan.

### ■ (Rugi)/Laba Bersih

Bank mencatat penurunan kinerja keuangan di tahun 2015 dengan rugi bersih sebesar IDR 285.637 juta dibandingkan dengan laba bersih di tahun 2014 sebesar IDR 620.844 juta. Penurunan kinerja keuangan Bank adalah dampak dari perlambatan ekonomi yang menyebabkan penundaan atas keputusan investasi, harga komoditi yang lesu dan pasar yang mudah berubah sebagai dampak dari depresiasi mata uang Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat. Faktor ekonomi makro ini telah menyebabkan lebih besarnya penurunan nilai atas kredit yang diberikan baik di segmen *corporate* maupun *retail*. Selain itu, Bank mencatat biaya operasional yang lebih tinggi yang dipicu oleh biaya restrukturisasi dan penyelesaian kasus litigasi yang muncul dari tahun 2008.

Bank telah mengumumkan strategi baru untuk mewujudkan aspirasi menjadi bank yang lebih kuat, lebih ramping, lebih fokus, dan lebih menghasilkan. Bank telah melakukan berbagai perubahan besar namun terus mempertahankan kekuatan Bank, seraya menegaskan apa yang akan dilakukan dan tidak akan dilakukan oleh Bank. Strategi baru ini diharapkan dapat memposisikan Bank sehingga dapat menangkis kemungkinan terjadinya situasi yang penuh ketidakpastian di jangka pendek, sambil terus memperketat toleransi risiko, memperbaiki berbagai isu historis di masa lalu, serta meneruskan nilai-nilai budaya Bank yang baik.

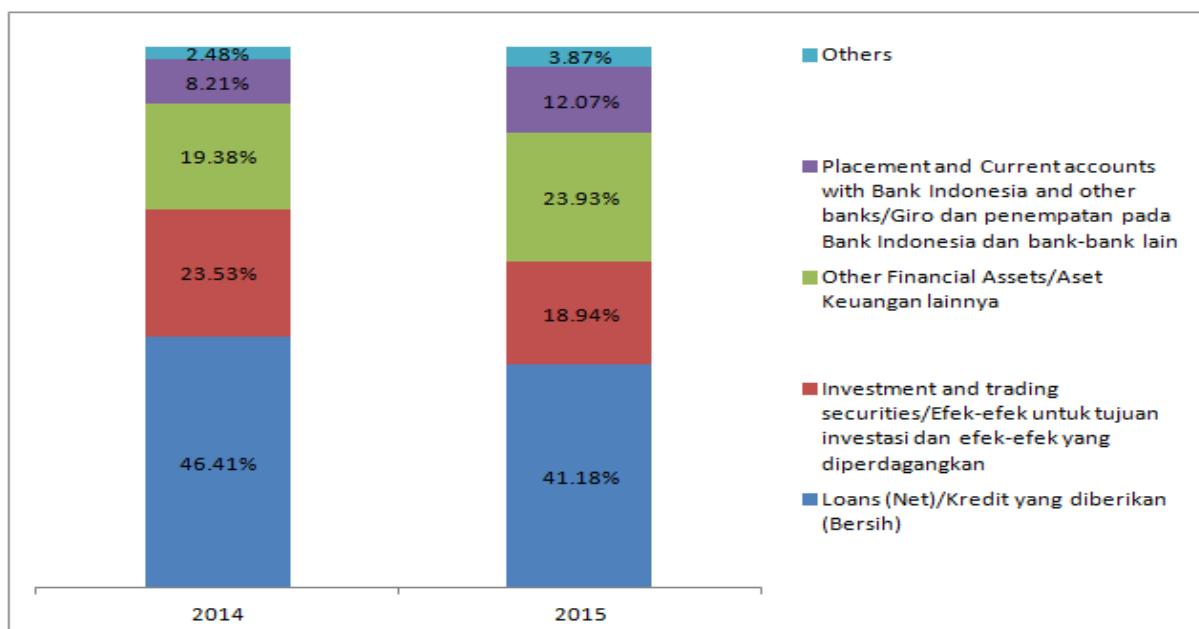
## ■ Assets

Total assets of IDR 63,805,420 million in 2015 are broadly flat compared to last year assets of IDR 64,574,847 million. Slight decrease was mainly driven by lower loans and investment securities by IDR 3,688,140 million and IDR 3,161,693 million respectively, offset by higher other financial assets including receivables under secured borrowing and derivative assets by IDR 2,114,266 million and IDR 740,728 million respectively, and higher placement and current account in Bank Indonesia and other bank by IDR 2,401,595 million. No significant movements in the asset composition compared to last year.

## ■ Aset

Aset cenderung stabil sebesar IDR 63.805.420 juta di tahun 2015 dibandingkan dengan tahun sebelumnya sekitar IDR 64.574.847 juta. Terdapat sedikit penurunan yang terutama disebabkan oleh penurunan pada kredit yang diberikan dan efek-efek untuk tujuan yang investasi masing – masing sebesar IDR 3.688.140 juta dan IDR 3.161.693 juta, diimbangi oleh peningkatan pada aset keuangan lainnya seperti tagihan atas pinjaman yang dijamin dan aset derivatif sebesar IDR 2.114.266 juta dan IDR 740.728 juta, serta penempatan dan giro pada Bank Indonesia dan bank-bank lain sebesar IDR 2.401.595 juta. Komposisi aset di tahun 2015 cenderung sama dengan tahun 2014.

**Table 1: Asset Composition/Komposisi Aset**



## ■ Loans

In 2015, total loans (gross) were reported at IDR 27,255,166 million, a decrease of 10% compared to previous year. The decrease was primarily contributed by the market downturn and credit risk optimisation of certain retail and corporate exposures, in order to improve Risk

## • Kredit yang diberikan

Di tahun 2015, total kredit yang diberikan (bruto) dilaporkan sebesar IDR 27.255.166 juta, turun sebesar 10% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan ini terutama disebabkan oleh dampak dari kondisi pasar yang lesu dan penerapan risiko kredit yang optimal terhadap portfolio *retail* dan *corporate* seiring

Weighted Assets (RWA) efficiency.

#### ■ Customer deposits

Total customer deposit decreased by 10% to IDR 25,391,058 million in 2015. Lower demand for loans as driven by slow down in the economy has been responded by lowering overall customer deposits to maintain liquidity at sound level. This was evidenced by LDR at 85.25%, well within the OJK expected range. Lower customer deposits were mainly driven by lower time deposits, which contributed to lower cost of funds, hence higher net interest income.

dengan inisiatif Bank untuk meningkatkan efisiensi Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).

#### ■ Simpanan nasabah

Simpanan oleh nasabah juga mengalami penurunan sebesar 10% menjadi IDR 25.391.058 juta di tahun 2015. Penurunan permintaan atas kredit yang disebabkan oleh perlambatan ekonomi telah direspon dengan penurunan simpanan nasabah secara keseluruhan untuk menjaga likuiditas yang sehat. Hal ini ditunjukan dengan LDR sebesar 85,25% yang masih di dalam rentang yang diharapkan oleh OJK. Penurunan simpanan oleh nasabah terutama disebabkan oleh penurunan deposito berjangka, yang menghasilkan penurunan biaya dana menuju penghasilan bunga bersih yang lebih tinggi.

#### ■ Head Office Accounts and Regulatory Capital

Head office accounts decreased by 22% to IDR 2,742,312 million in 2015, mainly due to net loss position of the Bank.

Despite of lower financial performance in 2015, the Capital Adequacy Ratio (CAR) remained strong and well above the minimum regulatory capital requirements imposed by the regulators. As at end of 2015, CAR stood at 16.06%.

#### ■ Rekening Kantor Pusat dan Jumlah modal Bank yang diwajibkan regulator

Rekening Kantor Pusat mengalami penurunan sekitar 22% menjadi IDR 2.742.312 juta di tahun 2015 disebabkan oleh posisi rugi bersih Bank.

Walaupun terdapat penurunan kinerja keuangan di tahun 2015, rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) tetap kuat dan berada jauh di atas persyaratan modal minimum yang diwajibkan oleh regulator. Pada akhir tahun 2015, KPMM bank berada pada posisi 16.06%.

For more detailed information refers to Combined Statement of Financial Position ended 31 December 2015 which have been audited by a registered Public Accountant Siddharta Widjaja & Rekan (a member of KPMG).

Untuk informasi lebih lengkap dapat dilihat pada Laporan Keuangan Gabungan tahun berakhir 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan (KPMG).

#### Productive Asset Quality

Pursuant to the prevailing regulation, the Bank had provided sufficient provision for their productive assets. As of 31 December 2015, the impairment provision on productive assets was IDR 1,044,602 million. No shortage against allowance for possible losses (PPA) to be charged to capital balance in the CAR calculation as per the prevailing regulation.

#### Kualitas Aset Produktif

Sesuai dengan Peraturan yang berlaku, Bank telah membentuk cadangan yang mencukupi atas aktiva produktif. Pada tanggal 31 Desember 2015, total CKPN yang telah dibentuk untuk seluruh aset produktif adalah IDR 1.044.602 juta dimana tidak terdapat selisih kurang dengan Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA) yang harus dibebankan terhadap komponen modal dalam perhitungan KPMM sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### Transparency Published Financial Report

In accordance to POJK No. 6/POJK.03/2015, the Bank had performed transparency by disclosed of its financial information in its quarterly publication through

#### Transparansi Publikasi Laporan Keuangan

Sesuai dengan POJK No. 6/POJK/03.2015, Bank telah melaksanakan transaparasi dengan mempublikasikan informasi keuangan secara triwulan melalui koran

publication in national newspaper and website also monthly publication of financial report through website. The full set of report is accessible through [www.sc.com/id](http://www.sc.com/id) website.

nasional dan website serta telah melakukan publikasi secara bulanan melalui website. Keseluruhan laporan dapat diakses melalui website [www.sc.com/id](http://www.sc.com/id).

#### SPOT AND DERIVATIVE TRANSACTION REPORT/LAPORAN TRANSAKSI SPOT DAN DERIVATIF

(in million IDR/dalam jutaan rupiah)

NO.	TRANSAKSI	Standard Chartered Bank Indonesia				
		Nilai Notional	Tujuan	Tagihan dan Liabilitas Derivatif		
			Trading	Hedging	Tagihan	Liabilitas
<b>A. Terkait dengan Nilai Tukar</b>						
1	Spot	1,894,498	1,894,498	-	2,080	954
2	Forward	9,842,571	9,842,571	-	183,604	34,465
3	Option	-	-	-	-	-
a.	Jual	6,914	6,914	-	-	136
b.	Beli	6,914	6,914	-	136	-
4	Future	-	-	-	-	-
5	Swap	146,309,249	145,389,573	919,676	5,077,853	5,730,879
6	Lainnya	-	-	-	-	-
<b>B. Terkait dengan Suku Bunga</b>						
1	Forward	-	-	-	-	-
2	Option	-	-	-	-	-
a.	Jual	-	-	-	-	-
b.	Beli	-	-	-	-	-
3	Future	-	-	-	-	-
4	Swap	21,421,353	21,421,353	-	76,984	52,031
5	Lainnya	-	-	-	-	-
<b>C. Lainnya</b>						
<b>J U M L A H</b>		<b>179,481,499</b>	<b>178,561,823</b>	<b>919,676</b>	<b>5,340,657</b>	<b>5,818,465</b>

## PRODUCTIVE ASSET QUALITY REPORT AND OTHER INFORMATION/ LAPORAN KUALITAS ASET PRODUKTIF DAN INFORMASI LAINNYA

(in million IDR/dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	Standard Chartered Bank											
		31 Desember 2015					31 Desember 2014						
		L	DPK	KL	D	M	Jumlah	L	DPK	KL	D	M	Jumlah
<b>I. PIHAK TERKAIT</b>													
1. Penempatan pada bank lain													
a. Rupiah	37,548	-	-	-	-	-	37,548	88,411	-	-	-	88,411	
b. Valuta asing	12,779	-	-	-	-	-	12,779	10,893	-	-	-	10,893	
2. Tagihan spot dan derivatif													
a. Rupiah	17,736	-	-	-	-	-	17,736	14,367	-	-	-	14,367	
b. Valuta asing	15,389	-	-	-	-	-	15,389	8,932	-	-	-	8,932	
3. Surat berharga													
a. Rupiah	31,796	-	-	-	-	-	31,796	53,439	-	-	-	53,439	
b. Valuta asing	1,826	-	-	-	-	-	1,826	27,013	-	-	-	27,013	
4. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali ( <i>Repo</i> )													
a. Rupiah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b. Valuta asing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali ( <i>Reverse Repo</i> )													
a. Rupiah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b. Valuta asing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6. Tagihan akseptasi													
7. Kredit													
a. Debitur Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)													
i. Rupiah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ii. Valuta asing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b. Bukan debitur UMKM													
i. Rupiah	550,419	-	-	237,197	-	-	787,616	274,509	-	-	-	274,509	
ii. Valuta asing	136,850	-	-	192,443	-	-	329,293	248,460	-	-	-	248,460	
c. Kredit yang direstrukturasi													
i. Rupiah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ii. Valuta asing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
d. Kredit properti	545,990	-	-	-	-	-	545,990	9,441	-	-	-	9,441	
8. Penyertaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9. Penyertaan modal sementara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10. Tagihan lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11. Komitmen dan kontinjensi													
a. Rupiah	543,228	-	-	-	-	-	543,228	176,940	-	-	-	176,940	
b. Valuta asing	4,563,217	-	-	-	-	-	4,563,217	1,729,898	-	-	-	1,729,898	
12. Aset yang diambil alih	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>II. PIHAK TIDAK TERKAIT</b>													
1. Penempatan pada bank lain													
a. Rupiah	22,821	-	-	-	-	-	22,821	17,099	-	-	-	17,099	
b. Valuta asing	2,334,017	-	-	-	-	-	2,334,017	601,903	-	-	-	601,903	
2. Tagihan spot dan derivatif													
a. Rupiah	178,058	-	-	-	-	-	178,058	939,544	-	-	-	939,544	
b. Valuta asing	2,127,628	35,715	-	-	-	-	2,163,343	1,932,190	547	11,438	-	1,944,175	
3. Surat berharga													
a. Rupiah	10,792,371	-	-	-	-	-	10,792,371	14,538,883	-	-	-	14,538,883	
b. Valuta asing	1,605,762	-	-	-	-	-	1,605,762	1,246,605	-	-	-	1,246,605	
4. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali ( <i>Repo</i> )													
a. Rupiah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b. Valuta asing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali ( <i>Reverse Repo</i> )													
a. Rupiah	4,214,659	-	-	-	-	-	4,214,659	2,998,362	-	-	-	2,998,362	
b. Valuta asing	2,727,618	-	-	-	-	-	2,727,618	1,829,649	-	-	-	1,829,649	
6. Tagihan Akseptasi													
7. Kredit													
a. Debitur Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)													
i. Rupiah	174,597	-	68	-	680	175,345	132,868	209	-	-	2,157	135,234	
ii. Valuta asing	360,365	-	-	-	-	360,365	305,658	-	-	-	-	305,658	
b. Bukan debitur UMKM													
i. Rupiah	11,478,026	1,138,275	327,228	79,790	18,149	13,041,468	11,680,027	1,005,805	84,605	66,243	32,557	12,869,237	
ii. Valuta asing	10,550,140	1,279,542	165,228	1,722	-	11,996,632	14,401,399	1,122,724	99,080	-	92,503	15,715,706	
c. Kredit yang direstrukturasi													
i. Rupiah	48,556	73,562	5,167	1,630	6,322	135,237	36,214	35,185	6,447	3,502	6,618	87,966	
ii. Valuta asing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
iii. Valuta asing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
d. Kredit properti	1,125,670	52,656	4,162	7,468	-	1,189,956	563,321	43,415	5,140	527	12,181	624,584	
8. Penyertaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9. Penyertaan modal sementara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10. Tagihan lainnya	95,452	-	-	-	-	6,603	102,055	146,607	-	-	734,188	880,795	
11. Komitmen dan kontinjensi													
a. Rupiah	10,840,376	175,743	47,392	7,454	99	11,071,064	13,256,073	159,731	22,082	4,991	990	13,443,867	
b. Valuta asing	47,011,023	349,743	198,486	17	-	47,559,269	47,577,097	441,375	346,780	-	-	48,365,252	
12. Aset yang diambil alih	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>III. INFORMASI LAIN</b>													
1. Total aset bank yang dijamin :													
a. Pada Bank Indonesia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b. Pada pihak lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. Total CPN aset keuangan atas aset produktif								1,044,602				1,148,264	
3. Total PPA yang wajib dibentuk atas aset produktif								892,887				1,448,278	
4. Persentase kredit kepada UMKM terhadap total kredit								2,01%				1,49%	
5. Persentase kredit kepada Usaha Mikro Kecil (UMK) terhadap total kredit								0,00%				0,00%	
6. Persentase jumlah debitur UMKM terhadap total debitur								3,38%				1,90%	
7. Persentase jumlah debitur Usaha Mikro Kecil (UMK) terhadap total debitur								0,00%				0,00%	
8. Lainnya								-				-	
a. Penerusan kredit								-				-	
b. Penyaluran dana Mudharabah Mugayyadah								-				-	
c. Aset produktif yang dihapus buku								2,281,525				1,562,332	
d. Aset produktif dihapusbuku yang dipulihkan/berhasil ditagih								-				-	
e. Aset produktif yang dihapus tagih								1,555,671				717,252	

## ALLOWANCE FOR LOSS RESERVE/CADANGAN PENYISIHAN KERUGIAN

(in million IDR/dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	31 Desember 2015				31 Desember 2014			
		CKPN		PPA wajib dibentuk		CKPN		PPA wajib dibentuk	
		Individual	Kolektif	Umum	Khusus	Individual	Kolektif	Umum	Khusus
1.	Penempatan pada bank lain	-	-	24,072	-	-	-	896	7,183
2.	Tagihan spot dan derivatif	-	-	24,976	5,357	-	-	-	28,409
3.	Surat berharga	-	796	10,883	-	-	-	436	13,985
4.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali ( <i>Repo</i> )	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali ( <i>Reverse Repo</i> )	-	-	30,236	-	-	-	-	-
6.	Tagihan akseptasi	57,897	4,444	30,217	5,150	-	-	1,905	25,674
7.	Kredit	625,889	350,383	176,222	379,859	134,436	285,681	207,015	248,902
8.	Penyertaan	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Penyertaan modal sementara	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Tagihan lainnya*	5,062	131	955	6,603	724,910	-	-	730,669
11.	Komitmen dan kontinjensi	-	-	136,032	62,325	-	-	91,083	87,873

### 3. Public Accountant's Opinion / Opini Akuntan Publik

#### Independent Auditor's Report

In the opinion of independent auditor, the Combined Financial Statements of Standard Chartered Bank Indonesia ended 31 December 2015 have been presented fairly, in all material respects, in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards.

For more complete information refers to the Independent Auditor's Report of Registered Public Accountant Siddharta & Wijaya (a member of KPMG) dated 24 Maret 2016.

#### Laporan Auditor Independen

Menurut pendapat auditor independen, Laporan Keuangan Gabungan Standard Chartered Bank Indonesia tanggal 31 Desember 2015 telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Untuk informasi lebih lengkap dapat dilihat pada Laporan Auditor Independen Kantor Akuntan Publik Siddharta & Wijaya (KPMG) tertanggal 24 Maret 2016.

### 4. Capital Disclosure, Risk Exposure Disclosure, and Risk Management Implementation / Pengungkapan Permodalan serta Pengungkapan Eksposur Risiko dan Penerapan Manajemen Risik

#### Capital Disclosure

The Bank's capital as at 31 December 2015 amounting to IDR 7,713,681 million with declared capital of IDR 7,347,871 million. The bank's CAR is in a strong position of 16.06%.

#### Pengungkapan Permodalan

Jumlah modal Bank per tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp 7,713,681 juta dengan jumlah modal yang dinyatakan sebesar Rp 7,347,871 juta. KPMM Bank berada pada posisi yang cukup kuat yaitu 16,06%.

On a regular basis, Bank undertakes capital planning and monitoring to ensure capital adequacy to support business strategies, compliance to banking regulation as well as to take into consideration macro economic development. Capital injection plan is required to be included in the Business Plan submitted to Bank Indonesia, and it is subject to Standard Chartered Group and Bank Indonesia approvals.

Secara berkala, Bank melakukan perencanaan dan pengawasan permodalan untuk memastikan kecukupan permodalan dalam rangka mendukung strategi bisnis, kepatuhan kepada peraturan perbankan serta memperhatikan perkembangan kondisi makro ekonomi. Rencana penambahan modal Bank wajib disampaikan dalam Rencana Bisnis yang disampaikan kepada Bank Indonesia, dan harus mendapatkan persetujuan dari Standard Chartered

Group maupun Bank Indonesia.

In accordance with the prevailing Bank Indonesia regulation, the Bank is required to maintain a minimum capital of 9% - 10% of Risk Weighted Assets (RWA). In order to anticipate potential losses in the Bank's risk profile, Bank Indonesia may require the Bank to maintain higher capital than the minimum capital requirement. The potential losses may derive from:

- a. Credit risk, market risk and operational risk which have not been accurately measured in the RWA calculation;
- b. Other material risks, including interest rate risk in banking book, liquidity risk and concentration risk;
- c. Impact of the application of stress test on the capital adequacy, and/or;
- d. Other relevant factors.

Calculation of capital and RWA for credit risk, market risk and operational risk are done in accordance with Bank Indonesia regulations.

The Bank has complied with all externally imposed capital requirements throughout the reporting period.

Sesuai dengan peraturan Bank Indonesia yang berlaku, Bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 9% - 10% dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Untuk mengantisipasi potensi kerugian sesuai profil risiko Bank, Bank Indonesia dapat mewajibkan Bank untuk menyediakan modal minimum lebih besar dari ketentuan mengenai modal minimum tersebut. Potensi kerugian Bank dapat bersumber dari:

- a. Risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional yang belum dapat sepenuhnya diukur secara akurat dalam melakukan perhitungan ATMR;
- b. Risiko lainnya yang bersifat material antara lain risiko suku bunga di *banking book*, risiko likuiditas, dan risiko konsentrasi;
- c. Dampak penerapan *stress testing* terhadap kecukupan modal Bank, dan/atau;
- d. Berbagai faktor terkait lainnya.

Perhitungan modal dan ATMR untuk risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

Bank telah mematuhi semua persyaratan modal yang ditetapkan sepanjang periode pelaporan.

## Risk Management

Effective risk management is a central part of the financial and operational management of the Bank and fundamental to our ability to generate profits consistently and to maximize the interests of our shareholders and other stakeholders. By way of Risk Management Framework (RMF), SCB manages overall business risk, to optimize the risk adjusted return, while remain lies within the boundary of Bank risk appetite.

In carrying out our business, we refer to our risk management framework named SCB Risk Management Framework (RMF).

There are 10 (ten) risk types and 9 (nine) sub-type of operational risks that we classify and each of which is part of Country Management Group / CMG's (previously called Manco) responsibility. When managing those risk types, CMT members are accountable to implement the SCB Group policy and procedure which prescribe practical steps necessary to

## Manajemen Risiko

Manajemen risiko yang efektif merupakan hal utama dalam manajemen keuangan dan operasional Bank, dan fundamental untuk dapat menghasilkan laba secara konsisten dan berkesinambungan dengan tujuan untuk memaksimalkan kepentingan dari pemilik saham dan pihak pihak yang terkait lainnya. Melalui kerangka kerja manajemen risiko, SCB mengelola seluruh risiko usaha, dengan tujuan untuk memaksimalkan risk-adjusted returns namun tetap dalam batasan risk appetite Bank.

Dalam melaksanakan kegiatan bisnisnya, Bank berpedoman pada kerangka kerja manajemen risiko yaitu SCB Risk Management Framework (RMF).

SCB mengklasifikasikan risiko menjadi 10 (sepuluh) tipe risiko dan 9 (sembilan) sub tipe risiko operasional dengan setiap anggota Country Management Group / CMG (d/h Manco) bertanggungjawab untuk masing-masing tipe risiko tersebut. Dalam mengelola 10 (sepuluh) tipe risiko dan (sembilan) sub-tipe risiko tersebut, anggota CMT bertanggung jawab untuk

accomplish the respective risk management policy.

melaksanakan kebijakan dan prosedur SCB Group. Di dalam kebijakan dan prosedur tersebut diatur tindak lanjut praktis yang diperlukan untuk memenuhi kebijakan manajemen risiko tersebut.

### Risk Types & Definitions

- **CREDIT** - Potential for loss due to failure of counterparty to meet its obligations to pay the Group in accordance with agreed terms
- **COUNTRY CROSS BORDER** - Potential for loss due to the inability to obtain payment from customers / third parties on their contractual obligations, as a result of certain actions taken by foreign governments, chiefly relating to convertibility and transferability of foreign currency
- **MARKET** - Potential for loss of earnings or economic value due to adverse changes in financial market rates or prices
- **PENSION** - Potential for loss due to having to meet an actuarially assessed shortfall in the Group's pension schemes
- **OPERATIONAL** - Potential for loss arising from the failure of people, process or technology or the impact of external events
- **STRUCTURAL LIQUIDITY** - Potential for actual or opportunity loss because the Group cannot pursue its desired business strategy or growth objectives due to a sub-optimal balance sheet structure, including excessive reliance on particular sources of funding
- **CAPITAL** - Potential for actual or opportunity loss from sub-optimal allocation of capital or increase in cost of capital

### Risk Types & Definitions

- **KREDIT** – Potensi kehilangan akibat kegagalan pihak eksternal dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar Grup menurut komitmen yang telah disetujui
- **COUNTRY CROSS BORDER** – Potensi kehilangan akibat ketidakmampuan menindaklanjuti pembayaran dari klien / pihak ketiga sesuai kewajiban di kontrak, sehingga mengakibatkan adanya tindakan yang diambil oleh otoritas asing, Potential for loss due to the inability to obtain payment from customers / third parties on their contractual obligations, as a result of certain actions taken by foreign governments, terutama yang berkaitan dengan konvertibilitas dan pengalihan mata uang asing.
- **PASAR** – Potensi kehilangan pendapatan atau nilai ekonomi akibat kondisi pasar keuangan yang tidak kondusif berakibat pada interest rate atau harga
- **PENSIUN** – Potensi kehilangan akibat kekurangan memenuhi aktuaria yang dinilai dengan skema pension Grup
- **OPERASIONAL** – Potensi kegagalan beroperasi kembali akibat adanya kegagalan pada sumber daya manusia, proses atau teknologi atau efek dari kejadian eksternal
- **STRUKTUR LIKUIDITAS** – Potensi kehilangan kesempatan menjalankan aktifitas bisnis and melaksanakan strategi bisnis dikarenakan struktur keuangan yang lemah atau karena ketergantungan pada satu sumber pendanaan
- **PERMODALAN** – Potensi kehilangan kesempatan memperkuat struktur pemodal atau meningkatkan biaya modal

- **STRATEGIC** - Potential for opportunity loss from failure to optimise the earnings potential of the Group's franchise
- **REPUTATIONAL** - Potential for damage to the franchise, resulting in loss of earnings or adverse impact on market capitalisation as a result of stakeholders taking a negative view of the organisation or its actions
- **SHORT TERM LIQUIDITY** - Potential that the Group does not have sufficient financial resources in the short term to meet its obligations as they fall due, or can access these financial resources only at excessive cost
- **LIKUIDITAS JANGKA PENDEK** – Potensi kehilangan dukungan Grup akibat tidak memiliki tidak tercukupi sumber financial jangka pendek untuk memenuhi kewajiban jatuh tempo atau kehilangan kemampuan memasuki pasar keuangan karena harga yang tidak normal

### Operational Risk Sub-Types

- **EXTERNAL RULES & REGULATIONS** - Potential for actual or opportunity loss due to failure to comply with laws or regulations, or as a result of changes in laws or regulations or in their interpretation or application
- **LIABILITY** - Potential for loss or sanction due to a legal claim against any part of the Group or individuals within the Group
- **LEGAL ENFORCEABILITY** - Potential for loss due to failure to protect legally the Group's interest or from difficulty in enforcing the Group's right.
- **SAFETY & SECURITY** - Potential for loss or damage to physical assets and other property from natural disaster and other events
- **INTERNAL CRIME OR DISHONESTY** - Potential for loss due to action by staff which is intended to defraud, misappropriate property or to circumvent the law or company policy
- **EXTERNAL FINANCIAL CRIME** - Potential for loss due to criminal acts by external parties such as fraud, theft and other criminal activity

### Operational Risk Sub-Types

- **PERATURAN EKSTERNAL & REGULASI** – Potensi kehilangan kesempatan akibat ketidakpatuhan dengan undang-undang, regulasi atau perubahan dalam undang-undang atau regulasi atau dalam penerapannya
- **KEWAJIBAN** – Potensi kehilangan atau terkena sanksi akibat tuntutan hukum kepada Grup atau individu di dalam perusahaan
- **KEBERLAKUAN HUKUM** – Potensi kehilangan akibat ketidakmampuan melindungi tujuan Grup atau karena kesulitan melaksanaan hak yang dimiliki Grup
- **KESELAMATAN & KEAMANAN** – Potensi kehilangan atau kerusakan asek fisik dan property lainnya karena kejadian alam atau lainnya
- **KEJAHATAN INTERNAL ATAU KETIDAKJUJURAN** – Potensi kehilangan akibat tindakan staff bank yang bermaksud melakukan hal-hal yang melawan undang-undang atau kebijakan perusahaan
- **KEJAHATAN FINANSIAL EKSTERNAL** – Potensi kehilangan akibat perilaku kejahatan dilakukan oleh pihak eksternal seperti penipuan, pencurian dan tindakan kejahatan lainnya

- **PROCESSING FAILURE** - Potential for loss due to failure of an established process or to a process design weakness
- **MODEL** - Potential for loss due to a significant discrepancy between the output of risk measurement models and actual experience.
- **KEGAGALAN PROSES** – Potensi kehilangan akibat kegagalan menerapkan proses yang memadai
- **MODEL** – Potensi kehilangan akibat perbedaan yang mendasar antara manajemen risiko model dan hasil yang sesungguhnya

CMG member is responsible to do the followings when applying policy and procedure:

- Assess Group policy and procedure, and monitor its implementation in SCB Indonesia
- Revise or conduct adjustment when required
- Communicate the policy and procedure
- Evaluate the effectiveness of the implementation of policy and procedure

Untuk setiap kebijakan dan prosedur, anggota CMG bertanggung jawab untuk:

- Menilai seluruh kebijakan dan prosedur SCB Group serta memantau aplikasinya untuk SCB Indonesia
- Melakukan perbaikan/penyesuaian atas kebijakan, jika diperlukan
- Mengkomunikasikan kebijakan dan prosedur tersebut
- Melakukan penilaian atas efektivitas pelaksanaan kebijakan dan kepatuhan pada kebijakan dan prosedur yang berlaku

## Risk Management Approach

Risk management refers to the set of end to end activities through which risk taking decisions are made and the risk reward profile of the organization is controlled and optimized. It is a bank-wide activity and starts right at the front line.

Our approach to risk management:

1. **Plan** – Set risk appetite in line with strategic objectives.
2. **Inform** – Identify, measure and monitor all material risk.
3. **Control** – Set parameters to keep our risk profile within risk appetite.
4. **Originate** – Structure and document transactions.
5. **Optimise** – Balance risk and returns (and risk vs cost of control) to best effect.
6. **Communicate** – Influence, interpret and demonstrate compliance with external stakeholder requirements relating to risk management.

## Pendekatan Manajemen Risiko

Manajemen risiko mengacu pada keseluruhan kegiatan pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan risiko yang diambil dan hasil dari profil risiko itu terhadap organisasi yang dikendalikan dan dioptimalisasikan. Ini merupakan aktivitas bank secara keseluruhan dan dimulai dari lini terdepan.

Pendekatan kami terhadap manajemen risiko:

1. **Merencanakan** - Menetapkan *risk appetite* yang sejalan dengan tujuan strategis.
2. **Menginformasikan** - Mengidentifikasi, mengukur dan memantau semua risiko yang material
3. **Mengendalikan** - Menetapkan parameter untuk menjaga profil risiko kami sejalan dengan *risk appetite*.
4. **Menghasilkan** – Menstrukturisasikan dan mendokumentasikan transaksi.
5. **Mengoptimalisasikan** - Risiko keseimbangan (risiko dan pendapatan (dan risiko vs biaya pengontrolan) untuk hasil terbaik.
6. **Mengkomunikasikan** - Mempengaruhi, menafsirkan dan mendemonstrasikan kepatuhan terhadap ketentuan pihak terkait eksternal yang berkaitan dengan manajemen risiko.

Effective risk management is fundamental to being able to generate profits consistently and sustainably and is thus a central part of the financial and operational management of the Bank.

Through the risk management framework, SCB manages enterprises-wide risks, with the objective of maximizing risk-adjusted returns while remaining within the Bank's risk appetite.

As part of the framework, the Bank uses a set of principles that describe the risk management culture it wishes to sustain:

- **Balancing risk and return:** risk is taken in support of the requirements of stakeholders, in line with Bank's strategy and within the Bank's risk appetite
- **Responsibility:** it is the responsibility of all employees to ensure that risk-taking is disciplined and focused. The Bank takes account of its social responsibilities, and its commitment to customers in taking risk to produce a return.
- **Accountability:** risk is taken only within agreed authorities and where there is appropriate infrastructure and resources. All risk-taking must be transparent, controlled and reported.
- **Anticipation:** the Bank seeks to anticipate future risks and ensure awareness of all known risks.
- **Competitive advantage:** the Bank seeks to achieve competitive advantage through efficient and effective risk management and control.

Roles and responsibilities for risk management are defined under a Three Lines of Defence model. Each line of defence describes a specific set of responsibilities for risk management and control.

**The first line of defence** is that all employees are required to ensure the effective management of risks within the scope of their direct organizational responsibilities. Business, function and geographic governance heads are accountable for risk management in their respective business and

Pengelolaan manajemen risiko yang efektif merupakan hal mendasar untuk menghasilkan keuntungan secara konsisten dan berkelanjutan sebagai bagian utama pengelolaan keuangan dan operasional Bank.

Melalui kerangka pengelolaan risiko, SCB mengelola risiko seluruh perusahaan, dengan tujuan memaksimalkan pendapatan disesuaikan dengan risiko dan tetap dalam *risk appetite* Bank.

Sebagai bagian dari kerangka manajemen, Bank menerapkan prinsip-prinsip yang menggambarkan budaya manajemen risiko dengan harapan dapat mempertahankan:

- **Keseimbangan risiko dan pendapatan:** risiko yang diambil dalam mendukung kebutuhan *stakeholder*, sejalan dengan strategi dan dalam *risk appetite* Bank
- **Tanggung Jawab:** merupakan tanggung jawab dari seluruh karyawan untuk memastikan pengambilan risiko yang disiplin dan fokus. Bank memiliki tanggung jawab sosial, dan komitmen kepada pelanggan dalam mengambil risiko untuk menghasilkan keuntungan
- **Akuntabilitas:** risiko yang diambil sesuai kewenangan yang disepakati dan dengan infrastruktur dan sumber daya yang tepat. Semua pengambilan risiko harus transparan, terkontrol dan dilaporkan
- **Antisipasi:** Bank berupaya untuk mengantisipasi risiko masa depan dan memastikan kesadaran terhadap semua risiko yang diketahui
- **Keunggulan kompetitif:** Bank berusaha untuk mencapai keunggulan kompetitif melalui manajemen risiko dan kontrol yang efektif dan efisien.

Peranan dan tanggung jawab manajemen risiko didefinisikan di bawah model Tiga Lini Pertahanan. Setiap lini pertahanan menggambarkan rangkaian tanggung jawab manajemen risiko dan kontrol.

Lini pertahanan pertama adalah bahwa semua karyawan diminta untuk memastikan manajemen risiko yang efektif dalam lingkup tanggung jawab organisasi mereka. Bisnis, fungsi dan geografis kepala pemerintahan bertanggung jawab untuk manajemen risiko dalam bisnis dan fungsi masing-masing, dan

functions, and for countries where they have governance responsibilities.

**The second line of defence** comprises the Risk Control Owners, supported by their respective control functions. Risk Control Owners are responsible for ensuring that the risks within the scope of their responsibilities remain within appetite. The second line is independent of the origination, trading and sales functions. The second line has authority to challenge and stop business activities (within the scope of their control responsibilities) where risks are not aligned with control requirements or risk appetite.

**The third line of defence** is the independent assurance provided by the Group Internal Audit (GIA) function, ensure that the effectiveness of management control of its own business activities (the first line) and of the processes maintained by the Risk Control Functions (the second line).

The findings from the GIA's audits are reported to all relevant management and governance bodies – accountable line managers, relevant oversight functions or committee. GIA provides independent assurance of the effectiveness of management's control of its own business activities (the first line) and of the processes maintained by the Risk Control Functions (the second line). As a result, GIA provides assurance that the overall system of control effectiveness is working as required within the risk management framework.

## Risk Appetite

In managing the Bank's risks to build a sustainable franchise in the interests of all stakeholders, Risk appetite is made as an expression of the amount of risk the Bank is willing to take in pursuit of its strategic objectives, reflection the Bank's capacity to sustain losses and continue to meet its obligations arising from a range of different stress trading conditions.

Risk appetite is defined in terms of both volatility of earnings and the maintenance of minimum regulatory capital requirements under stress scenarios. The Bank also defines risk appetites with respect to liquidity risk and reputational risk.

untuk Negara dimana mereka mempunyai tanggung jawab terhadap pemerintahannya.

**Lini pertahanan kedua** terdiri Pemilik Kontrol Risiko, didukung oleh fungsi kontrol masing-masing. Pemilik Kontrol Risiko bertanggung jawab untuk memastikan bahwa risiko dalam lingkup tanggung jawab mereka tetap dalam *appetite*. Lini kedua tidak bergantung pada originasi fungsi perdagangan dan penjualan. Lini kedua memiliki kewenangan untuk menantang dan menghentikan kegiatan usaha (dalam lingkup tanggung jawab kendali mereka) di mana risiko tidak selaras dengan ketentuan atau *risk appetite*.

**Lini pertahanan ketiga** adalah jaminan independen yang diberikan oleh fungsi *Group Internal Audit* (GIA), memastikan bahwa efektivitas pengendalian manajemen dari aktifitas bisnis (lini pertama) dan proses dikelola oleh Fungsi Pengendalian Risiko (lini kedua).

Temuan dari audit GIA dilaporkan ke manajemen terkait dan tim tata kelola – manajer yang bertanggung jawab, fungsi pengawasan yang relevan atau komite. GIA menyediakan jaminan independen tentang efektivitas kontrol manajemen dari aktifitas bisnis (lini pertama) dan proses dikelola oleh Fungsi Pengendalian Risiko (lini kedua). Sebagai hasilnya, GIA menjamin bahwa efektifitas keseluruhan sistem pengendalian berjalan sesuai dengan kerangka manajemen risiko yang ditentukan.

## Risk Appetite

Dalam mengelola risiko Bank untuk membangun sebuah waralaba yang berkelanjutan demi kepentingan seluruh *stakeholder*, *Risk appetite* dibuat sebagai pernyataan dari besarnya risiko yang Bank bersedia hadapi untuk mencapai tujuan strategis, mencerminkan kemampuan Bank untuk menghadapi kerugian dan terus melaksanakan tanggung jawab yang timbul dari berbagai kondisi tekanan perdagangan.

*Risk appetite* didefinisikan baik dari volatilitas pendapatan maupun dari pemeliharaan peraturan persyaratan modal minimum peraturan di bawah skenario tekanan. Bank juga mendefinisikan *risk appetite* yang berkaitan dengan risiko likuiditas dan risiko reputasi.

## Risk Function

In managing overall Risk Function, Country Chief Risk Officer (CCRO) is responsible for effective and consistent implementation, in addition to any other second-line responsibilities held as a Risk Control Owner and to their first-line responsibilities as a Function manager.

In this capacity the CCRO is expected to:

- Advise and support risk committees in achieving effective risk governance.
- Ensure business heads and control functions understand and accept their risk management responsibilities.
- Challenge business heads and control functions to ensure business-specific risks are properly identified, assessed and controlled in line with global standards.
- Identify risks and potential control gaps which cut across risk types and ensure these are addressed.
- Ensure that material risk/return decisions are made transparently within delegated risk-taking authority and in line with risk appetite.
- Periodically assess risk profile of business or entity and advise the responsible governance body on alignment with risk appetite.
- Review local governance structure and ensure roles and risk control ownership are aligned to Risk Management Framework (RMF).
- Ensure awareness of RMF by business & function heads, including roles & responsibilities under 3 Lines of Defence.
- Embed process changes – under guidance from Group-level Risk Control Owners.

## Risk Control Mechanism

Control mechanism is set to ensure that we maintain our risk profile within Risk Appetite and avoid financial distress. The following tables are list of core control mechanism for each of the risk type.

## Fungsi Risiko

Dalam mengelola keseluruhan unit Risk, Country Chief Risk Officer (CCRO) bertanggung jawab untuk penerapan yang efektif dan konsisten, di samping setiap tanggung jawab lini kedua lainnya yang dimiliki sebagai *Risk Control Owner* dan tanggung jawab lini pertamanya sebagai manajer unit.

Dalam kapasitas ini CCRO diharapkan:

- Mempertimbangkan dan mendukung Komite Risiko dalam mencapai tata kelola risiko yang efektif.
- Memastikan pimpinan bisnis dan unit memahami dan menerima tanggung jawab manajemen risiko.
- Merekomendasikan pimpinan bisnis dan unit untuk memastikan risiko usaha yang spesifik diidentifikasi dengan benar, dinilai dan dikelola sesuai dengan standar global.
- Mengidentifikasi risiko dan potensi kesenjangan kontrol yang mengancam seluruh jenis risiko dan memastikan hal ini ditangani.
- Memastikan bahwa materi risiko/pengambilan keputusan pendapatan dibuat dengan terbuka di antara otoritas pengambilan risiko dan sejalan dengan *risk appetite*.
- Secara berkala menilai profil risiko bisnis atau entitas dan menganjurkan tata kelola yang sesuai dengan *risk appetite*.
- Meninjau struktur pemerintahan lokal dan memastikan peran dan kepemilikan pengendalian risiko yang sejalan dengan *Risk Management Framework* (RMF).
- Memastikan kepedulian terhadap RMF oleh bisnis & pimpinan unit, termasuk peran & tanggung jawab di bawah 3 Lini Pertahanan.
- Menanamkan perubahan proses – dibawah petunjuk *Risk Control Owner* level Grup.

## Mekanisme Pengendalian Risiko

Mekanisme kontrol diatur untuk memastikan bahwa kami menjaga profil risiko dalam *risk appetite* dan menghindari tekanan keuangan. Tabel berikut ini adalah daftar mekanisme kontrol inti untuk masing-masing jenis risiko.

RISK TYPE	Policies & Procedures	Exposure Limit	Delegated Authorities	Risk Info Report	Principal Governance Committee (s)
Credit	Y	Y	Y	Y	EAR/CAC/CRC
Country X-Border	Y	Y	Y	Y	CRC
Market	Y	Y	Y	Y	ALCO/CRC
Pension	Y	X	Y	Y	PEC
Operational	Y	X	Y	*	CORC/CRC
Reputational	Y	X	X	Y	CRC/CMG
Liquidity	Y	Y	Y	Y	ALCO
Capital	Y	X	Y	Y	ALCO
Strategic	Y	X	Y	X	CMG

1. **Policies and Procedures**

*Internal framework of top down rules and standards with emphasis on process related controls.*

2. **Exposure Limits**

*Quantitative caps on risk exposure across a range risk variables.*

3. **Delegated Authorities**

*Framework by which risk taking approval is restricted to authorized bodies.*

## Credit Risk

Credit risk is the potential for loss due to the failure of a counterparty to meet its obligations to pay the Bank in accordance with agreed terms. Credit exposures may arise from both the banking and trading books.

Credit risk is managed through a framework that sets out policies and procedures covering the measurement and management of credit risk. There is a clear segregation of duties between transaction originators in the businesses and approvers in the Risk function. All credit exposure limits are approved within a defined credit approval authority framework.

### Credit policies

Group-wide credit policies and standards are considered and approved by the Group Risk Committee (GRC), which also oversees the delegation of credit approval and loan impairment provisioning authorities. Locally, we also have the rights to consider credit policy.

Policies and procedures specific to each business and country are established by authorized risk committees within Retail Clients and Corporate Institutional Clients

## Risiko Kredit

Risiko kredit adalah potensi kerugian akibat kegagalan pihak ketiga dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar Bank sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Eksposur kredit mungkin timbul baik dari perbankan maupun perdagangan.

Risiko kredit dikelola melalui kerangka kerja yang menetapkan kebijakan dan prosedur yang mencakup pengukuran dan pengelolaan risiko kredit. Terdapat pemisahan tugas antara pelaksana transaksi pada bisnis dan pemberi persetujuan dalam fungsi Risiko. Semua batas eksposur kredit disetujui dalam kerangka kewenangan memutus kredit yang ditetapkan.

### Kebijakan Kredit

Kebijakan kredit di seluruh Grup dipertimbangkan dan disetujui oleh Group Risk Committee (GRC), yang juga membawahi delegasi persetujuan kredit dan wewenang penurunan nilai pemberian pinjaman. Secara lokal, kami memiliki hak untuk mempertimbangkan kebijakan kredit.

Kebijakan dan prosedur spesifik untuk setiap bisnis dan negara yang ditetapkan oleh Risk Committee berwenang dalam Retail Clients dan Corporate

Banking. These are consistent with Group-wide credit policies, but are more detailed and adapted to reflect the different risk environment, regulation from Central Bank in each country and portfolio characteristics.

### **Credit Authority and Approval – Delegation**

Major credit exposures to individual counterparties, groups of connected counterparties and portfolios of retail exposures are reviewed and recommended by Group Credit Committee (GCC). The GCC derives its authority from the GRC.

All other credit approval authorities are delegated by the GRC to individuals based on their judgment and experience and a risk-adjusted scale that takes account of the estimated maximum potential loss from a given customer or portfolio. Credit origination and approval roles are segregated in all but a very few authorized cases. In those very few exceptions where they are not, originators can only approve limited exposures within defined risk parameters.

- Credit Authority is delegated from the Group Risk Committee to Group Credit Committee.
- Credit Authority is based on CG (Probability of Default of the customer) and \$LGD (quantified risk of the facility limit).
- Credit Authority is given to the individual credit officers on an ad personal basis.
- The following Credit skills assessments are mandatory for the Credit Approvers.
  - Credit Skills Assessment (CSA).
  - Core Credit Curriculum (CCC).

### **Credit monitoring**

The Bank regularly monitors credit exposures, portfolio performance, and external trends that may impact risk management outcomes.

Internal risk management reports are presented to risk committees, containing information on key environmental, political and economic trend across major portfolios and countries; portfolio delinquency and loan impairment performance.

The Regional Credit Issues Forum (RCIF) is a sub-committee of and derives its authority from the GRC. The RCIF meets regularly to assess the impact of external events and trends on the Corporate and Institutional Client and Commercial Clients credit risk portfolio and to define and implement the response in

*Institutional Clients.* Ini konsisten dengan kebijakan kredit di seluruh Grup, tetapi secara lebih rinci dan disesuaikan terhadap situasi risiko yang berbeda-beda, peraturan Bank Sentral di setiap negara dan karakteristik portofolio.

### **Wewenang Persetujuan Kredit – Delegasi**

Eksposur kredit besar untuk individu pihak ketiga, grup terkait dan portofolio eksposur ritel ditinjau dan direkomendasikan oleh Komite Kredit Grup (GCC). GCC memperoleh otoritasnya dari GRC.

Semua wewenang persetujuan kredit lain yang didelegasikan oleh GRC kepada individu berdasarkan pertimbangan dan pengalaman dan skala risiko yang disesuaikan yang memperhitungkan estimasi potensi kerugian maksimal dari nasabah atau portofolio. Originasi kredit dan peran persetujuan dipisahkan dalam semua pemberian kredit kecuali beberapa aplikasi yang disetujui sebelumnya. Dalam beberapa pengecualian tersebut, analisis kredit yang telah ditetapkan hanya dapat menyetujui eksposur terbatas dalam parameter risiko yang ditetapkan.

- Wewenang Kredit didelegasikan dari Grup Risk Committee untuk Group Credit Committee.
- Wewenang Kredit didasarkan pada CG (kemungkinan tunggakan nasabah) dan \$ LGD (risiko diukur berdasarkan limit yang diberikan).
- Wewenang Kredit diberikan kepada staf analisis kredit perorangan
- Berikut adalah kemampuan penilaian yang disyaratkan untuk Pemberi Persetujuan Kredit
  - Credit Skills Assessment (CSA).
  - Core Kredit Curriculum (CCC).

### **Pengawasan Kredit**

Bank secara rutin memantau eksposur kredit, kinerja portofolio, dan kecenderungan eksternal yang dapat mempengaruhi hasil pengelolaan risiko.

Laporan manajemen risiko internal disajikan kepada komite risiko, berisi informasi utama mengenai lingkungan, kecenderungan kondisi politik dan ekonomi terhadap portofolio utama dan negara, tunggakan portofolio dan penurunan kualitas kredit.

*The Regional Credit Issues Forum (RCIF)* merupakan sub-komite dan memperoleh otoritasnya dari GRC. The RCIF bertemu secara teratur untuk menilai dampak dari kejadian eksternal dan kecenderungan pada portofolio risiko kredit di *Corporate Institutional*

terms of appropriate changes to portfolio shape, portfolio and underwriting standards, risk policy and procedures.

Clients or portfolios are placed on early alert when they display signs of actual or potential weakness. For example, where there is a decline in the client's position within the industry, financial deterioration, a breach of covenants, non-performance of an obligation within the stipulated period, or there are concerns relating to ownership or management.

Such accounts and portfolios are subjected to a dedicated process overseen by Credit Issue Committees in countries. Client account plans and credit grades are re-evaluated. In addition, remedial actions are agreed and monitored. Remedial actions enhancement, exiting the account or immediate movement of the account into the control of Group Special Assets Management (GSAM), the Group's specialist recovery unit.

In Retail Clients, portfolio delinquency trends are monitored continuously at a detailed level. Individual customer behavior is also tracked and is considered for lending decisions. Accounts that are past due are subject to a collections process, managed independently by the Risk function. Charged-off accounts are managed by specialist recovery teams.

The Small Business High Growth is managed within Retail Clients. While for larger exposures which managed through Discretionary Lending, i.e. Medium Enterprises and Middle Market clients are managed under Commercial Banking segment, which has in line process with Corporate & Institutional Banking, The credit processes are further refined based on exposure at risk. Discretionary Lending and Private Banking past due accounts are managed by GSAM.

Locally, governance forums conduct credit monitoring i.e. Country Risk Committee and other committees such as CORC.

**Credit concentration risk** is managed within concentration caps set by counterparty or group of connected counterparties, by country and industry in Corporate Institutional Clients and tracked by product and country in Retail Clients. Additional targets are set and monitored for concentrations by credit rating.

*Clients* dan *Commercial Clients* untuk mendefinisikan dan menerapkan tindakan yang sesuai yang sesuai dengan struktur portofolio, portofolio dan standar proses penilaian, kebijakan risiko dan prosedur.

Klien atau portofolio ditempatkan pada peringatan awal ketika mereka menampilkan tanda-tanda kelemahan aktual atau potensial. Sebagai contoh, saat terdapat penurunan posisi klien dalam industri, penurunan keuangan, pelanggaran perjanjian, tidak dipenuhinya kewajiban dalam periode yang ditetapkan, atau ada kekhawatiran berkaitan dengan kepemilikan atau manajemen.

Rekening dan portofolio tersebut dikenakan proses khusus diawasi oleh Komite Kredit di masing-masing negara. Rencana rekening klien dan nilai kredit dievaluasi kembali. Selain itu, tindakan perbaikan yang disetujui dan dipantau. Tindakan perbaikan tambahan, mengeluarkan akun atau memindahkan akun segera ke dalam pengawasan *Group Special Assets Management* (GSAM), grup khusus unit recovery.

Dalam *Retail Clients*, kecenderungan tunggakan portofolio dipantau terus menerus pada level terperinci. Perilaku pelanggan individu juga dilacak dan dipertimbangkan pada saat keputusan pemberian kredit. Akun yang telah lewat jatuh tempo akan dikenakan proses koleksi, dikelola secara mandiri oleh fungsi Risiko. Charged-off akun akan diatur oleh unit khusus recovery.

Bisnis Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dikelola dalam *Retail Clients*. Sedangkan untuk eksposur yang lebih besar dikelola melalui pendekatan *Discretionary Lending*, yaitu *Medium Enterprise* dan *Middle Market* yang dikelola dibawah segment Commercial Banking. Hal ini sejalan dengan prosedur *Corporate & Institutional Banking*, Proses kredit lebih lanjut didasarkan pada paparan risiko. Akun *Discretionary Lending* dan *Private Banking* jatuh tempo dikelola oleh GSAM.

Untuk lokal, pengawasan kredit dilakukan melalui forum *governance*, seperti Country Risk Committee dan working committee lainnya, seperti CORC.

**Nilai Risiko Kredit** dikelola dalam kapasitas konsentrasi ditetapkan oleh pihak ketiga atau grup yang terkait pihak ketiga, berdasarkan negara dan industri dalam *Corporate Institutional Clients* dan dipantau oleh produk dan negara dalam *Retail Clients*. Target tambahan ditetapkan dan dimonitor

Credit concentrations are monitored by the responsible risk committees in each of the businesses.

### **Credit rating and measurement**

Risk measurement plays a central role, along with judgment and experience, in informing risk taking and portfolio management decision. It is a primary area for sustained investment and senior management attention.

Since 1 January 2008, Standard Chartered Group has used the advanced Internal Ratings Based (IRB) approach under the Basel II regulatory framework to calculate credit risk capital.

For IRB portfolios, a standard alphanumeric credit risk grade (CG) system is used in both Consumer and Corporate Institutional Clients. The grading is based on the Group's internal estimate of probability of default over a one-year horizon, with customers or portfolios assessed against a range of quantitative and qualitative factors. The numeric grades run from 1 to 14 and some of the grades are further sub-classified A, B or C. Lower credit grades are indicative of a lower likelihood of default. Credit grades 1A to 12C are assigned to performing customers or accounts, while credit grades 13 and 14 are assigned to non-performing or defaulted customers.

### **Problem credit management and provisioning**

A non-performing loan is any loan that is more than 90 days past due or is otherwise individually impaired, (which represents those loans against which individual impairment provisions have been raised) and excludes:

- loans renegotiated before 90 days past due, and on which no default in interest payments or loss of principal is expected; and
- loans renegotiated at or after 90 days past due, but on which there has been no default in interest or principal payments for more than 180 days since renegotiation, and against which no loss of principal is expected.

The Bank's loan loss provisions are established to recognize incurred impairment losses either on specific

konsentrasi dengan peringkat kredit.

Nilai kredit dimonitor oleh komite risiko yang bertanggung jawab disetiap bisnis.

### **Peringkat Kredit dan Pengukurannya**

Pengukuran risiko memegang peran penting, bersamaan dengan penilaian dan pengalaman, dalam menginformasikan pengambilan risiko dan keputusan manajemen portofolio. Ini adalah daerah utama untuk investasi berkelanjutan dan menjadi perhatian manajemen senior.

Sejak 1 Januari 2008, Standard Chartered Group telah menggunakan Penilaian berdasarkan peringkat pendekatan Internal Ratings Based (IRB) dalam kerangka peraturan Basel II untuk menghitung modal risiko kredit.

Untuk portofolio IRB, sistem standar peringkat kredit alfanumerik digunakan baik di *Retail Clients* dan *Corporate Institutional Clients*. Peringkat ini didasarkan pada penilaian grup internal terhadap kemungkinan kegagalan dalam jangka waktu satu tahun, dengan penilaian nasabah atau portofolio yang dinilai terhadap berbagai faktor kuantitatif dan kualitatif. Peringkat numerik terdiri dari 1 sampai 14 dan peringkat lebih lanjut disub-diklasifikasikan dengan A, B atau C. Peringkat kredit yang lebih rendah adalah indikasi dari kemungkinan lebih rendah dari kegagalan. Peringkat kredit 1A sampai 12C diberikan kepada nasabah atau akun lancar, sedangkan peringkat kredit 13 dan 14 diberikan nasabah tidak lancar atau kredit macet.

### **Masalah manajemen kredit dan provisi**

Kredit tidak lancar adalah setiap pinjaman yang telah jatuh tempo lebih dari 90 hari atau dinyatakan terganggu, dan tidak termasuk:

- pinjaman yang dinegosiasi ulang sebelum jatuh tempo 90 hari, dimana diharapkan tidak terdapat kegagalan bunga pembayaran atau kerugian sisa pinjaman, dan
- pinjaman dinegosiasikan ulang pada atau setelah 90 hari jatuh tempo, tetapi tidak terdapat kegagalan bunga pembayaran untuk lebih dari 180 hari sejak negosiasi dan tidak ada kerugian pokok.

Ketentuan kerugian kredit Bank telah dibentuk untuk mengenali provisi kerugian baik pada modal pinjaman

loan assets or within a portfolio of loans and receivables. Individually impaired loans are those loans against which individual impairment provisions (IIP) have been raised.

In Retail Clients, where there are large numbers of small value loans, a primary indicator of potential impairment is delinquency. A loan is considered delinquent (past due) when the counterparty has failed to make a principal or interest payment when contractually due. However, not all delinquent loans (particularly those in the early stage of delinquency) will be impaired. For delinquency reporting purposes industry standards are followed, measuring delinquency as of 1, 30, 60, 90, 120 and 150 days past due. Accounts that are overdue by more than 30 days are more closely monitored and subject to specific collections processes.

Provisioning within Retail Clients reflects the fact that the product portfolios (excluding high small growth clients among SME customers and private banking customers) consist of a large number of comparatively small exposures. Mortgages are assessed for individual impairment on an account-by-account basis, but for other products it is impractical to monitor each delinquent loan individually and individual impairment is therefore assessed collectively.

For the main unsecured products and loans secured by automobiles, the entire outstanding amount is generally written off at 150 days past due. Unsecured consumer finance loans are written off at 90 days past due. For secured loans (other than those secured by automobiles) individual impairment provisions (IIPs) are generally raised at either 150 days (mortgages) or 90 days (wealth management) past due.

The provisions are based on the estimated present values of future cash-flows, in particular those resulting from the realisation of security. Following such realisation any remaining loan will be written off. The days past due used to trigger write-offs and IIPs are broadly driven by past experience, which shows that once an account reaches the relevant number of days past due, the probability of recovery (other than by realising security where appropriate) is low. For all products there are certain situations where the individual impairment provisioning or write-off process is accelerated, such as in cases involving bankruptcy, customer fraud and death. Write-offs and IIPs are accelerated for all restructured accounts to 90 days past due (unsecured and automobile finance) and 120

khusus atau pada portofolio utang dan piutang. *Individually impaired loans* adalah kredit yang cadangan kerugiannya dihitung berdasarkan individu kredit masing-masing.

Di *Retail Clients*, dimana terdapat sejumlah besar pinjaman bernilai kecil, yang menjadi indikator utama potensi kerugian adalah tunggakan. Pinjaman A dianggap tunggakan (jatuh tempo) ketika peminjam telah gagal untuk melakukan pembayaran pokok atau bunga saat kontrak jatuh tempo. Namun, tidak semua kredit bermasalah (terutama di tahap awal penunggakan) akan menyebabkan kerugian. Untuk tujuan pelaporan tunggakan mengikuti standar, mengukur tunggakan pada 1, 30, 60, 90, 120 dan 150 hari lewat jatuh tempo. Akun yang terlambat lebih dari 30 hari dipantau lebih ketat dan akan dikenakan proses penagihan lebih lanjut.

Ketetapan di *Retail Clients* mencerminkan fakta bahwa portofolio produk (tidak termasuk usaha kecil dan menengah antara pelanggan UKM dan nasabah perbankan swasta) terdiri dari sejumlah besar eksposur yang relatif kecil. Hipotek dinilai untuk provisi nilai individual atas dasar aku per akun, tapi untuk produk lain tidak praktis untuk memantau setiap pinjaman tunggakan individual dan karena itu provisi individu dinilai secara kolektif.

Untuk produk tanpa jaminan utama dan pinjaman dijamin dengan mobil, seluruh jumlah utang umumnya dihapuskan pada 150 hari lewat jatuh tempo. Pinjaman pembiayaan konsumen tanpa jaminan dihapuskan pada 90 hari terakhir jatuh tempo. Untuk pinjaman yang dijamin (selain yang dijamin dengan mobil) Ketentuan provisi individu (IIPs) umumnya dibesarkan di kedua 150 hari (KPR) atau 90 hari (wealth management) jatuh tempo.

Ketentuan ini didasarkan pada nilai sekarang estimasi arus kas, khususnya yang dihasilkan dari realisasi keamanan. Setelah realisasi tersebut setiap pinjaman yang tersisa akan dihapuskan. Hari-hari terakhir karena digunakan untuk memicu *write-off* dan IIPs secara luas didorong oleh pengalaman masa lalu, yang menunjukkan bahwa ketika akun mencapai batas hari jatuh tempo tertentu, kemungkinan *recovery* menjadi rendah. Untuk semua produk ada situasi tertentu dimana pembentukan provisi atau proses *write-off* dipercepat, seperti dalam kasus yang melibatkan kebangkrutan, pelanggan penipuan dan kematian. *Write-off* dan IIPs dipercepat untuk semua akun yang direstrukturasi sampai 90 hari jatuh tempo (tanpa jaminan atau automobile finance) dan 120 hari

days past due (secured) respectively.

Individually impaired loans for Retail Clients will therefore not equate to those reported as non-performing in the Bank's Annual Report and Accounts, because non-performing loans include all those over 90 days past due. This difference reflects the fact that, while experience shows that an element of delinquent loans are impaired it is not possible to identify which individual loans the impairment relates to until the delinquency is sufficiently prolonged that loss is almost certain, which, in the Group's experience, is generally around 150 days in Retail Clients. Up to that point the inherent impairment is captured by portfolio impairment provisions (PIP).

The PIP methodology provides for accounts for which an individual impairment provision has not been raised, either individually or collectively. PIP is raised on a portfolio basis for all products, and is set using expected loss rates, based on past experiences supplemented by an assessment of specific factors affecting the relevant portfolio. These include an assessment of the impact of economic conditions, regulatory changes and portfolio characteristics such as delinquency trends and early alert trends. The methodology applies a larger provision against accounts that are delinquent but not yet considered impaired.

The procedures for managing problem credits for the Private Bank and the medium-sized enterprises in the SME segment of Retail Clients are similar to those adopted in Corporate Institutional Clients.

**In Corporate Institutional Clients,** loans are classified as impaired and considered non-performing where analysis and review indicates that full payment of either interest or principal is questionable, or as soon as payment of interest or principal is 90 days overdue. Impaired accounts are managed by a specialist recovery unit, GSAM, which is separate from the Bank's main businesses. Where any amount is considered irrecoverable, an individual impairment provision is raised. This provision is the difference between the loan carrying amount and the present value of estimated future cash flows.

The individual circumstances of each customer are taken into account when GSAM estimates future cash flow. All available sources, such as cash flow arising from operations, selling assets or subsidiaries,

jatuh tempo (dengan jaminan).

Pinjaman individual bermasalah untuk *Retail Clients* karena itu tidak akan sama dengan yang dilaporkan sebagai *non-performing* dalam Laporan Tahunan Bank, karena kredit bermasalah mencakup semua kredit yang telah jatuh tempo 90 hari. Perbedaan ini mencerminkan fakta bahwa, sementara pengalaman menunjukkan bahwa akan sulit untuk mengidentifikasi pinjaman bermasalah yang akan menimbulkan tunggakan sebelum kerugian muncul, yang dalam pengalaman Grup, di *Retail Clients* umumnya pada 150 hari. Sampai saat itu poin yang menunjukkan permasalahan akan dideteksi dengan *portfolio impairment provisions* (PIP).

Metodologi PIP digunakan untuk akun yang telah menimbulkan provisi nilai aset, baik secara individual maupun kolektif. PIP digunakan pada portofolio semua produk, dan ditetapkan berdasarkan tarif kerugian yang diperkirakan, didasarkan pada pengalaman masa lalu ditambah dengan penilaian faktor tertentu yang mempengaruhi portofolio yang relevan. Termasuk didalamnya penilaian terhadap dampak dari kondisi ekonomi, perubahan peraturan dan karakteristik portofolio seperti kecenderungan penunggakan dan kecenderungan *early alert*. Metodologi ini memberlakukan ketentuan yang lebih besar terhadap akun yang telah menunggak tetapi belum dianggap merugikan.

Prosedur untuk mengelola kredit masalah bagi Bank Swasta dan perusahaan sector menengah di segmen UKM *Retail Clients* mirip dengan yang digunakan dalam *Corporate Institutional Clients*.

**Dalam Corporate Institutional Clients**, pinjaman diklasifikasikan dan dinilai sebagai kerugian dimana analisa dan tinjauan menunjukkan bahwa pembayaran penuh dari bunga maupun pokok pinjaman dipertanyakan, atau segera setelah pembayaran dari bunga atau pokok pinjaman mencapai jatuh tempo 90 hari. Akun tidak lancar dikelola oleh unit *recovery* khusus, GSAM, yang terpisah dari unit bisnis utama Bank. Pada saat jumlah dinilai tidak dapat menutup pinjaman, akan menimbulkan provisi nilai aset perorangan. Provisi ini merupakan selisih antara nilai tercatat pinjaman dan nilai sekarang dari estimasi arus kas masa depan.

Kondisi masing-masing nasabah diperhitungkan ketika GSAM memperkirakan arus kas di masa depan. Semua sumber yang tersedia, seperti arus kas yang timbul dari operasi, penjualan aset atau anak

realising collateral or payments under guarantees, are considered. In any decision relating to the raising of provisions, the Group attempts to balance economic conditions, local knowledge and experience, and the results of independent asset reviews.

Where it is considered that there is no realistic prospect of recovering a portion of an exposure against which an impairment provision has been raised, that amount will be written off. As with Retail Clients, a PIP is held to cover the inherent risk of losses which, although not identified, are known through experience to be present in any loan portfolio. In Corporate Institutional Clients, this is set with reference to historic loss rates and subjective factors such as the economic environment and the trends in key portfolio indicators. The PIP methodology provides for accounts for which an individual impairment provision has not been raised.

### **Basel approach to credit risk**

The SCB Group uses the IRB approach to manage credit risk for the majority of its portfolios. This allows the Group to use its own internal estimates of Probability of Default (PD), Loss Given Default (LGD), Exposure at Default (EAD) and Credit Conversion Factor (CCF) to determine an asset risk weighting.

PD is the likelihood that an obligor will default on an obligation. All banks utilising an IRB approach must assign internal PD to all borrowers in each borrower grade. EAD is the expected amount of exposure to a particular obligor at the point of default. CCF is an internally modeled parameter based on historical experience to determine the amount that is expected to be further drawn down from the undrawn portion in a committed facility. LGD is the percentage of EAD that a lender expects to lose in the event of obligor default.

All assets under the IRB approach have sophisticated PD, LGD and EAD/CCF models developed to support the credit decision making process. RWA under the IRB approach is determined by regulatory specified formulae dependent on the Group's estimates of PD, LGD, EAD and CCF.

In line with the BI regulation, SCB Indonesia applies the Standard Approach to credit risk measures credit risk pursuant to fixed risk weights. The risk weight applied under the Standardised Approach is given by the FSA and is based on the asset class to which the exposure is assigned.

perusahaan, pemberian jaminan dipertimbangkan. Setiap keputusan yang berkaitan dengan timbulnya provisi, Grup mencoba untuk menyeimbangkan kondisi ekonomi, pengetahuan dan pengalaman lokal, dan hasil tinjauan aset independen.

Pada saat dinilai tidak ada kemungkinan untuk memperbaiki penurunan nilai provisi yang timbul, jumlah tersebut akan dihapuskan. Seperti *Retail Clients*, PIP digunakan untuk menutupi potensi kerugian, yang meskipun tidak teridentifikasi, dapat diketahui melalui pengalaman yang timbul pada semua portofolio. Dalam *Corporate Institutional Clients* penetapan ini mengacu kepada sejarah peringkat kerugian dan faktor subjektif seperti kondisi keuangan dan kecenderungan pada indikator utama portofolio. Metodologi ini memberlakukan ketentuan yang lebih besar terhadap akun yang telah menunggak tetapi belum dianggap merugikan.

### **Pendekatan Basel terhadap risiko kredit**

Grup SCB menggunakan pendekatan IRB untuk mengelola risiko kredit bagi mayoritas portofolionya. Hal ini memungkinkan Grup untuk menggunakan perhitungan internal *Probability of Default (PD)*, *Loss Given Default (LGD)*, *Exposure at Default (EAD)* dan *Credit Conversion Factor (CCF)* untuk menentukan bobot risiko aset.

PD adalah kecenderungan bahwa semua nasabah akan memenuhi kewajibannya. Semua bank yang menggunakan pendekatan IRB harus menetapkan intern PD untuk semua peminjam di setiap tingkat pinjaman. EAD adalah jumlah yang diharapkan dari peminjam pada titik standar. CCF adalah model parameter internal berdasarkan pengalaman masa lalu untuk menentukan jumlah yang akan dapat ditarik porsi fasilitas yang diberikan. LGD adalah persentase penurunan EAD yang diharapkan pemberi pinjaman didapat dari peminjam.

Sebuah aset yang menggunakan pendekatan IRB mempunyai model PD, LGD dan EAD / CCF yang dikembangkan untuk mendukung pembuatan keputusan proses kredit. RWA dengan pendekatan IRB ditentukan kebijakan dari grup mengenai formula khusus perhitungan dari PD, LGD, EAD dan CCF.

Sejalan dengan peraturan BI, SCB Indonesia menerapkan Pendekatan Standar untuk pengukuran risiko kredit sesuai dengan bobot risiko tetap. Bobot risiko yang diterapkan dengan Pendekatan Standarisasi diberikan oleh FSA dan didasarkan pada kelas aset yang eksposur diberikan.

For sovereigns, corporates and institutions, external ratings are used to assign risk weights. These external ratings must come from FSA approved rating agencies, known as External Credit Assessment Institutions (ECAI); namely Moody's, Standard & Poor's and Fitch. The Group uses ratings from these agencies as part of its day to day business. External ratings for the counterparty are determined as soon as a relationship is established and these ratings are tracked and kept updated. Assessments provided by approved ECAI are mapped to credit quality steps as prescribed by the FSA.

### **Collateral**

Collateral is held to mitigate credit risk exposures and risk mitigation policies determine the eligibility of collateral types. Collateral types that are eligible for risk mitigation include: cash; residential, commercial and industrial property; fixed assets such as motor vehicles, aircraft, plant and machinery; marketable securities; commodities; bank guarantees and letters of credit.

For certain types of lending – typically mortgages, asset financing – the right to take charge over physical assets is significant in terms of determining appropriate pricing and recoverability in the event of default.

Collateral is reported in accordance with the Group's risk mitigation policy, which prescribes the frequency of valuation for different collateral types, based on the level of price volatility of each type of collateral and the nature of the underlying product or risk exposure. Where appropriate, collateral values are adjusted to reflect, current market conditions, the probability of recovery and the period of time to realise the collateral in the event of possession. The collateral values reported are also adjusted for the effects of over-collateralisation.

The requirement for collateral is not a substitute for the ability to pay, which is the primary consideration for any lending decisions. In determining the financial effect of collateral held against loans neither past due or impaired, the Group has assessed the significance of the collateral held in relation to the type of lending.

Where guarantees or credit derivatives are used as Credit Risk Mitigation (CRM) the creditworthiness of the guarantor is assessed and established using the

Untuk *sovereigns*, korporasi dan institusi, penilaian eksternal digunakan untuk menetapkan bobot risiko. Peringkat eksternal ini berasal dari agensi pemeringkat yang disetujui FSA, dikenal sebagai Lembaga Penilaian Kredit Eksternal (ECAI), yaitu Moody, Standard & Poor's dan Fitch. Grup menggunakan peringkat dari lembaga ini sebagai bagian dari proses bisnis harian. Peringkat eksternal untuk pihak rekanan ditentukan segera setelah hubungan dimulai dan peringkat ini terus dipantau serta diperbaharui. Penilaian yang diberikan ECAI terpilih dimasukkan dalam langkah kualitas kredit seperti yang disarankan FSA.

### **Jaminan**

Jaminan diberikan untuk mengurangi eksposur risiko kredit dan kebijakan mitigasi risiko untuk menentukan jenis agunan yang sesuai. Jenis agunan yang memenuhi syarat untuk mitigasi risiko termasuk: kas; tempat tinggal, properti komersial dan industri; aset tetap seperti kendaraan bermotor, pesawat terbang, pabrik dan mesin, surat berharga, komoditas, bank garansi dan *letter of credit*.

Untuk beberapa jenis pinjaman - biasanya hipotek, pembiayaan aset – hak untuk mengambil alih aset fisik menjadi penting dengan tujuan untuk menentukan harga dan kemampuan yang sesuai. Jaminan dilaporkan sesuai dengan kebijakan mitigasi risiko Grup, yang mengatur frekuensi penilaian untuk berbagai jenis jaminan yang berbeda, berdasarkan tingkat volatilitas harga setiap jenis jaminan dan sifat dasar dari produk atau eksposur risiko. Apabila diperlukan, nilai jaminan dapat disesuaikan untuk menunjukkan kondisi pasar saat ini, kemungkinan perbaikan dan periode waktu yang menunjukkan kepemilikan jaminan. Nilai agunan yang dilaporkan juga disesuaikan dengan dampak dari *over-collateralisation*.

Persyaratan agunan bukanlah pengganti untuk kemampuan untuk membayar, yang merupakan pertimbangan utama untuk setiap keputusan pemberian kredit. Dalam menentukan dampak keuangan dari agunan terhadap pinjaman tidak jatuh tempo atau mengalami penurunan nilai, Grup telah menilai pentingnya agunan dalam kaitannya dengan jenis pinjaman.

Ketika jaminan atau derivatif kredit digunakan sebagai Mitigasi Risiko Kredit (CRM) kelayakan kredit dari penjamin dinilai dan ditetapkan menggunakan proses

credit approval process in addition to that of the obligor or main counterparty. The main types of guarantors include bank guarantees, insurance companies, parent companies, shareholders and export credit agencies. Credit derivatives, due to their potential impact on income volatility are used in a controlled manner with reference to their expected volatility.

**Corporate Institutional Clients** - The process of managing and recognising credit risk mitigation is governed by policies which set out the eligibility criteria that must be met. The credit risk mitigation policy sets out clear criteria that must be satisfied if the mitigation is to be considered effective:

- Excessive exposure to any particular risk mitigants or counterparties should be avoided. Collateral concentration mitigation standards are maintained at both the portfolio and counterparty level;
- Risk mitigants should not be correlated with the underlying assets such that default would coincide with a lowering of the Forced Sale Value (FSV) of the collateral;
- Where there is a currency mismatch, haircuts should be applied to protect against currency fluctuations;
- Legal opinions and documentation must be in place; and
- Ongoing review and controls exist where there is a maturity mismatch between the collateral and exposure.

For all credit risk mitigants that meet the policy criteria, a clear set of procedures are applied to ensure that the value of the underlying collateral is appropriately recorded and updated regularly.

**Retail Clients** - The effective use of collateral is a key tool by which credit risk is mitigated in Retail Clients. All eligible collateral accepted by Retail Clients is covered by a product proposal approved by senior credit officers delegated with the relevant authority.

New collateral types have to be vetted through a stringent 'New Business Approval' process and approved by the Retail Clients Risk Committee.

In order to be recognised as security and for the loan to be classified as secured, all items pledged must be valued and an active secondary resale market must exist for the collateral.

Documentation must be held to enable Retail Clients to realise the asset without the cooperation of the asset

persetujuan kredit. Jenis utama dari penjamin termasuk bank garansi, perusahaan asuransi, perusahaan induk, pemegang saham dan lembaga kredit ekspor. Derivatif kredit, karena dampak potensial mereka terhadap volatilitas pendapatan digunakan dengan cara yang terkendali dengan mengacu pada volatilitas mereka diharapkan.

**Corporate Institutional Clients** - Proses pengelolaan dan pengakuan mitigasi risiko kredit diatur oleh kebijakan yang menetapkan kriteria kelayakan yang harus dipenuhi. Kebijakan mitigasi risiko kredit menetapkan kriteria yang jelas jika mitigasi diharapkan untuk efektif:

- Paparan berlebihan terhadap setiap upaya pengendalian risiko tertentu atau pihak mitra harus dihindari. Mitigasi standar pada konsentrasi agunan dikelola baik terhadap portofolio maupun mitra;
- Upaya mitigasi risiko tidak boleh berkorelasi dengan underlying asset seperti berkaitan dengan penurunan dari Nilai Jual Paksa (FSV) agunan;
- Jika terdapat ketidaksesuaian nilai mata uang, potongan harus diterapkan untuk melindungi dari fluktuasi nilai mata uang;
- Opini legal dan dokumentasi harus dijalankan, dan
- Kajian dan kontrol dijalankan pada saat terjadi ketidaksesuaian antara jaminan dan eksposur.

Untuk semua upaya pengendaliannya risiko kredit yang memenuhi kriteria kebijakan, prosedur yang jelas diterapkan untuk memastikan bahwa nilai agunan yang mendasari tepat dicatat dan diperbarui secara teratur.

**Retail Clients** – Penggunaan agunan yang efektif adalah kunci dari mitigasi risiko di *Retail Clients*. Semua agunan yang diterima oleh *Retail Clients* telah ditutupi oleh proposal produk yang disetujui oleh senior staf kredit dengan wewenang terkait.

Semua jenis jaminan baru harus diperiksa melalui proses yang ketat 'New Business Approval' dan disetujui oleh Komite Risiko *Retail Clients*. Untuk dapat diakui sebagai jaminan untuk pinjaman dan harus diklasifikasikan sebagai dijamin, semua item harus mempunyai harga dan aktif di pasar sekunder.

Dokumentasi diperlukan untuk memudahkan *Retail Clients* merilis jika dibutuhkan, tanpa kerja sama dari

owner in the event that this is necessary.

Regular valuation of collateral is required in accordance with the Group's risk mitigation policy, which prescribes both the process of valuation and the frequency of valuation for different collateral types. The valuation frequency is driven by the level of price volatility of each type of collateral and the nature of the underlying product or risk exposure. Stress tests are performed on changes in collateral values for key portfolios to assist senior management in managing the risks in those portfolios. Physical collateral is required to be insured at all times and against all risk procedures over collateral management must be in place for each business at the country level.

## Market Risk

Market risk is the risk of loss resulting from changes in market prices and rates. The primary categories of market risk for the Bank are: interest rate risk and currency exchange rate risk.

Bank has a set of organization structure, Policies, and procedures for managing market risk. Market risk management implementation intends to identify, measure, monitor, and manage Bank's balance sheet risk. Asset Liability Committee (ALCO) dan Risk Committee (RMC) review market risk profiles and compliance of the limits. Group Market Risk is independent control function established to measure, monitor, and control the exposures to market risk.

For market risk capital calculation, Bank uses standardized approach by following report format from Bank Indonesia in which Bank relates only to trading book portfolio and FX position in the banking book. Though Bank's internal market risk analysis model is based on the Bank's daily Value at Risk ("dVaR"), which covers all price risk. dVaR is calculated for expected movements over a minimum of one business day and to a confidence level of 97.5%. Bank applies Historical simulation method for generating dVaR. Regular back test is conducted in order to measure accuracy of VaR model against actual result. Factor sensitivity is also employed to measure market risk. Bank's balance sheet consists of generic products therefore they are gauged by standard methodology which globally accepted. Validation of valuation model is organized in Model Validation Policy, Group Market Risk.

pemilik. Valuasi reguler agunan diperlukan sesuai dengan kebijakan mitigasi risiko Grup, yang mengatur kedua proses penilaian dan frekuensi penilaian untuk berbagai jenis jaminan yang berbeda. Frekuensi penilaian didorong oleh tingkat volatilitas harga setiap jenis jaminan dan sifat produk yang mendasari atau eksposur risiko. Stress test dilakukan pada perubahan nilai jaminan atas portofolio utama untuk membantu manajemen senior dalam mengelola risiko dalam portofolio mereka. Agunan fisik diperlukan untuk diasuransikan setiap saat dan seluruh prosedur pengelolaan risiko agunan harus dijalankan pada setiap bisnis disetiap negara.

## Risiko Pasar

Risiko pasar adalah potensi kerugian yang muncul akibat dari perubahan harga dan tingkat bunga di pasar. Kategori dari risiko pasar yang dihadapi Bank adalah risiko nilai tukar mata uang (*foreign exchange risk*) dan risiko tingkat bunga (*interest rate risk*).

Bank mempunyai seperangkat organisasi, kebijakan dan prosedur untuk mengelola risiko pasar. Penerapan manajemen risiko pasar bertujuan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan posisi neraca bank yang mempunyai risiko pasar. Asset Liability Committee (ALCO) dan Risk Committee (RMC) adalah komite yang mengkaji profil risiko pasar termasuk juga kepatuhannya terhadap limit risiko yang telah disepakati. Group Market Risk sebagai unit kontrol yang independen melaksanakan fungsi pengukuran, monitoring dan kontrol terhadap eksposur risiko pasar

Dalam perhitungan biaya modal untuk risiko pasar, Bank mempergunakan pendekatan standar dengan mengikuti format laporan dari Bank Indonesia. Namun demikian bank juga menggunakan model internal untuk pengukuran risiko di internal Bank. *Daily Value at Risk* (dVaR) dipergunakan untuk menghitung potensi kerugian harian karena pergerakan harga pasar yang diperkirakan dengan menggunakan tingkat kepercayaan 97,5%. *Historical simulation* adalah metode yang dipergunakan dalam perhitungan dVaR. *Back test* dilakukan secara regular untuk mengukur keakuratan model terhadap hasil yang sebenarnya. Bank juga menggunakan faktor sensitivitas untuk mengukur risiko pasar. Neraca Bank terdiri atas produk-produk yang generik begitu juga dengan metodologi pengukuran yang dipergunakan, yaitu model standar (*generic*). Validasi model valuasi diatur didalam kebijakan Grup Market Risk tentang *Model*

*Validation.*

As complement with normal risk measurement, stress testing is conducted periodically to review potential impact from stress scenarios.

GMRC has all oversight of market risk as defined by the Risk Management Framework. Delegated authority for market risk limit setting is recorded in the Limit Management System (LMS). Limit approvals are also recorded within LMS and it is not possible for a risk manager to approve limits beyond their delegated authority due to the LMS workflow process.

## **Operational Risk**

### **Operational risk management organisation**

Operational risk management organisation in SCB Indonesia is in line with the organisational structure in respective business or support function. This consistency provides confidence that operational risk are being identified and effectively managed in respective business / support function, and escalated to Country level for Medium and above rated risks.

In day to day, Banks maintain 3 lines of defence to ensure the effectiveness of risk management processes:

#### i) **First Line of Defence**

First Line of Defence is all employees who have any level of supervisory responsibility since they are required to ensure the effective management of operational risks within the scope of their direct organisational responsibilities. The two main risk management responsibilities of First Line managers are as follows:

- Ensure all material risk are identified, assessed, mitigated, monitored and reported.
- Ensure applicable external laws and regulations and internal policies, procedures, limits and other risk control requirements are implemented and complied with.

Beside the above, the first line manager should also propose control enhancements, align business (or functional) strategy with risk appetite, and set the right tone for the risk management culture.

Untuk melengkapi pengukuran risiko pasar, bank melakukan *stress testing* secara periodik untuk melihat efek negatif dari skenario *stress*.

Komite Grup Manajemen risiko pasar memiliki kewenangan pengawasan sepenuhnya terhadap risiko pasar sesuai dengan kerangka kerja manajemen risiko. Limit-limit yang disetujui dan pihak-pihak yang mempunyai kewenangan terhadap persetujuan limit dicatat di *Limit Management System* (LMS).

## **Risiko Operasional**

### **Organisasi manajemen risiko operasional**

Organisasi manajemen risiko Operasional di SCB Indonesia sejalan dengan struktur organisasi di masing-masing Bisnis atau *Support function*. Konsistensi dengan struktur organisasi ini memberikan keyakinan kepada lini manajemen teratas bahwa identifikasi dan manajemen risiko operasional telah dilakukan di masing-masing bisnis dan *Support function*, dan di-escalasi ke level Negara (Country) untuk risiko operasional dengan tingkat Medium ke atas.

Dalam pelaksanaan sehari-hari, Bank memiliki 3 lini pertahanan untuk memastikan proses manajemen risiko yang efektif:

#### i) **Lini pertahanan pertama**

Lini pertahanan pertama adalah semua karyawan yang memiliki tanggung jawab sebagai supervisor, di mana mereka harus memastikan manajemen risiko operasional yang efektif dalam cakupan organisasi tang berada di bawahnya. Ada dua tanggung jawab utama dari Lini pertahanan pertama yaitu:

- Memastikan risiko-risiko yang materil diidentifikasi, dimitigasi, dimonitor dan dilaporkan.
- Memastikan implementasi dan kepatuhan terhadap peraturan eksternal dan kebijakan / prosedur internal, limit-limit dan kontrol-kontrol lain yang ada.

Di samping kedua tanggung jawab tersebut, manajer di Lini pertahanan pertama juga harus mengusulkan peningkatan kontrol, memastikan bahwa strategi bisnis (atau fungsi) sejalan dengan *risk appetite*, dan menerapkan budaya manajemen

risiko dengan benar.

### **ii) Second Line of Defence**

The responsibilities of Second Line of Defense among others are:

- Challenge and verify First Line risk identification and assessment.
- Ensure effective communication of policies and other control requirements.
- Monitor compliance with and effectiveness of the risk control environment

Second Line of Defence for operational risk comprises the Operational risk function and other Operational Risk Control Owners. Operational Risk Control Owners monitors the effectiveness of the policies and procedures which they own, even if they are executed by staff outside their own function, while Operational risk function ensure that Business Heads and all Operational Risk Control Owners understand and accept their risk management and control responsibilities.

### **iii) Third Line of Defence**

Third Line of Defence comprises the independent assurance provided by the Group Internal Audit (GIA) function, which provides independent assurance of the effectiveness of management's control of its own business activities (the First Line) and of the processes maintained by the Risk Control Functions (the Second Line).

### **ii) Lini pertahanan kedua**

Tanggung jawab dari Lini pertahanan kedua di antaranya adalah:

- Mempertanyakan, meminta penjelasan dan atau melakukan verifikasi terhadap Lini pertahanan pertama dalam melakukan identifikasi dan pengukuran risiko.
- Memastikan komunikasi yang efektif dari kebijakan dan kontrol-kontrol yang diperlukan.
- Memonitor kepatuhan dan efektivitas dari kontrol risiko.

Lini pertahanan kedua untuk risiko operasional terdiri dari fungsi risiko operasional dan *Operational Risk Control Owners* yang lain. *Operational Risk Control Owners* memonitor efektivitas dari kebijakan dan prosedur yang dimilikinya, sekalipun implementasi kebijakan/prosedur tersebut dilakukan di luar unit/fungsi mereka. Di sisi lain, fungsi risiko operasional memastikan bahwa kepala unit bisnis dan semua *Operational Risk Control Owners* mengerti dan menerima tanggung jawab mereka dalam manajemen risiko dan kontrol.

### **iii) Lini pertahanan ketiga**

Lini pertahanan ketiga terdiri merupakan kepastian yang diberikan secara independen oleh fungsi *Group Internal Audit* (GIA), yang memastikan efektivitas dari kontrol yang dilakukan oleh manajemen terhadap aktivitas bisnis masing-masing (Lini pertahanan pertama) dan juga proses yang dimiliki oleh fungsi kontrol risiko (Lini pertahanan kedua).

## **Risk identification and Assessment Mechanism**

### **• Risk Identification**

Risk Identification must be forward looking, and anticipatory to encourage proactive risk management. Below is the mechanism of Risk Identification.

#### **1. Process Flow (DOI) and PRA (Process Risk Analysis).**

Process Flow is a representation of:

- What work needs to be performed?
- How is the work performed?
- Where is it performed?

## **Mekanisme yang Digunakan Bank untuk Mengidentifikasi dan Mengukur Risiko Operasional**

### **• Identifikasi Risiko**

Identifikasi Risiko harus bersifat *forward looking*, dan antisipatif, untuk mendorong proaktif manajemen risiko. Identifikasi Risiko dilakukan dengan beberapa mekanisme berikut:

#### **1. Flow Proses (DOI, *Department Operating Instructions*) dan PRA (*Process Risk Analysis*)**

Diagram / Flow proses adalah penjabaran dari:

- Aktivitas yang dilakukan ?
- Bagaimana aktivitas tersebut dilakukan ?
- Di unit / lokasi manakah aktivitas tersebut

All business and function units have a process flow (DOI) map for the key processes. A risk identification can be done by doing analysis on the process flow, step by step. This can be useful to identify possible failure points and related risks

## 2. Key Controls, Key Control Standards dan Key Control Self Assessment.

**Key Controls** refer to control requirements which are more important in a process. These controls are required to comply with policy requirements. This Key control should be identified and monitored regularly (KCS & KCSA) for compliance and effectiveness.

## 3. KRIs are quantitative Operational risk measures that indicate the level of risk relative to a control for a product, process or policy. KRIs can be analysed through a consistent and periodical process of collecting relevant data and identifying trends and risk exposures (e.g via breaches of thresholds).

## 4. Incident Analysis

Incidents resulting in operational Risk or Losses must be analysed to identify root causes. Focusing the mitigation action on the root cause would reduce the likelihood of similar operational risk events / incidents from occurring again, either the same Unit or elsewhere in the Bank.

Unit manager and/or Business Operational Risk Manager may decide whether an incident is significant or not.

Examples of some significant incidents are:

- Issues raised by GIA
- Historical operational loss incidents
- Major business interruptions (e.g. data centre or e-commerce failure) internal and/or external to the Bank, natural

dilakukan?

Semua bisnis dan fungsi memiliki proses *flow* (DOI) untuk proses-proses utama. Identifikasi risiko dapat dilakukan dengan melakukan analisis terhadap proses *flow*. Hal ini berguna untuk mengidentifikasi adanya risiko yang dapat mengakibatkan kegagalan.

## 2. Key Controls, Key Control Standards dan Key Control Self Assessment.

**Key Control** adalah kontrol-kontrol utama yang dianggap paling penting dalam sebuah proses. Kontrol – kontrol ini diperlukan agar bisnis / fungsi dapat mematuhi kebijakan – kebijakan yang ada. Kontrol-kontrol utama ini harus diidentifikasi dan dimonitor secara periodik (*Key Control Standard* dan *Key Control Self Assessment*) untuk memastikan kepatuhan dan efektivitasnya.

## 3. KRI (Key Risk Indicator)

Pengukuran terhadap risiko operasional secara kuantitatif yang merupakan indikator tingkat risiko relatif terhadap kontrol produk, proses atau kebijakan yang ada. KRI dapat dianalisis melalui proses yang konsisten dan periodik dalam mengumpulkan data-data yang relevan, dan identifikasi tren dan eksposure risiko, dari angka-angka yang melampaui limit yang telah ditetapkan.

## 4. Analisis Insiden

Insiden yang berhubungan dengan risiko atau kerugian operasional harus dianalisis untuk mengidentifikasi akar permasalahan (*root cause*). Dengan fokus pada akar permasalahan, Bank dapat mengurangi risiko operasional yang sama terulang lagi, baik di unit yang sama maupun di unit yang lain di Bank.

Manajer dari unit terkait dan juga Manajer risiko operasional di bisnis / unit terkait akan memutuskan apakah sebuah kejadian dikategorikan sebagai signifikan atau tidak. Contoh-contoh dari insiden yang signifikan antara lain adalah:

- Temuan audit oleh GIA
- insiden yang mengakibatkan kerugian operasional yang signifikan
- Interupsi yang signifikan dalam bisnis (masalah koneksi di data centre atau e-commerce) baik internal maupun

- disasters, strikes, serious fire, civil and/or political disruption
- Significant theft or other incidents which have serious security implications, such as kidnap, terrorist attacks, injury or death caused by criminal acts.
- 5. External Events Analysis**  
 External events, which have operational Risk implications to the Bank, can be used to assess risks for the Bank. Examples of such events are:
- Major fraud
  - Events affecting the outsourced vendors and strategic partners of the Bank
  - Significant Regulatory fine
  - Health and Safety risk
- 6. New Initiatives Risk Analysis**  
 Any new initiative of the Bank such as launch of new products, acquisition, integration, projects, etc would result in risk exposures. Operational risks must be identified and assessed in the evaluation and implementation of new initiatives.
- **Operational Risk Assessment**  
 Operational Risk is assessed by using the Operational risk Assessment Matrix, consisting of 2 dimensions:
    - (i) Impact: impact of operational risk exposure to Financial and Reputation
    - (ii) Likelihood of the operational risk.
- Below is the Country Operational Risk Assessment of Standard Chartered Bank Indonesia

### Operational Risk Mitigation

1. All risks identified must have mitigation plans in place to reduce risks to within the risk appetite of the Bank.

eksternal bank, bencana alam, demonstrasi pegawai, kebakaran besar, masalah-masalah politik)

- Pencurian yang menimbulkan kerugian besar atau insiden-insiden lain yang mempunyai dampak serius terhadap keamanan, seperti penculikan, teroris, kecelakaan atau kematian yang ditimbulkan oleh kejahatan.

### 5. Analisis kejadian Eskternal

Analisis terhadap kejadian eksternal, yang memiliki implikasi risiko operasional kepada Bank, dapat digunakan sebagai metode untuk mengidentifikasi risiko operasional, sebagai contoh:

- Fraud yang signifikan
- Peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan vendor (*outsourcing*) dan partner strategik dari Bank.
- Denda signifikan yang berhubungan dengan regulasi
- Risiko Kesehatan dan Keselamatan (*Health and Safety*)

### 6. Analisis risiko untuk inisiatif-inisiatif baru

Semua inisiatif yang dilakukan Bank seperti, produk baru, akuisisi, integrasi, proyek dan sebagainya menimbulkan eksposur risiko. Risiko operasional harus diidentifikasi dan diukur dalam evaluasi dan penerapan inisiatif baru tersebut.

### • Pengukuran Risiko Operasional

Risiko operasional diukur dengan menggunakan Matriks peringkat risiko operasional, yang terdiri dari 2 dimensi:

- (i) Impact / Dampak dari risiko operasional tersebut terhadap finansial dan reputasi
- (ii) Likelihood: Kemungkinan terjadinya risiko Operasional tersebut.

Di bawah ini adalah Matriks peringkat risiko operasional Standard Chartered Bank Indonesia.

### Mekanisme untuk Memitigasi Risiko Operasional

1. Semua risiko yang telah diidentifikasi harus memiliki rencana pengendalian untuk mengurangi risiko ke level yang sesuai dengan *risk appetite* dari Bank.

2. Actions to mitigate or control identified risks are prioritized based on assessed impact of the risk and must be directed at the root cause of the risk.
3. All mitigation plans must have clear ownership and realistic target dates.
4. Risk grade must be re-assessed periodically to appropriately reflect changes in environment and the progress of the mitigation plans. All mitigation action plans and the realisation must be updated in Phoenix.
2. Langkah-langkah untuk mengurangi risiko harus harus diprioritaskan berdasarkan *impact* dari risiko, dan dilakukan berdasarkan akar masalah (penyebab) dari risiko tersebut.
3. Semua langkah untuk mengurangi risiko harus mempunyai kepemilikan yang jelas (*clear ownership*) dan tanggal penyelesaian yang realistik.
4. Tingkat risiko harus diukur kembali secara periodik agar dapat merefleksikan perubahan dan kemajuan / *progress* dari langkah-langkah pengurangan risiko. Semua rencana langkah-langkah tersebut dan juga realisasinya harus di input ke dalam sistem *Phoenix*.

Generally, Bank has Insurance and BCP as important component in Operational Risk mitigants.

**Insurance:** Bank takes Insurance to protect itself against the risks that it faces, Insurance, an effective risk mitigation tool, enables the bank to transfer the risks.

**BCP:** Business Continuity and Disaster Recovery plans are other examples of risk mitigants tools. Their purpose is to ensure post events, the business impact is contained and recovery is facilitated as early as possible.

## Liquidity Risk

Liquidity risk is the potential that the Bank has no sufficient liquidity of financial resources available to meet all its obligations as they fall due or can only access these financial resources at excessive cost.

Bank has a set of organization structure, Policies, and procedures for managing liquidity risk. Liquidity risk management implementation intends to identify, measure, monitor, and manage Bank's liquidity risk. Asset Liability Committee (ALCO) reviews liquidity risk profiles and compliance of the limits. Group Market Risk is independent control function established to measure, monitor, and control the exposures to short term liquidity risk.

The primary measures of its Short Term Liquidity Risk

Secara umum Bank memiliki Asuransi dan BCP (*Business Continuity Plan*) sebagai komponen penting dalam memitigasi risiko operasional.

**Asuransi:** Bank memiliki asuransi sebagai proteksi terhadap risiko yang dihadapi. Asuransi adalah salah satu mekanisme mitigasi yang efektif yang memungkinkan bank untuk mentransfer risiko yang dimilikinya.

**BCP:** *Business Continuity Plan* dan *Disaster Recovery Plan* adalah contoh lain dari metode untuk memitigasi risiko operasional. Tujuannya adalah setelah terjadinya kejadian risiko operasional, dampak terhadap bisnis dapat diminimalisasi dan pemulihannya dapat segera secepatnya diusahakan.

## Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko yang dihadapi Bank akibat ketidakcukupan sumber likuiditas keuangan yang ada untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo atau hanya bisa mendapatkan sumber dana dengan biaya yang sangat tinggi.

Bank mempunyai seperangkat organisasi, kebijakan dan prosedur untuk mengelola risiko likuiditas. Penerapan manajemen risiko likuiditas bertujuan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan posisi neraca bank yang mempunyai risiko likuiditas. Asset Liability Committee (ALCO) adalah komite yang mengkaji profil risiko likuiditas termasuk juga kepatuhannya terhadap limit risiko yang telah disepakati. Group Market Risk sebagai unit kontrol yang independen melaksanakan fungsi pengukuran, monitoring dan kontrol terhadap eksposur risiko likuiditas jangka pendek.

Pengukuran terhadap eksposur risiko likuiditas jangka

exposures are with reference to Maximum Cumulative Outflows (MCO) and stress test.

MCO is a measurement of cash flow mismatch under normal conditions, with appropriate assumptions made about customer behaviour. MCO is measured over a specified horizon and limits are applied to overnight, 1 week and 1 month horizons.

Stress Liquidity Risk is measured for internal purposes against an 8 consecutive day time horizon. Cash outflows are assumed to accelerate relative to normal conditions. Bank holds a stock of marketable assets against a liquidity stress event. Bank is required to hold sufficient marketable assets to offset the net stress cash outflow each time the liquidity stress test is run. Marketable assets are adjusted in value to reflect assumptions about realisability in a forced sale environment.

GMRC has all oversight of market risk as defined by the Risk Management Framework. Delegated authority for liquidity risk limit setting is recorded in the Limit Management System (LMS). Limit approvals are also recorded within LMS and it is not possible for a risk manager to approve limits beyond their delegated authority due to the LMS workflow process

## Legal Risk

### Organisation Structure

Country Legal & Compliance (L&C) Head leads and coordinates CIC Legal and RC Legal. L&C Department is under the supervision of Chief Executive Officer (CEO) and South East Asia Regional Head L&C. CEO in Indonesia oversees L&C Department to ensure independent legal analysis and advice is provided to business and support functions in the bank. L&C risk management is also controlled through Business Operational Risk and Country Operational Risk Committees.

### Risk Management Control Mechanism

To mitigate legal risk, Group L&C makes internal policies and procedures. To the extent applicable, Country Addendum can be made to apply relevant internal policies/procedures in Indonesia and comply with local laws and regulations. A new product or activity cannot be implemented without legal department sign off after having reviewed all legal

pendek terutama mengacu pada *Maximum Cumulative Outflow* (MCO) dan *stress test*.

MCO adalah pengukuran arus kas dalam kondisi normal, dengan asumsi yang tepat mengenai kebiasaan nasabah. MCO dihitung dan dikenakan limit pada rentang waktu overnight, satu minggu dan horison 1 bulan.

Risiko stres likuiditas diukur untuk tujuan internal dalam horison waktu 8 hari. Aliran kas keluar diasumsikan meningkat secara relatif dalam kondisi normal. Bank memiliki aset likuid yang dapat dijual untuk menghadapi keadaan likuiditas yang ketat. Bank diharuskan untuk memiliki aset likuid yang siap jual untuk mengantisipasi arus kas keluar dalam setiap eksekusi *stress test* likuiditas. Aset siap jual diatur dalam nilai untuk merefleksikan asumsi dari kemampuan untuk lepas dari kondisi tekanan jual.

Komite Grup Manajemen risiko pasar memiliki kewenangan pengawasan sepenuhnya terhadap risiko likuiditas sesuai dengan kerangka kerja manajemen risiko. Limit-limit yang disetujui dan pihak-pihak yang mempunyai kewenangan terhadap persetujuan limit dicatat di *Limit Management System* (LMS).

## Risiko Hukum

### Struktur Organisasi

Divisi Hukum & Kepatuhan (L&C) dipimpin oleh Kepala Divisi L&C mengkoordinasi Divisi Hukum CIC dan Divisi Hukum RC. Divisi L&C berada di bawah pengawasan *Chief Executive Officer* (CEO) dan Kepala Divisi L&C Regional Asia Tenggara. CEO di Indonesia membawahi satuan tugas L&C yang akan memastikan penyediaan analisis/advis hukum yang secara independen memberikan analisa/advis hukum kepada satuan kerja dalam setiap jenjang organisasi Bank dan memantau implementasi Manajemen Risiko Hukum melalui wadah *Business Operational Risk Committee* dan *Country Operational Risk Committee*.

### Mekanisme Pengendalian Risiko Hukum

Pengendalian Risiko Hukum dilakukan melalui adanya kebijakan dan/atau prosedur untuk meminimalkan Risiko Hukum yang dibuat oleh Divisi L&C. Apabila diperlukan, *Country Addendum* atas kebijakan dapat dibuat sebagai penyesuaian Kebijakan Hukum Grup Legal. Suatu produk atau aktivitas baru tidak dapat diimplementasikan tanpa adanya persetujuan dari

aspect of the product or activities.

OR Grading Matrix of Operational Risk Framework is used to determine legal risk appetite and risk tolerance which includes legal risk indicator. It is also used to implement policy, procedure and limit threshold. Therefore, Legal Risk management strategy is inseparable of bank operational risk framework of the bank.

Legal risk identification comprises of various factors among others litigation, weakness in documentation and unavailability of regulations shall refer to risk appetite and risk tolerance determined by the bank for further escalation.

Control of legal risk is conducted through a periodic review in Product Program Guidelines or Country Addendum to ensure effectiveness of rights the Bank may have under the agreement related to product or activity and also legal opinion for specific transactions. Any events related to legal risk or litigation process and potential loss is noted in Legal Risk Management Information (LRMI). The LRMI is monitored directly by Group Legal to identify potential loss might incur by the bank.

## Strategic Risk

Each business and supporting unit is responsible to manage their own strategic risk, assess and report the strategic plan to CMG in order to implement it effectively.

In particular related to strategic investment decision making, Bank has policy and procedure in Group Policy for Operational Management of Strategic Investments dan Group Policy on Subsidiary Governance.

In general, each business and supporting unit has their own policy and procedure to support strategic plan implementation.

Process of identification, measurement, review, and

Divisi Hukum terkait setelah dilakukannya analisis aspek hukum terhadap produk dan aktivitas baru tersebut.

Penetapan *risk appetite* dan *risk tolerance* Risiko Hukum termasuk namun tidak terbatas pada indikator Risiko Hukum mengacu pada OR Grading Matrix yang merupakan Kerangka Risiko Operasional yang dijadikan acuan dalam melaksanakan kebijakan, prosedur dan penetapan limit untuk Risiko Hukum. Karenanya, strategi manajemen Risiko Hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari strategi bank secara keseluruhan yang tertuang dalam *operational risk frame work*.

Identifikasi risiko hukum yang terdiri dari faktor-faktor litigasi, kelemahan perikatan dan ketidaaan peraturan perundang-undangan mengacu *risk appetite* dan *risk tolerance* yang ditetapkan bank dan memastikan eskalasi apabila melampaui *risk appetite*.

Pengendalian risiko hukum dilakukan dengan adanya review berkala untuk memastikan efektivitas hak dalam kontrak dan perjanjian/agreement terkait dengan masing-masing produk/aktivitas bank yang dilakukan setiap review *Product Program Guidelines* atau *Country Product Addenda* maupun dengan adanya opini hukum atas transaksi-transaksi tertentu. Setiap events termasuk proses litigasi yang terkait dengan risiko hukum beserta jumlah potensi kerugian dicatat di *Legal Risk Management Information* yang dipantau langsung oleh *Group Legal* di kantor pusat bank dengan tujuan untuk memproyeksi potensi kerugian yang dihadapi bank.

## Risiko Stratejik

Struktur organisasi unit yang menangani risiko stratejik berada pada masing-masing unit bisnis dan unit pendukung dimana seluruhnya bertanggung jawab membantu CMG menyusun perencanaan stratejik dan mengimplementasikannya secara efektif.

Secara khusus, terkait dengan keputusan investasi stratejik, Bank memiliki kebijakan dan prosedur yang dituangkan dalam *Group Policy for Operational Management of Strategic Investments* dan *Group Policy on Subsidiary Governance*.

Secara umum, setiap unit bisnis dan unit pendukung memiliki kebijakan dan prosedur yang mendukung implementasi rencana stratejik.

Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan,

monitoring for risk and risk management information system is limited by delegating the responsibility to specified person or unit, referring to Group Delegated Authorities Policy.

pengendalian risiko dan sistem informasi manajemen risiko untuk risiko strategik akan dibatasi oleh pemberikan delegasi kepada unit atau orang tertentu dengan mengacu kepada *Group Delegated Authorities Policy*.

### Compliance Risk

Compliance organisation structure consists of Regulatory Compliance, Retail Clients Compliance, Corporate Institutional Clients Compliance, Compliance Monitoring dan Financial Crime Risk.

Compliance function main responsibilities are:

- Disseminate and sosialise new banking regulation including the updates to respective units as per *Country Guideline on Local Regulations Dissemination Procedures*.
- Manage regulatory audit as per *Group Policy on Regulatory Visit Guide*.
- Give training to new staffs, content refers to *Group Template on Staff Compliance Induction*.

Process of identification, measurement and compliance risk management information system is managed in *Regulatory Risk Management Information* (RRMI).

In order to compliance risk monitoring, Compliance unit reviews prevailing banking regulation implementation. This review process refers to *Group Guidance on Regulatory Compliance Monitoring* dan *Compliance Monitoring Methodology*.

Compliance risk monitoring uses same approach to ensure sufficient compliance awareness in branches, to prevailing law and or regulation.

### Risiko Kepatuhan

Struktur organisasi di satuan kerja fungsi kepatuhan terdiri dari *Regulatory Compliance*, *Retail Clients Compliance*, *Corporate Institutional Clients Compliance*, *Compliance Monitoring* dan *Financial Crime Risk*.

Tanggungjawab utama dari satuan kerja fungsi kepatuhan adalah :

- Menyebarluaskan dan mensosialisasikan setiap ketentuan dan atau peraturan perbankan baru termasuk perubahannya kepada unit-unit kerja terkait dengan mengacu kepada *Country Guideline on Local Regulations Dissemination Procedures*.
- Menangani audit yang dilakukan oleh regulator dengan mengacu kepada *Group Policy on Regulatory Visit Guide*.
- Memberikan pemahaman kepatuhan kepada karyawan baru dalam bentuk pelatihan dimana materi pelatihan mengacu kepada *Group Template on Staff Compliance Induction*.

Proses identifikasi, pengukuran dan sistem informasi manajemen risiko kepatuhan diatur di dalam pedoman *Regulatory Risk Management Information* (RRMI).

Dalam rangka pemantauan risiko kepatuhan, satuan kerja fungsi kepatuhan melakukan review terhadap penerapan peraturan perbankan yang berlaku. Review ini dilakukan dengan mengacu kepada *Group Guidance on Regulatory Compliance Monitoring* dan *Compliance Monitoring Methodology*.

Pengendalian risiko kepatuhan dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang sama untuk memastikan tingkat kepatuhan yang memadai di kantor-kantor cabang yang berlokasi di berbagai kota, terhadap peraturan perundang-undangan dan atau ketentuan yang berlaku.

## Reputational Risk

There are three procedures to manage reputational risk:

- identify potential reputational risk, both from business and or other functions.
- Ensure that strategy to minimise the impact is available.
- Approve reputational risk report submitted to Country Risk Committee and Regional Head of Corporate Affairs.
- Identification Process
  - Internal: internal escalation process from employee, business, and other function.
  - External: media monitoring, from news and reader's note.
- Measurement Process:  
Reputational risk measurement can be found at Reputational Risk Management – Corporate Affairs Reference Manual.

## Risiko Reputasi

Prosedur untuk mengelola risiko reputasi terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- Identifikasi kemungkinan risiko reputasi di masa mendatang, baik dari segi bisnis maupun fungsi lainnya.
- Memastikan persiapan strategi untuk meminimalkan dampak reputasi.
- Menyetujui laporan risiko reputasi yang disampaikan ke Country Risk Committee dan Regional Head of Corporate Affairs
- Proses Identifikasi :
  - Internal : Proses eskalasi internal baik dari karyawan, bisnis dan fungsi lainnya
  - External : *Media monitoring*: klipping berita dan surat pembaca
- Proses Pengukuran :
 

Pengukuran risiko reputasi ini dituangkan dalam pedoman manual Corporate Affairs mengenai manajemen risiko (*Reputational Risk Management – Corporate Affairs Reference Manual*).

## 5. Transparency Aspect as per Quarterly Published Financial Statement / Aspek Transparansi sesuai Laporan Keuangan Publikasi Triwulan

Information related to disclosure of Quarterly Published Financial Statements ended 31 December 2015 has been published in newspapers dated 26 Maret 2016.

Informasi terkait dengan pengungkapan Laporan Keuangan Publikasi Triwulan yang berakhir pada 31 Desember 2015 telah kami publikasikan melalui surat kabar pada tanggal 26 Maret 2016.

## 6. Disclosure Aspect related to Business Group / Aspek Pengungkapan yang terkait dengan Kelompok Usaha

Standard Chartered Bank Indonesia does not have a business group in Indonesia.

Standard Chartered Bank Indonesia tidak memiliki kelompok usaha di Indonesia.

## 7. Disclosure Aspect of Financial Accounting Standard / Aspek Pengungkapan sesuai Standar Akuntansi Keuangan

Other disclosure aspects in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards are presented as part of the Combined Financial Statements of Standard Chartered Bank Indoensia ended 31 December 2015 which have been audited by Registered Public Accountant Siddharta & Wijaya (a member of KPMG).

Aspek pengungkapan (*disclosure*) lainnya yang sesuai dengan Standard Akuntansi Keuangan disajikan menjadi bagian dari Laporan Keuangan Gabungan Standard Chartered Bank Indonesia tanggal 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta & Wijaya (KPMG).

## 8. Other Information / Informasi Lain

There is no other information that needs to be disclosed related to the Bank's guaranteed asset, important transaction in significant amount, and subsequent event up to Independent Auditor's Report dated 24 Maret 2016..

Tidak ada informasi lain yang perlu kami ungkapkan terkait dengan aset Bank yang dijaminkan, transaksi penting lain dalam jumlah signifikan, dan kejadian penting sampai dengan tanggal Laporan Akuntan Publik tanggal 24 Maret 2016. .

## TRANSPARENCY OF GCG IMPLEMENTATION

### TRANSPARANSI PELAKSANAAN GCG

#### Good Corporate Governance

Good Corporate Governance (GCG) is one of the important aspects for Standard Chartered Bank to achieve its objective, "*Leading the way in Asia, Africa and the Middle East*" and being a competitive organization managed by qualified people who respect the values of integrity, professionalism, and leadership.

Standard Chartered Bank has already had global internal policies named Code of Conduct. This policy sets out the standard of behaviour expected from all Standard Chartered Bank employees such as to comply with laws, regulations and group standards, reject bribery and corruption, and avoid being compromised by gift and entertainment, Speak Up policy as well as conflict of interest. The internal policy is fundamental in the implementation of Good Corporate Governance.

In Indonesia, the above internal policies are combined with Bank Indonesia Regulation No. 8/4/PBI/2006 as amended by Bank Indonesia Regulation No. 8/14/PBI/2006 pertaining to the Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Bank and Bank Indonesia Circular Letter No. 15/15/DPNP pertaining Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Bank, and other prevailing regulation.

#### Tata Kelola Perusahaan

*Good Corporate Governance (GCG)* merupakan salah satu unsur penting bagi Standard Chartered Bank untuk mencapai tujuannya yakni "*Leading the way in Asia, Africa and the Middle East*" dan menjadi organisasi yang kompetitif yang dikelola oleh sumber daya handal yang menghargai nilai-nilai integritas, profesionalisme dan kepemimpinan.

Standard Chartered Bank telah memiliki kebijakan internal, yaitu *Code of Conduct* yang mengatur standar perilaku yang diharapkan dari karyawan Standard Chartered Bank, antara lain mematuhi hukum, peraturan dan kebijakan internal, menolak penyuapan dan korupsi, menghindari pemberian dan penerimaan hadiah atau hiburan, kebijakan *Speak Up*, serta benturan kepentingan. Kebijakan ini sangat fundamental dalam mendukung penerapan *Good Corporate Governance*.

Di Indonesia, kebijakan internal tersebut dipadukan dengan Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum, dan ketentuan pelaksanaannya dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum, serta peraturan lain yang berlaku.

## A. Disclosure of GCG Implementation / Pengungkapan Pelaksanaan GCG

### 1. Roles and Responsibilities of Board of Commissioners and Directors / Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi

#### Board of Commissioners

The Bank does not have Board of Commissioners since Standard Chartered Bank Indonesia is a branch of Standard Chartered Bank headquartered in London, England. Supervisory function is done by the Regional office representative.

#### Management Committee

The Bank's activities are directed and governed by the Management Committee (herein after called as "CMT"), which represents as Board of Directors. The CMT is directly responsible for the operations of the Bank. In carrying out its responsibilities the CMG adheres to Standard Chartered Bank's Risk Management Framework ("RMF").

#### Supervision and Independence of CMT

##### ▪ Roles and Responsibility of CMT

CMG leadership at Standard Chartered Bank Indonesia plays important role in determining and agreeing the response to cross business challenges in the following areas: financial management, customer and franchise management, corporate governance and people & talent.

CMT's responsibility in the above areas are as follows:

- Financial management: review the financial performance of each business against budget/forecast and identify action plans to support individual business and the meeting of overall country targets.

- Customer and franchise management: contribute to development of the franchise by working cohesively to achieve the business priorities and to maximize business

#### Dewan Komisaris

Bank tidak memiliki Dewan Komisaris, karena Standard Chartered Bank Indonesia merupakan kantor cabang dari Standard Chartered Bank yang berkantor pusat di London, Inggris. Fungsi Pengawasan dilakukan oleh wakil kantor Regional

#### Management Committee

Aktivitas Standard Chartered Bank Indonesia diarahkan dan diawasi oleh Management Committee (selanjutnya disebut dengan "CMT"). CMT bertanggung jawab secara langsung terhadap operasional bank. Dalam melaksanakan tugasnya, CMG mengacu pada *Risk Management Framework* ("RMF").

#### Fungsi Pengawasan dan Independensi CMT

##### ▪ Roles and Responsibility of CMT

Kepemimpinan CMG di Standard Chartered Bank Indonesia memiliki peranan penting dalam menentukan dan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan dalam menghadapi tantangan lintas bisnis yang meliputi manajemen keuangan, manajemen nasabah dan kantor cabang, tata kelola perusahaan, serta sumber daya manusia dan kapasitasnya.

Tanggung jawab CMT dalam bidang-bidang tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- Manajemen keuangan: mengkaji kinerja keuangan setiap bisnis terhadap anggaran/perkiraan pengeluaran dan menetapkan tindak lanjut untuk mendorong bisnis dan mencapai target secara keseluruhan
- *Customer and franchise management*: mencapai prioritas bisnis dan mengembangkan setiap kesempatan bisnis secara maksimal untuk mengembangkan kantor cabang di Indonesia. CMG juga

development opportunities for the country. CMT is also asked to promote the right corporate identity within the country internally and externally, identifying and sponsoring the implementation of appropriate local and Group communities programmes.

- Corporate governance: establish and maintain a sound corporate governance and compliance framework. At this instance, CMG must ensure effective and proactive relationship with Government and regulators and monitor that Bank's interests are fully represented. CMG must ascertain that the policies of the country are adequate and consistent across businesses, are aligned to business objectives and comply with Group policies, local regulatory requirements and functional policies/requirements. CMG is to ensure effective operations management; the management, control, and monitoring of all risks are in place; and any reputational impact from risks arising in the country are anticipated, managed, and mitigated.
- People and Talent: review people issued and policies to create a high performing workforce, including how the country manages performance and compensation.

#### ■ CMG Meeting

CMT meeting is conducted on a monthly basis discussing business development especially on business performance, risk monitoring and determining strategic decision where necessary. The meetings are documented in Minutes of Meeting to ensure continuity of monitoring of any issues raised and to record business decision taken during the meeting.

During 2014, there were 10 CMG meetings and are represented by the quorum (2/3 of CMG members). CMG members who are unable to attend the meeting are represented by their acting head of department.

diminta untuk memajukan identitas bank secara internal dan external di Indonesia, menetapkan dan mendukung program komunitas yang bersifat lokal maupun Group.

- Tata kelola perusahaan: membentuk dan mempertahankan tata kelola perusahaan dan kerangka kerja kepatuhan yang sehat. Dalam hal ini, CMG harus memastikan bahwa Bank memiliki hubungan yang efektif dan proaktif dengan Pemerintah dan regulator sehingga kepentingan Bank terwakili secara baik. CMG juga harus memastikan kebijakan lokal untuk setiap bisnis konsisten satu sama lain, sesuai dengan tujuan bisnis, kebijakan Group, ketentuan lokal dan kebijakan fungsional. Selain itu, CMG dituntut untuk memastikan manajemen operasional yang efektif; dilaksanakannya pengawasan, pengendalian dan manajemen untuk semua jenis risiko; serta dilakukannya tindakan antisipasi, pengaturan, dan mitigasi terhadap risiko yang timbul dan berdampak terhadap reputasi Bank.
- *People and Talent*: mengkaji isu-isu dan kebijakan sumber daya manusia untuk menciptakan karyawan yang berkinerja unggul, termasuk didalamnya manajemen kompensasi dan kinerja.

#### ■ Pertemuan CMG

CMT mengadakan pertemuan setiap bulan guna mendiskusikan perkembangan bisnis dari sisi kinerja bisnis, pemantauan risiko maupun penentuan langkah-langkah strategis yang diperlukan. Setiap pertemuan CMG didokumentasikan dengan pembuatan notulen rapat agar setiap permasalahan dapat dipantau dan keputusan yang diambil terdokumentasi.

Selama tahun 2014 diadakan 10 pertemuan CMG yang dihadiri oleh quórum (2/3 anggota CMG). Anggota CMG yang tidak dapat hadir telah diwakili oleh pemangku jabatan sementara.

- **Independency of CMT**

Standard Chartered Bank uses a matrix organisation structure which is applied to each unit of Standard Chartered Bank globally. This is applied as one of control mechanism for Standard Chartered Bank Group to monitor all decision taken by Standard Chartered Bank Indonesia.

In performing their day to day duties, CMG member is responsible to the Chief Executive Officer. However, since each CMG is the representative of the same function in Regional Office, they are also responsible to each Regional Head in accordance with the division.

The reporting line to Regional Office is also applicable for several officers at certain level in accordance to its function even if they are not CMG members. This is to ensure that all decision taken is reported / consulted to related Regional Office.

The Regional Head conducts regular visit to related unit in Indonesia to ensure that the function of check and balance has been implemented in accordance to the reporting line in the matrix and all issues have been escalated to related party.

- **Independensi CMT**

Standard Chartered Bank menganut struktur organisasi *matrix* yang berlaku di setiap unit Standard Chartered Bank secara global. Ini merupakan salah satu mekanisme fungsi pengawasan Group atas segala keputusan yang diambil oleh Standard Chartered Bank Indonesia.

Dalam melaksanakan tugasnya, anggota CMG bertanggung jawab kepada *Chief Executive Officer*. Namun demikian, karena bidang tugas yang diemban masing-masing CMG merupakan perwakilan *Regional Office*, anggota CMG tersebut juga bertanggung jawab kepada *Regional Head* masing-masing sesuai dengan bidangnya.

*Reporting line* ke *Regional Office* juga berlaku pada beberapa pejabat tertentu sesuai dengan fungsinya meskipun bukan anggota CMG. Hal ini untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil dilaporkan/dikonsultasikan kepada *Regional Office* terkait.

*Regional Head* mengadakan kunjungan secara berkala pada unit terkait di Indonesia untuk memastikan fungsi *check and balance* dilaksanakan sesuai *reporting line* dalam *matrix* dan permasalahan telah dieskalasi kepada pihak terkait.

## 2. Completeness and Implementation of Committees' Tasks / Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite

### Committees

The Bank does not have Audit Committee, Risk Monitoring Committee and Remuneration and Nomination Committee, since Standard Chartered Bank Indonesia is a branch of Standard Chartered Bank headquartered in London, England.

However, the Bank has other committees which carry on the function to monitor the implementation of the Bank's business.

- **Asset & Liability Committee (ALCO)**

Asset & Liability Management (ALM) is part of risk management and responsible to manage and control balance sheet and profit/loss. ALM will focus in managing risk related to interest risk, liquidity risk, capital management and foreign exchange exposure.

ALCO conducts monthly meeting to evaluate the management of balance sheet, ALM strategy and implementation.

This committee establishes standard procedure on internal transfer pricing, set interest rate applied in productive asset and liability, set the funding and lending strategy and managing our investment portfolio. ALCO will also be responsible to monitor interest risk, loans period, currency exposure, funding and embedded risk. The outcome of this meeting should be reported to GALCO.

This committee is chaired by Chief Executive Officer and attended by several CMG members related to ALM such as *Retail Clients*, *Corporate Institutional Clients*, Finance and other senior management. The Minutes of Meeting is documented and emergency meeting will be conducted if necessary.

- **Country Risk Committee (CRC)**

CRC's objective is to ensure the effective management of risk<sup>1</sup> throughout Standard

### Komite-Komite

Bank tidak memiliki Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi, karena Standard Chartered Bank Indonesia merupakan kantor cabang dari Standard Chartered Bank yang berkantor pusat di London, Inggris.

Namun demikian, Bank memiliki komite-komite lain yang pada dasarnya bertugas memantau pelaksanaan bisnis Bank.

- **Asset & Liability Committee (Komite ALCO)**

*Asset & Liability Management* (ALM) merupakan bagian dari aktivitas manajemen risiko dan bertanggung jawab untuk mengelola dan memantau neraca serta laba/rugi. ALM berkonsentrasi pada pengelolaan risiko terkait suku bunga, risiko likuiditas, pengelolaan modal, dan eksposur valuta asing.

ALCO mengadakan pertemuan setiap bulan untuk mengevaluasi pengelolaan neraca, strategi, dan pelaksanaan.

Komite ini menetapkan kebijakan internal *transfer pricing*, menetapkan suku bunga aktiva produktif dan pasiva, menetapkan strategi pendanaan dan penyaluran dana, serta mengelola portofolio investasi. ALCO juga bertanggung jawab untuk memantau suku bunga, jangka waktu kredit, *currency exposure*, pendanaan dan risiko yang melekat. Hasil dari pertemuan ini akan dilaporkan kepada GALCO.

Komite ini diketuai oleh *Chief Executive Officer* dan dihadiri oleh CMG yang terkait dengan ALM seperti *Retail Clients*, *Wholesale Bank*, Finance dan manajemen senior lainnya. Notulen rapat didokumentasikan dan pertemuan luar biasa akan diselenggarakan jika diperlukan

- **Country Risk Committee (CRC)**

Komite ini bertujuan untuk memastikan bahwa manajemen risiko di Standard Chartered Bank

<sup>1</sup> Excluding the management of Liquidity and Capital Risks (prudential liquidity, regulatory and internal balance sheet ratios capital adequacy, structural currency and interest rate risk, and tax risk) which are the responsibility of the Asset and Liability Committee (ALCO), and Pensions Risk which is the responsibility of the Pensions Executive Committee (PEC).

Chartered Bank Indonesia in support of the Standard Chartered Bank's strategy. Key responsibilities of the CRC are:

- (i) to ensure the effective application of Standard Chartered Bank's risk management framework
- (ii) to ensure risk identification and measurement capabilities are objective, consistent and compliant with Standard Chartered Bank standards and applicable regulations
- (iii) to ensure the effective application of the Group's risk assurance framework to evidence that existing governance and risk control processes are effectively implemented across Standard Chartered Bank Indonesia. CRC meeting is held minimum six times per annum and is chaired by the Country Chief Risk Officer.

▪ **Country Operational Risk Committee (CORC)**  
 CORC's objective is to ensure the effective management of operational risk throughout Standard Chartered Bank Indonesia in support of the Standard Chartered Bank's strategy and in accordance with the Risk Management Framework and related Operational Risk Policies and Procedures. CORC meeting is held on a monthly basis and is chaired by the Chief Executive Officer.

The CORC meeting discusses all medium, high and very high risks in each unit business of Retail Clients, Corporate Institutional Clients and Support Functions.

▪ **Early Alert Committee (EAC)**  
 The EAC's objective is to maintain an effective oversight over the existing Early Alert (EA) portfolio, which displays early signs of potential stress. Key discussion of the meeting includes the movement in and out of EA accounts, review the proposed actions and escalation of issue as appropriate. Early Alert Committee is to be held on a monthly or more frequent basis, as deemed appropriate by the Committee's Chairman. The meeting is chaired by the Chief Executive and coordinated by Country Chief Risk Officer.

Indonesia telah dilaksanakan secara efektif untuk mendukung strategi bank. Tanggung jawab utama CRC adalah:

- (i) memastikan kerangka kerja manajemen risiko diterapkan secara efektif
- (ii) memastikan bahwa identifikasi dan pengukuran dilakukan secara obyektif, konsisten, dan sesuai dengan standar Standard Chartered Bank dan ketentuan yang berlaku
- (iii) memastikan bahwa kerangka kerja *Risk Assurance* yang dikeluarkan oleh Group diterapkan secara efektif sesuai dengan *governance* dan proses *risk control* yang berlaku. Pertemuan CRC diadakan minimal enam kali dalam setahun dan diketuai oleh *Country Chief Risk Officer*.

▪ **Country Operational Risk Committee (CORC)**  
 Tujuan dari CORC adalah untuk memastikan efektivitas dari manajemen risiko operasional secara menyeluruh di dalam bank untuk mendukung strategi bank sesuai dengan *Risk Management Framework* (RMF) serta kebijakan dan prosedur risiko operasional. Pertemuan CORC diadakan setiap bulan dan diketuai oleh *Chief Executive Officer*.

Pertemuan CORC ini membahas semua risiko/isu operasional dengan tingkat risiko medium, tinggi dan sangat tinggi di setiap unit bisnis *Retail Clients*, *Corporate Institutional Clients* dan Fungsi Pendukung (*Support functions*).

▪ **Early Alert Committee (EAC)**  
*Early Alert Committee* adalah forum untuk memonitor debitur yang menunjukkan gejala awal kredit bermasalah. Agenda utama dalam pertemuan *Early Alert* termasuk penentuan masuk dan keluarnya debitur di dalam forum *Early Alert*, menetapkan tindakan yang harus dilaksanakan terhadap debitur tersebut, serta melaporkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan apabila perlu. Pertemuan *Early Alert* dilakukan sekali dalam setiap bulan atau lebih, apabila dirasakan perlu oleh Ketua Komite. Pertemuan ini diketuai oleh *Chief Executive* dan dikoordinasikan oleh *Country Chief Risk Officer*.

- **Group Special Asset Management Committee (GSAM)**

GSAM Committee consists of Country Head of GSAM, Head of Origination Client Coverage, Senior Credit Officer and Head of WB Legal. In addition, several other people are permanently invited to the GSAM Committee meeting, such as Chief Executive Officer, Chief Finance Officer and GSAM Regional Head. The meeting is held every three-month at minimum basis. The meeting is chaired and coordinated by Country Head of GSAM. The committee oversees the management of problematic and distressed accounts.

- **Business Operational Risk Committee (BORC)**

BORC's objective is to ensure an effective management of operational risk within the business functions of Wholesale Bank, Consumer Bank and Support Functions in line with the respective Business' strategy and in accordance with the Risk Management Framework, related Operational Risk Policies and Procedures and any other relevant directives, policies and procedures.

The BORC meeting is held on a monthly basis for the Retail Clients, Corporate Institutional Clients, and other Support Functions. The meeting is attended by the business head/function head and coordinated by the Senior Operational Risk Officer responsible for each business. The meeting highlights all issues identified and determines actions to be taken. All mitigation actions are discussed and monitored to ensure proper and timely solutions

- **Information Technology Steering Committee**

The member of this committee is Chief Information Officer and other related business unit. The committee is responsible to review the development of Information Technology and to ensure that Standard Chartered Bank Indonesia's overall strategy objective can be achieved with sufficient IT support.

- **Group Special Asset Management Committee (GSAM)**

Komite GSAM beranggotakan *Country Head of GSAM*, *Head of Origination Client Coverage*, *Senior Credit Officer* dan *Head of WB Legal*. Selain anggota, beberapa personil Bank juga diundang untuk menghadiri pertemuan rutin Komite GSAM, antara lain *Chief Executive Officer*, *Chief Finance Officer* dan *GSAM Regional Head*. Pertemuan rutin Komite GSAM diadakan minimal setiap tiga bulanan, dikoordinasi dan dipimpin oleh *Country Head of GSAM*. Komite ini bertugas mengawasi penanganan akun-akun bermasalah.

- **Business Operational Risk Committee (BORC)**

Tujuan komite ini adalah untuk memastikan manajemen risiko operasional dilaksanakan dengan efektif oleh unit bisnis *Wholesale Bank* dan *Consumer Bank* serta fungsi-fungsi pendukung sejalan dengan strategi bisnis masing-masing, sesuai dengan *Risk Management Framework*, kebijakan dan prosedur risiko operasional, dan arahan lain yang terkait.

Pertemuan BORC diadakan setiap bulan untuk *Retail Clients* dan *Corporate Institutional Clients* serta di fungsi-fungsi pendukung (*Support functions*), dan dihadiri oleh pejabat bisnis/fungsi yang terkait dan dikoordinasikan oleh *Senior Operational Risk Officer* yang bertanggung jawab untuk masing-masing bisnis. Dalam pertemuan ini dibahas semua masalah-masalah yang telah diidentifikasi, kemudian ditentukan tindak lanjutnya. Tindak lanjut ini dimonitor untuk memastikan penyelesaian yang tepat pada waktunya.

- **Information and Technology Steering Committee**

Komite ini beranggotakan *Chief Information Officer* dan divisi lain yang terkait. Komite ini berkewajiban untuk memantau pengembangan IT serta memastikan rencana strategis Standard Chartered Bank Indonesia dapat dicapai dengan dukungan IT yang memadai.

### 3. Implementation of Function of Compliance, Internal Audit and External Audit / Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern

#### Functions

##### ▪ **Compliance Function**

Standard Chartered Bank Indonesia's compliance function is led by a Compliance Director.

The Compliance Director is responsible to ensure that Standard Chartered Bank Indonesia fully complies with all Bank Indonesia regulation and other prevailing local regulation issued by government bodies such as Ministry of Finance, Financial Service Authority (FSA), Tax (with assistance of tax division), and other matters related to Indonesian law.

This division is also responsible to ensure the relationship of Standard Chartered Bank Indonesia with all local government bodies is well maintained and it implements prudential banking policy by socializing all new regulation/revised regulation internally

##### ▪ **External Audit**

Standard Chartered Bank Indonesia has appointed Siddharta & Widjaja, a member firm of KPMG International, an independent external auditor to review financial report and the bank's operational process which may impact financial report in 2014. This decision is in line with appointment of KPMG as external auditor for Group.

##### ▪ **Internal Audit**

Internal Audit role for SCB Indonesia was assumed by Country Audit (known as SKAI) which is part of Group Internal Audit (GIA). Country Audit (SKAI) led by local Country Head of Audit reported to the Country CEO and ASEAN, South Asia, NEA & Greater China Head of Audit in Singapore.

Internal audit adopts a risk-based and process oriented approach

#### Fungsi-Fungsi

##### ▪ **Fungsi Kepatuhan**

Fungsi kepatuhan Standard Chartered Indonesia dipimpin oleh seorang Direktur Kepatuhan.

Direktur Kepatuhan bertanggung jawab untuk memastikan agar Standard Chartered Bank Indonesia mematuhi semua peraturan Bank Indonesia maupun peraturan lokal lainnya yang berlaku dan diterbitkan oleh lembaga-lembaga pemerintahan seperti Departemen Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kantor Pajak (dibantu oleh divisi perpajakan).

Divisi ini juga bertanggung jawab untuk memastikan agar hubungan Standard Chartered Bank Indonesia dengan lembaga pemerintahan dapat terjalin dengan baik dan menerapkan prinsip kehati-hatian dengan cara mensosialisasikan semua peraturan baru maupun yang telah direvisi kepada unit internal yang memiliki kaitan dengan peraturan baru tersebut.

##### ▪ **Audit Ekstern**

Standard Chartered Bank Indonesia telah menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Siddharta & Widjaja (*a member firm of KPMG International*) yang bertindak sebagai auditor independen untuk memeriksa laporan keuangan maupun proses-proses yang mempengaruhi laporan keuangan tahun 2014. Keputusan ini sejalan dengan penunjukan KPMG sebagai auditor eksternal Group.

##### ▪ **Audit Internal**

Fungsi Audit Internal SCB Indonesia dijalankan oleh unit *Country Audit* (atau dikenal dengan Satuan Kerja Audit Intern / SKAI) yang merupakan bagian dari *Group Internal Audit* (GIA). Unit *Country Audit* dikepalai oleh *Country Head of Audit* dengan garis pelaporan kepada *Country CEO* dan *ASEAN, South Asia, NEA & Greater China Head of Audit* di Singapura.

Audit Internal mengikuti pendekatan audit berorientasi pada proses dan berdasarkan risiko.

Country Audit supports Country Management team to achieve their business target by providing a systematic and independent assurance of the effectiveness of risk management, control designs and implementation of internal controls as part of Good Corporate Governance in accordance to the prevailing policy. The scope of audit activities covered bank's end to end includes both Retail Clients and Corporate Institutional Clients businesses, Operations, Credit, Technology and Information System, as well as other Support Functions at the head office.

In 2015, a number of audits were performed either jointly with GIA resources or by Country Audit team covering Retail Clients Contact Centre, Branch Control, Regulatory Reporting, Lending Liabilities Operations, Securities Services, Clearing & Settlement, Financial Market, ICAAP

On the audit findings, management has made commitment to follow up the existing findings. Periodically, Country Audit monitors the development of follow up improvement that has been undertaken by the management.

#### **4. Implementation of Risk Management / Penerapan Manajemen Risiko**

##### **▪ Risk Management**

Effective risk management is fundamental to being able to generate profits consistently and sustainably and is thus a central part of the financial and operational management of the Bank.

Through risk management framework, enterprise-wide risks are managed with the objective of maximising risk-adjusted returns while remaining within the risk appetite.

As part of this framework, a set of principles describes the risk management culture to be sustained:

- ▶ Balancing risk and return.
- ▶ Responsibility: it is the responsibility of all employees to ensure that risk-taking is disciplined and focused.

Unit *Country Audit* membantu Manajemen SCB Indonesia dalam mencapai tujuan bisnis mereka melalui proses yang sistematis dan independen dalam melakukan penilaian terhadap efektivitas manajemen risiko, desain pengendalian, dan implementasi dari pengendalian internal sebagai bagian dari *Good Corporate Governance* sesuai kebijakan yang berlaku. Cakupan audit meliputi Bank secara keseluruhan terdiri dari bisnis *Retail Clients* dan *Corporate Institutional Clients*, Operasional, Kredit, Teknologi dan Sistem Informasi, dan juga fungsi-fungsi pendukung di kantor pusat.

Selama tahun 2015, sejumlah audit telah dilakukan baik bersama-sama dengan tim dari *GIA* maupun oleh *Country Audit* sendiri meliputi *Retail Clients Contact Centre*, *Branch Control*, *Regulatory Reporting*, *Lending Liabilities Operations*, *Securities Services*, *Clearing & Settlement*, *Financial Market*, *ICAAP*.

Atas temuan audit, pihak manajemen telah melakukan perbaikan sebagai komitmen tindak lanjut atas temuan yang ada. Secara periodik, audit internal melakukan pemantauan terhadap perkembangan perbaikan tindak lanjut yang telah dilakukan oleh manajemen.

##### **▪ Manajemen Risiko**

Manajemen risiko yang efektif sangat penting untuk menghasilkan keuntungan secara konsisten dan berkesinambungan. Oleh karena itu manajemen risiko merupakan bagian yang sentral dalam manajemen finansial dan operasional Bank.

Melalui kerangka manajemen risiko, *enterprise-wide risks* dikelola secara menyeluruh dengan tujuan memaksimalkan pendapatan berdasarkan risiko dan tetap dalam '*risk appetite*'.

Sebagai bagian dari kerangka ini, serangkaian prinsip menggambarkan budaya manajemen risiko yang berkesinambungan:

- ▶ Menyeimbangkan antara risiko dan hasil (*return*).
- ▶ Tanggung jawab (*Responsibility*): Semua karyawan bertanggung jawab untuk memastikan kedisiplinan dan fokus dalam menghadapi risiko.

- ▶ Accountability: risk is taken only within agreed authorities and where there is appropriate infrastructure and resource.
- ▶ Anticipation: the Bank to anticipate future risks and ensure awareness of all known risks.
- ▶ Competitive advantage: the Bank to achieve competitive advantage through efficient and effective risk management and control.
- ▶ Akuntabilitas (Accountability): risiko diambil sesuai dengan otoritas masing-masing dengan didukung infrastruktur dan sumber daya yang memadai.
- ▶ Antisipasi: Bank mengantisipasi risiko masa depan yang signifikan.
- ▶ Keuntungan komparatif: Bank melakukan usaha untuk mencapai keuntungan komparatif melalui pendekatan manajemen risiko dan kontrol yang efektif dan efisien.

### Active Supervision by Board of Commissioners and Directors

Standard Chartered Bank Indonesia (SCBI) does not have Board of Commissioners as it is a branch of Standard Chartered Bank (SCB) domiciled in London which 100% fully owned by Standard Chartered Plc. (Group). Commissioners' role is held by Group Executive Directors (The Board), while monitoring function in Indonesia is held by Management Committee (CMT) of SCBI.

As a branch, roles and responsibilities of Board of Directors are carried on by CMT in accordance to prevailing regulations.

### Policy, Procedure and Determination of Limit

SCBI risk management implementation is supported by integrated policy and procedure in each unit, in line with SCB business strategy. Risk management limit for operational risk, legal risk, and compliance risk, refers to Operational Risk Assessment Matrix, while for credit risk, market risk, liquidity risk, strategic and reputational risks refer to each related policy.

### Process of Risk Identification, Measurement, Monitoring and Control, and Risk Management Information System

Description of RMF documentation, identification process, measurement, and risk monitoring is within Risk Management Approach, an approach that consists of 6 (six) categories of integrated risk management process.

### Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Standard Chartered Bank Indonesia (SCBI) tidak memiliki Dewan Komisaris karena SCBI merupakan kantor cabang dari Standard Chartered Bank (SCB) yang berkedudukan di London dan 100% sahamnya dimiliki oleh Standard Chartered Plc. (Grup). Fungsi komisaris diemban oleh Group Executive Directors (The Board), sedangkan fungsi pengawasan di Indonesia dilaksanakan oleh Group Management Committee ("CMT") SCBI.

Sebagai kantor cabang, pelaksana tugas dan kewenangan Direksi dilakukan oleh CMT sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit

Penerapan manajemen risiko SCBI didukung dengan serangkaian kebijakan dan prosedur manajemen risiko di setiap unit dengan mengacu kepada strategi bisnis SCBI. Penetapan limit manajemen risiko untuk risiko operasional, risiko hukum dan risiko kepatuhan mengacu kepada *Operational Risk Assessment Matrix*, sedangkan untuk risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko stratejik dan risiko reputasi mengacu kepada pedoman masing-masing.

### Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

Di dalam dokumen RMF, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko dijabarkan dalam suatu pendekatan yang dinamakan *Risk Management Approach* yang dikelompokkan menjadi 6 (enam) kategori proses manajemen risiko

yang saling tergantung satu sama lain.

In order to provide accurate information, complete, informative, punctual, and reliable, SCBI conducts periodical meeting attended by business unit heads. Information gathered from the meeting can be used by CMG for decision making. This is part of Risk Management Information System in SCBI.

Dalam rangka menyediakan informasi yang akurat, lengkap, informatif, tepat waktu dan dapat diandalkan, SCBI menyelenggarakan rapat internal secara berkala yang dihadiri oleh unit bisnis terkait dimana informasi tersebut dapat digunakan oleh dewan direksi dalam rangka proses pengambilan keputusan. Hal ini merupakan rangkaian dari Sistem Informasi Manajemen Risiko yang dimiliki oleh SCBI.

### **Internal Control System**

To ensure risk management process effectiveness for risk profile maintenance, SCBI has 3 (three) lines of defences with distinguished responsibilities of risk management and monitoring.

### **Sistem Pengendalian Intern**

Untuk memastikan efektifitas proses manajemen risiko dalam memelihara profil risiko, SCBI mempunyai 3 (tiga) "lines of defence" yang masing-masing memiliki tanggungjawab terhadap manajemen risiko dan pengawasan.

## **5. Fund Provision to Related Party and to Large Exposure / Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana**

No	Fund Provision Penyediaan Dana	Total / Jumlah	
		Debtor / Debitur	Amount / Nominal
1	To related party Kepada Pihak terkait	56	1.221.951
2	Core Debtor Kepada Debitur Inti		
	a. Individual / Individu	0	0
	b. Group / Kelompok	25	7.449.821

## **6. Strategic Plan / Rencana Strategis**

Standard Chartered Bank Indonesia has already had long term strategic plan (three years period) which is presented in annual business plan. Business plan will be updated on a regular basis to represent the latest condition and will be monitored by related forum.

Standard Chartered Bank Indonesia telah memiliki rencana strategis jangka panjang (periode 3 tahun) yang dijabarkan dalam rencana bisnis tahunan. Rencana bisnis itu diperbaharui untuk mencerminkan kondisi sebenarnya. Pencapaian rencana strategis tersebut akan dipantau dalam forum-forum yang ada.

## **7. Transparency of Financial and Non-Financial Condition / Transaparansi Kondisi Keuangan dan Non-Keuangan**

The preparation and presentation of financial and non-financial reports were in compliance with the procedures, types and scope prescribed by applicable

Penyusunan dan penyajian laporan keuangan dan non-keuangan telah dilakukan dengan tata cara, jenis dan cakupan yang sesuai dengan ketentuan Bank

Bank Indonesia regulations. Standard Chartered Bank Indonesia had also published information relating to financial statements on the website ([www.standardchartered.co.id](http://www.standardchartered.co.id)) which is publicly accessible.

Indonesia yang berlaku. Standard Chartered Bank Indonesia juga telah menyajikan informasi mengenai laporan keuangan pada website ([www.standardchartered.co.id](http://www.standardchartered.co.id)) yang dapat diakses oleh publik.

## **8. Other Information related to GCG / Informasi Lain yang Terkait dengan GCG**

There is no other information that needs to be disclosed related to intervention from owner, internal dispute or other matter raise as a result of the Bank's remuneration policy.

Tidak ada informasi lain yang perlu kami ungkapkan terkait dengan intervensi pemilik, perselisihan internal atau permasalahan yang timbul sebagai dampak kebijakan remunerasi pada Bank.

## **B. Share Ownership of the Board Member of Directors / Kepemilikan Saham Anggota Direksi**

There is no CMT member that has share ownership of 5% or above from total paid in capital of the Bank or any other bank, non-bank financial institution, or corporate, either in country or overseas.

Tidak ada anggota CMT yang memiliki saham sebesar 5% atau lebih dari total modal disetor Bank, atau bank lain, lembaga keuangan bukan bank, atau perusahaan lainnya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

## **C. Financial and Family Relationship of the Board Member of Directors / Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga anggota Dewan Direksi**

There is no CMT member that has either financial relationship or family relationship with other CMT members.

Tidak ada anggota CMT saling memiliki hubungan keuangan maupun hubungan keluarga dengan anggota CMT lainnya.

## **D. Shares Option / Shares Option**

Standard Chartered Bank has a share option program named as Sharesave. Sharesave is an option which provides staff option to buy Standard Chartered Bank shares at discounted price within 3 years period.

Standard Chartered Bank memiliki program opsi pembelian saham bagi karyawan yang dinamakan Sharesave. Sharesave merupakan opsi yang memberikan hak bagi karyawan untuk membeli saham Standard Chartered Bank dengan harga diskon dengan jangka waktu 3 tahun.

## **E. Frequency of Board of Commissioners Meeting / Frekuensi Rapat Dewan Komisaris**

The Bank does not have Board of Commissioners since Standard Chartered Bank Indonesia is a branch

Bank tidak memiliki Dewan Komisaris, karena Standard Chartered Bank Indonesia merupakan kantor

of Standard Chartered Bank headquartered in London, England. Hence, no frequency of Board of Commissioners noted.

cabang dari Standard Chartered Bank yang berkantor pusat di London, Inggris. Dengan demikian, tidak ada frekuensi rapat Dewan Komisaris yang dicatat.

## F. Legal Cases / Permasalahan Hukum

The following cases being legally processed in 2014\*:

Berikut ini adalah kasus-kasus yang diproses secara hukum selama periode tahun 2014\*:

Legal Cases/ Permasalahan Hukum	Total Cases / Jumlah Kasus	
	Perdata	Pidana
Settled Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap	6	--
In Progress Dalam proses penyelesaian	4	--
Total	10	--

\*Above represents legal claims made against the bank by customer and vice versa / Jumlah diatas menunjukkan tuntutan hukum atas bank oleh nasabah atau sebaliknya

## G. Transactions which Contains Conflict of Interest / Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Standard Chartered Bank already had internal policy which specifically governed conflict of interest and Personal Account Dealing policy. These policies should be adhered to by all Standard Chartered Bank staffs.

The Group is committed to treating its clients fairly and requiring its staffs to conduct themselves with integrity. The Group recognises that the perception of a conflict of Interest may be as damaging as an actual conflict of Interest. All staffs should be mindful that a perceived failure to effectively identify and manage conflicts and perceived conflicts could damage the Group's reputation, attract legal action and regulatory sanctions.

Staff must act with independence and with integrity. Staff must be aware of their responsibilities and obligations when faced with an actual or potential conflict of interest.

Management must put in place necessary organisational, governance or administrative controls

Standard Chartered Bank telah memiliki peraturan internal yang secara khusus mengatur mengenai benturan kepentingan dan kebijakan *Personal Account Dealing*. Kebijakan ini wajib dipatuhi oleh segenap karyawan Standard Chartered Bank.

Group berkomitmen untuk memperlakukan klien secara adil dan meminta staf untuk bertindak dengan penuh integritas. Group mengakui bahwa persepsi mengenai benturan kepentingan dapat memberikan dampak yang sama besarnya dengan benturan kepentingan yang aktual. Seluruh staf diingatkan bahwa kegagalan dalam mengidentifikasi dan mengatasi konflik secara efektif dan kemungkinan adanya konflik itu sendiri dapat mempengaruhi reputasi Group, tindakan hukum, dan sanksi regulator.

Staf harus bertindak independen dan penuh integritas. Staf harus memahami tanggung jawab dan kewajibannya ketika dihadapkan pada benturan kepentingan yang aktual dan potensial.

Manajemen harus menetapkan kontrol organisasional, governance dan administratif untuk mengatur benturan

to manage conflicts of interest identified or reported. Where a conflict of interest cannot be avoided, it must be managed in a transparent and open manner. When identified, conflicts of interest should be escalated and recorded in accordance with the relevant policies and procedures.

There is no transaction which contained conflict of interest during 2015.

kepentingan yang diidentifikasi atau dilaporkan. Apabila benturan kepentingan tidak dapat dihindari, maka hal itu harus diatasi secara transparan dan terbuka. Benturan kepentingan yang teridentifikasi harus dieskalasi dan dicatat sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang terkait.

Selama tahun 2015 tidak terdapat laporan mengenai terjadinya transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

## H. Shares and/or Bonds Buy Back Transactions / Buy Back Shares dan/atau Buy Back Obligasi Bank

There was no share and bonds buy back transaction during 2015. Standard Chartered Bank Indonesia did not issue shares or bonds during this period.

Pada tahun 2015 tidak terdapat transaksi *buy back* saham maupun obligasi. Standard Chartered Bank Indonesia tidak pernah menerbitkan saham maupun obligasi.

## I. Funding to Social Activity and/or Political Activity / Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan/atau Kegiatan Politik

Corporate Affairs Division is responsible for maintaining fair, consistent, and transparent communications regarding matters related to corporate governance, material transactions, and corporate actions.

This division is also responsible for internal and external communications, which is representing the Bank to communicate with the public, media or other external parties, conduct social activity or any other activities related to Community Engagement, building corporate credibility through variety of internal and external engagement programmes.

Our Community programme focus on health and education, with youth as a target demographic. We integrate employee volunteering into our community programme and encourage skills-based volunteering. In 2015, our staff in Indonesia contributed over 1,721 employee volunteering days.

Divisi Corporate Affairs bertanggung jawab untuk memelihara komunikasi secara wajar, konsisten dan transparan mengenai hal-hal yang terkait dengan tata kelola perusahaan, transaksi dan tindakan korporasi.

Divisi ini juga bertanggung jawab untuk komunikasi internal dan eksternal, yaitu mewakili bank terkait melalui kegiatan komunikasi dengan publik, media massa dan pihak eksternal lainnya, termasuk kegiatan sosial maupun *Community*, membangun kredibilitas korporasi melalui berbagai program yang melibatkan internal maupun eksternal.

.Program kami memiliki fokus pada kesehatan dan pendidikan, dengan target demografis dari generasi muda. Kami menggabungkan kegiatan relawan karyawan ke dalam program komunitas kami dan mengagitas relawan berdasarkan keahlian. Di tahun 2015, karyawan kami di Indonesia menyumbangkan lebih dari 1,721 hari kerja relawan.

There are three main flagships of activities that we are mostly proud of are **Seeing is Believing, Positive Living, and Financial Education**.

Kegiatan-kegiatan kami terbagi atas tiga kelompok yang sangat kami banggakan, yaitu *Seeing is Believing, Positive Living* dan *Financial Education*.

### A. Seeing is Believing

Our flagship community programme, provides funding to address avoidable blindness and promote quality eye-health. Through fundraising and bank matching, we raised more than \$86 million globally. We are working with International non government organisation.

In Indonesia, our Seeing is Believing Programme focus on Diabetic Retinopathy, Refractive Error, and Vision Entrepreneur programme (DRIVE) aims to prevent avoidable vision loss among vulnerable urban populations in Indonesia. The Bank are working with Helen Kelen International Indonesia

The objectives of this program are:

1. To improve the vision of adolescent students, teachers and adults in Jakarta and its surrounding area by establishing school-based and community-based systems for identifying uncorrected refractive errors (URE), and providing free or low-cost corrective eyeglasses and referrals for further examination and treatment when required;
2. To prevent blindness by expanding the locations where screening and treatment for diabetic retinopathy (DR) are performed; and
3. To increase community and health system awareness of the importance of URE among children and DR among adults with diabetes in Jakarta and other urban centers in Indonesia.

### **Refractive Error**

During 1 April – 30 September 2015, we completed screening and refraction activities in 29 schools and distributed eyeglasses to students from 12 schools (eyeglass distribution in the remaining schools will take place in the next reporting period). HKI trained 142 school health teachers in vision screening and these teachers screened 15,596 junior high school students and 190 teachers for visual impairment. The HKI team

### A. Seeing is Believing

Program komunitas kami ini menyediakan pendanaan yang ditujukan untuk mengentaskan kebutaan yang dapat dicegah dan menggalakan pemeriksaan mata berkualitas. Melalui penggalangan dana dan kegiatan bank lainnya, secara global program ini berhasil menggalang dana lebih dari 86 juta dollar Amerika secara global. Kami bekerjasama dengan organisasi internasional non pemerintah.

Di Indonesia, program Seeing is Believing berfokus pada kondisi medis yang umum dikenal sebagai Diabetic Retinopathy, Refractive Error dan Vision Entrepreneur (DRIVE) yang ditujukan untuk pencegahan hilangnya penglihatan di Indoensia. Dalam implementasinya, Bank bekerjasama dengan Helen Keller International Indonesia.

Sasaran dari program ini adalah:

- Untuk perbaikan penglihatan pelajar, guru dan orang dewasa di wilayah Jakarta dan sekitarnya dengan mendirikan sistem pemeriksaan mata berbasis sekolah dan komunitas dengan mengidentifikasi koreksi kesalahan bias (URE) dan menyediakan pelayanan gratis ataupun kacamata minus dan memberikan arahan untuk pemeriksaan lebih lanjut dan pengobatan yang diperlukan;
- Untuk mencegah kebutaan dengan memperluas lokasi pemeriksaan dan pengobatan untuk *diabetic retinopathy* yang dilakukan ; dan
- Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan sistem kesehatan yang ada terhadap pentingnya URE dilakukan pada anak-anak dan DR bagi orang dewasa yang menderita diabetes.

### **Refractive Error**

Mulai dari 1 April sampai dengan 30 September 2015, kami telah menyelesaikan kegiatan pemeriksaan terhadap 29 sekolah yang ada dan telah memberikan kacamata untuk pelajar yang ada di 12 sekolah (dimana sisanya akan dibagikan pada periode berikutnya). HKI telah memberikan training kepada 142 guru mengenai cara pemeriksaan mata dan dalam hal ini telah dilakukan pemeriksaan mata kepada

of refractive opticians then refracted 4,415 students and 151 teachers, of which 3,499 (22.4% of the total screened) students and 147 (77.3% of the total screened) teachers received new eyeglasses for cases of uncorrected refractive error.

### **Diabetic Retinopathy**

The objective of this project is to reduce blindness caused by diabetic diseases. Through partnership with one of the leading internation NGO, Helen Keller International in Indonesia, we continuously build awareness and knowledge of diabetic retinopathy among people who suffers from diabetes, identify those requiring closer follow-up or treatment and supporting the long-term compliance with care.

#### Activities undertaken:

- Screened 1,154 people with diabetes from three province of Yogyakarta and Bandung.
- The screening has been carried out in collaboration with the provincial departments of health and provinces of Jakarta, Bandung and Yogyakarta.
- Found 457 Diabetic Retinopathy patients
- Trained 10,565 individuals and 247 health care providers (GPs, nurses, ophthalmologists and government officials) on diabetes, Diabetic Retinopathy and refractive error.
- Increased awareness of endocrinologists, ophthalmologists, Nurses and clinic staffs for the importance of eye health and diabetic.

### **B. Positive Living**

Our flagship Community Programme is “Positive Living” where we aim to tackle the spread of HIV through education.

By educating our employees and people in our communities to adopt safer behaviours we can help prevent the spread of the disease and therefore improve the health and wellbeing of the people in the communities we operate in.

15,596 pelajar sekolah menengah pertama dan 190 guru. Tim HKI melakukan pemeriksaan lanjutan ke 4,415 pelajar dan 151 guru, dan diantaranya sebanyak 3,499 pelajar dan 147 guru harus memperoleh kacamata baru untuk kerusakan mata ini.

### **Diabetic Retinopathy**

Tujuan dari program ini adalah mengurangi risiko kebutaan yang disebabkan oleh penyakit diabetes. Melalui kerjasama dengan salah satu organisasi nirlaba internasional, Helen Keller International di Indonesia, kami secara terus menerus membangun kesadaran dan menyebarkan pengetahuan tentang diabetic retinopathy di antara mereka yang menderita diabetes, disamping mengidentifikasi mereka yang memerlukan penanganan lebih lanjut dan mendukung kepatuhan jangka panjang dengan perhatian.

#### Kegiatan yang dilakukan:

- Memeriksa 865 penderita diabetes dari tiga provinsi di Yogyakarta dan Bandung.
- Pemeriksaan telah dilakukan bekerja sama dengan dinas kesehatan tingkat provinsi di Jakarta, Bandung dan Yogyakarta.
- Mengidentifikasi 457 penderita diabetic retinopathy
- Memberikan pelatihan kepada 10,565 orang dan 247 tenaga kesehatan (GPs, suster, tenaga kesehatan mata, dan kantor pemerintahan) mengenai diabetes, diabetes retinopathy dan refractive error.
- Membangun kesadaran pada ahli endocrinologist, ophthalmologis, perawat dan staff klinik tentang pentingnya kesehatan mata dan hubungannya dengan diabetes.

### **B. Positive Living**

Program Komunitas selanjutnya adalah “Positive Living”, dimana kami mencoba mencegah penyebaran virus HIV melalui pendidikan.

Dengan memberikan pengetahuan seputar HIV kepada karyawan-karyawan kami dan masyarakat umum agar memperhatikan gaya hidup yang lebih aman, kami berharap dapat membantu mencegah penyebaran HIV dan selanjutnya meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di mana kami beroperasi.

### **Activities undertaken:**

- Adopted safer behaviors and share with others to help protect them while helping eliminate the current stigma and discrimination.
- Organized online education learning for the Bank's staffs on Mandatory Positive Living
- Organized employee volunteering activities to support HIV-related charities in the community.
- Worked together with the Bank's Positive Living Champion and established Buddy System (in collaboration with a Foundation) to help prevent the further spread of HIV
- Worked together with local Community to improve the awareness and educate young generation in East Java. We have reached more than 2,500 youth in East Java

### Kegiatan yang dilakukan:

- Memulai kebiasaan yang lebih aman dan berbagi dengan sesama untuk melenyapkan stigma negative dan diskriminasi.
- Menyelenggarakan edukasi/training secara online kepada karyawan bank mengenai Hidup bersama HIV.
- Menyelenggarakan aktifitas-aktifitas relawan karyawan untuk mendukung kegiatan amal terkait HIV di tengah masyarakat
- Berkerja sama dengan Champion Living with HIV di Bank dan membentuk sistem sahabat (kolaborasi dengan sebuah yayasan) untuk membantu pencegahan HIV lebih lanjut.
- Berkerja sama dengan lokal komunitas untuk meningkatkan kesadaran dan mendidik generasi muda di Jawa Timur. Perkiraa jumlah yang telah tersentuh program ini adalah sebanyak 2.500 pelajar.

### **C. Financial Education Programme**

Another flagship Community Programme of the Bank is “**Financial Education**”, where we developed various financial management skill initiatives to empower local community from children to women micro entrepreneurs, by working closely with the government, especially the Ministry of Women Empowerment and Child Protection.

### **Activities undertaken**

- Involved bank staffs as volunteers on the financial education programme, i.e: financial education for youth (FE4Y) and financial literacy for women micro entrepreneur (incl. Women in community/PKK/Housewives).

### **C. Program Financial Education**

Program komunitas lainnya adalah Financial Education, dimana kami mengembangkan berbagai keahlian pengelolaan keuangan untuk memberdayakan komunitas lokal dari anak-anak dan perempuan pengusaha kecil, dengan secara dekat berkerjasama dengan pemerintah, terutama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

### Kegiatan yang dilakukan:

- Mengikutsertakan karyawan bank sebagai relawan pada program pendidikan keuangan, antara lain: pendidikan keuangan untuk anak muda (FE4Y) dan melek keuangan untuk perempuan pengusaha kecil (termasuk perempuan di komunitas/PKK/ibu rumah tangga)

### **D. Volunteering Programme**

We support our local communities by volunteering our time and skills. This year, we focused on increasing the amount of time our staff spend volunteering as well as encouraging skills-based projects. All of our employees are entitled to take up to three days paid leave per year for volunteering.

### **D. Program Relawan**

Kami mendukung komunitas-komunitas lokal dengan berbagi waktu dan keahlian kami dalam program relawan. Tahun ini, kami berfokus untuk meningkatkan waktu kegiatan relawan karyawan kami sekaligus mendukung kegiatan-kegiatan dengan basis keahlian. Semua karyawan kami memperoleh cuti tambahan selama tiga hari dengan dibayar penuh untuk melakukan kegiatan relawan.

